

LAPORAN AKHIR



SURVEI INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Dan Sasaran.....	3
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan	3
1.4 Dasar Kegiatan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pembangunan	5
2.2 Definisi Masyarakat	7
2.3 Pembangunan Masyarakat	10
2.4 Partisipasi Masyarakat	12
2.5 Toleransi.....	14
2.6 Kebutuhan Rasa Aman	14
2.7 Penanggulangan Bencana.....	15
2.8 Kesadaran Hukum.....	15
BAB III METODELOGI SURVEI	17
3.1 Metode Pengukuran Survey	17
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	17
3.3 Populasi Dan Sampel	19
3.4 Teknik Pengumpulan Data	23
3.5 Teknik Pengolahan Data	23
3.6 Teknik Analisis Data	24

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Gambaran Umum.....	25
4.2.1. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat	25
4.2.2. Gambaran Umum Responden.....	29
4.2 Penyajian Data	32
4.2.1. Indeks Gotong Rorong.....	32
4.2.2. Indeks Toleransi.....	40
4.2.3. Indeks Rasa Aman.....	48
4.3 Pembahasan	55
4.3.1. Analisis Data Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kabupaten	55
4.3.2. Analisis Data Indeks Pembangunan Masyarakat Berdasarkan Profil Masyarakat.....	60
4.3.3. Analisis Data Indeks Pembangunan Masyarakat Berdasarkan Kecamatan	84
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 97
5.1. Kesimpulan	97
5.2. Saran	100
 DAFTAR PUSTAKA	 105
LAMPIRAN I (KUESIONER)	106
LAMPIRAN II (HASIL DATA ANALISIS).....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Sampel Desa Setiap di Kecamatan.....	19
Tabel 3. 2. Jumlah Sampel Setiap Desa/Kelurahan yang Menjadi Sampel di Kecamatan.....	21
Tabel 3. 3. Kriteria Indeks Pembangunan Masyarakat	24
Tabel 4. 1 Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat	25
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan Tahun 2015-2017.....	26
Tabel 4. 3 Jumlah Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017/2018 Berdasarkan Tingkatan	27
Tabel 4. 4 Jumlah Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017/2018 Berdasarkan Jenis.....	27
Tabel 4. 5 Jumlah Prasarana/ Fasilitas Olahraga di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017	28
Tabel 4. 6 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 – 2017	28
Tabel 4. 7 Jumlah Tempat Peribadatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017	29
Tabel 4. 8 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	29
Tabel 4. 9 Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Usia	30
Tabel 4. 10 Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Pendidikan.....	30
Tabel 4. 11 Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Pekerjaan	31
Tabel 4. 12 Klasifikasi Rentang Nilai	32
Tabel 4. 13 Klasifikasi Rentang Nilai	41
Tabel 4. 14 Klasifikasi Rentang Nilai	48
Tabel 4. 15. Klasifikasi Rentang Nilai	56
Tabel 4. 16. Klasifikasi Rentang Nilai	57
Tabel 4. 17. Klasifikasi Rentang Nilai	58
Tabel 4. 18. Klasifikasi Rentang Nilai	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	31
Gambar 4. 2 Grafik IPMas Indeks Gotong Royong.....	33
Gambar 4. 3. Radar Item Indeks Gotong Royong.....	34
Gambar 4. 4. Indikator Kerja Sama Sosial Berdasarkan Skala Jawaban.....	35
Gambar 4. 5. Indikator Jejaring Sosial Berdasarkan Skala Jawaban.....	36
Gambar 4. 6. Indikator Aksi Kolektif Berdasarkan Skala Jawaban.....	37
Gambar 4. 7. Indikator Kepercayaan Sosial Berdasarkan Skala Jawaban.....	38
Gambar 4. 8 Grafik Indeks Toleransi.....	41
Gambar 4. 9 Radar Item Indeks Toleransi.....	42
Gambar 4. 10 Indikator Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial Budaya Berdasarkan Skala Jawaban.....	43
Gambar 4. 11 Indikator Inklusi terhadap Minoritas Berdasarkan Skala Jawaban	44
Gambar 4. 12 Indikator Kesetaraan Gender Berdasarkan Skala Jawaban.....	45
Gambar 4. 13 Indikator Dukungan Sosial Kepada Minoritas Berdasarkan Skala Jawaban.....	46
Gambar 4. 14 Radar Item Indeks Rasa Aman.....	49
Gambar 4. 15 Indikator Kesadaran Hukum Berdasarkan Skala Jawaban.....	50
Gambar 4. 16 Indikator Organisasi Sipil Berdasarkan Skala Jawaban.....	52
Gambar 4. 17 Indikator Mitigasi Risiko Sosial Berdasarkan Skala Jawaban.....	53
Gambar 4. 18 Indikator Penyelesaian Sengketa Secara Beradab Berdasarkan Skala Jawaban.....	54
Gambar 4. 19. Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat 2019.....	55
Gambar 4. 20. Indeks Gotong Royong Kabupaten Kotawaringin Barat 2019....	57
Gambar 4. 21. Indeks Toleransi Kabupaten Kotawaringin Barat 2019.....	58
Gambar 4. 22. Indeks Rasa Aman Kabupaten Kotawaringin Barat 2019.....	59
Gambar 4. 23 Grafik IPMas Berdasarkan Kelompok Usia.....	61
Gambar 4. 24 Nilai Indeks Gotong Royong Usia 31 – 40 Tahun.....	62
Gambar 4. 25 Nilai Indeks Gotong Royong Usia 20 Tahun Kebawah.....	63
Gambar 4. 26 Nilai Indeks Toleransi Usia 31 – 40 Tahun.....	64

Gambar 4. 27 Nilai Indeks Toleransi Usia 50 Keatas	65
Gambar 4. 28 Nilai Indeks Rasa Aman Usia 50 Keatas	66
Gambar 4. 29 Nilai Indeks Rasa Aman Usia 20 Tahun Kebawah.....	67
Gambar 4. 30 Grafik IPMas Berdasarkan Kelompok Pekerjaan	68
Gambar 4. 31 Nilai Indeks Gotong Royong Pegawai Pemerintah.....	69
Gambar 4. 32 Nilai Indeks Gotong Royong Pelajar/ Mahasiswa	70
Gambar 4. 33 Nilai Indeks Toleransi Pelajar/ Mahasiswa.....	71
Gambar 4. 34 Nilai Indeks Toleransi Buruh.....	72
Gambar 4. 35 Nilai Indeks Toleransi Wiraswasta	73
Gambar 4. 36 Nilai Indeks Rasa Aman Buruh.....	74
Gambar 4. 37 Nilai Indeks Rasa Aman Pegawai Pemerintah	75
Gambar 4. 38 Nilai Indeks Rasa Aman Wiraswasta	76
Gambar 4. 39 Grafik IPMas Berdasarkan Kelompok Pendidikan	77
Gambar 4. 40 Nilai Indeks Gotong Royong Jenjang Pendidikan D4/S1	78
Gambar 4. 41 Nilai Indeks Gotong Royong Jenjang Pendidikan Diploma (D1/D2/D3)	79
Gambar 4. 42 Nilai Indeks Toleransi Jenjang Pendidikan D4/S1.....	80
Gambar 4. 43 Nilai Indeks Toleransi Jenjang Pendidikan SLTA Kebawah.....	81
Gambar 4. 44 Nilai Indeks Rasa Aman Jenjang Pendidikan D4/S1	82
Gambar 4. 45 Nilai Indeks Rasa Aman Jenjang Pendidikan D1/D2/D3	83
Gambar 4. 46. Nilai IPMas Setiap Kecamatan.....	84
Gambar 4. 47. Indeks Gotong Royong Setiap Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019	85
Gambar 4. 48. Indikator Indeks Gotong Royong Kecamatan Kumai	86
Gambar 4. 49. Indikator Indeks Gotong Royong Kecamatan Pangkalan Lada ..	87
Gambar 4. 50. Indikator Indeks Gotong Royong Setiap Kecamatan	88
Gambar 4. 51. Indeks Toleransi Setiap Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.....	89
Gambar 4. 52. Indikator Indeks Toleransi Kecamatan Kumai	90
Gambar 4. 53. Indikator Indeks Toleransi Setiap Kecamatan	91
Gambar 4. 54. Indeks Rasa Aman Setiap Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.....	92
Gambar 4. 55. Indikator Indeks Rasa Aman Kecamatan Pangkalan Lada.....	93

Gambar 4. 56. Indikator Indeks Rasa Aman Kecamatan Kumai	94
Gambar 4. 57. Indikator Indeks Rasa Aman Setiap Kecamatan	95

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan masyarakat merupakan suatu proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik lagi bagi masyarakat, dengan mengkondisikan serta menaruh kepercayaan kepada masyarakat itu sendiri untuk membangun dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Pembangunan masyarakat merupakan suatu proses, baik usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan pemerintah, dalam rangka untuk memperbaiki kondisi ekonomi sosial dan kebudayaan masyarakat. Kegiatan pembangunan masyarakat mencoba untuk mengintegrasikan berbagai komunitas itu dalam kehidupan bangsa dan memampukan mereka untuk memberikan sepenuhnya demi kemajuan bangsa dan Negara berjalan terpadu didalam proses tersebut. Proses tersebut meliputi elemen dasar: pertama, partisipasi masyarakat itu sendiri dalam rangka usaha mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Sedapat-dapatnya berdasarkan kekuatan dan prakarsa sendiri. Kedua, bantuan dan pelayanan teknik yang bermaksud membangkitkan prakarsa, tekad untuk menolong diri sendiri dan kesediaan untuk menolong orang lain, dari pemerintah. Proses tersebut dinyatakan dalam berbagai program yang dirancang untuk perbaikan pembangunan kapasitas masyarakat kedepan yang lebih mandiri. Proses tersebut dinyatakan dalam berbagai program yang dirancang untuk perbaikan proyek khusus terhadap proyek khusus (Talizuduhun Ndraha, 1990:34)

Selanjutnya Konkon Subrata (1990:6) memberikan batasan tentang pembangunan masyarakat, yaitu: "Pembangunan masyarakat adalah proses evaluasi dimana sekelompok manusia yang mempunyai persamaan kebutuhan dan aspirasi bekerjasama untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi yang lebih baik, materil dan spiritual bagi perseorangan dan masyarakat". Pengertian pembangunan masyarakat diatas, menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat sesungguhnya merupakan upaya terorganisir secara berkelompok yang memiliki kebutuhan yang sama, yaitu untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang lebih baik, khususnya bagi anggotanya.

Tujuan pembangunan masyarakat adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi untuk tumbuhnya suatu masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara berswadaya dalam hal ini, adalah masyarakat miskin sehingga masyarakat mampu menetralsir belenggu-belenggu social yang dapat menahan laju perkembangan masyarakat (adapt, tradisi, kebiasaan, cara dan sikap hidup yang dapat menjadi hambatan pembangunan). Selanjutnya, Talizuduhu Nddrana (1982:107) menguraikan tentang sasaran pembangunan masyarakat yaitu sebagai berikut :

- a. Peningkatan tarap hidup masyarakat, diusahakan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan peningkatan swadaya masyarakat. dan juga sebagai usaha menggerakkan partisipasi masyarakat.

- b. Partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.
- c. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya berkembang secara mandiri, terhadap hubungan yang erat sekali, ibarat dua sisi mata uang tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Masyarakat yang berkemampuan demikian biasa membangun dengan atau tanpa partisipasi vertikal dari pihak lain.
- d. Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dapat ditumbuhkan melalui intensifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Guna peningkatan kapasitas manusia dan masyarakat secara menyeluruh, pemerintah pusat melalui Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 menjelaskan mengenai pembangunan manusia dan masyarakat yang meletakkan indeks pembangunan masyarakat dengan melihat komposit pada indeks gotong-royong (0,55 pada tahun 2012), indeks toleransi (0,49 pada tahun 2012) dan indeks rasa aman (0,61 pada tahun 2012). Dimana indeks pembangunan masyarakat ini lebih menitikberatkan pada kegiatan dimasyarakat yang dilakukan atas dasar partisipasi masyarakat sendiri maupun yang diupayakan oleh pemerintah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017– 2022, Visi pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas” dengan Misi kedua adalah “Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga” mempunyai tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan indikator tujuan adalah Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas).

Indeks Pembangunan Masyarakat merupakan wujud keberhasilan dari program pengembangan sumber daya manusia pada suatu daerah. Indeks Pembangunan Masyarakat dapat dilihat dari gotong royong, toleransi dan rasa aman. Gotong royong menggambarkan hubungan sosial dan wujud partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan kerjasama sosial, jejaring sosial, aksi kolektif, dan kepercayaan sosial. Toleransi menggambarkan respon dan bentuk sikap masyarakat terhadap adanya perbedaan sosial budaya, inklusi terhadap minoritas, kesetaraan gender, dan dukungan sosial kepada minoritas. Rasa aman menggambarkan mengenai kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi risiko sosial, dan penyelesaian sengketa secara beradab dalam kegiatan organisasi massa sebagai bentuk pengembangan dan pemberdayaan kapasitas masyarakat. Dengan ditetapkan indikator sasaran Indeks gotong royong, toleransi dan rasa aman sebagaimana untuk mengukur keberhasilan dari pembangunan misi-1. Maka wajib dilaksanakan pengukuran Indeks pembangunan Masyarakat dengan kegiatan survei untuk mendapatkan hasil dari pengukuran tersebut.

1.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dilaksanakannya Survei Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah untuk:

1. Mengukur dan mengetahui mengenai hasil hitung Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019
2. Mengetahui hasil hitung Indeks Pembangunan Masyarakat yang merupakan komposit atas indeks gotong royong, indeks toleransi dan indeks rasa aman.
3. Mengetahui dan menganalisis hasil hitung Indeks Pembangunan Masyarakat sebagai data dan informasi untuk arah kebijakan pembangunan masyarakat kedepan.

Sedangkan sasaran yang ini dijabari dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi kondisi eksisting sosial masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kajian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mempunyai potensi resiko perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
3. Strategi dan arah kebijakan pembangunan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat kedepan.

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Untuk memenuhi hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan diatas, maka rangkaian kegiatan Survei Indeks Pembangunan Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Variabel, indikator dan item dalam definisi operasional variabel pengukuran Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pelaksanaan survey lapangan dengan pendekatan dan metode survey yang ditentukan.
3. Menyusun laporan mengenai hasil hitung Survey Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.
4. Menganalisis hasil hitung Survey Indeks Pembangunan Masyarakat sebagai data dan informasi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat kedepan.

1.4 Dasar Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Survey Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 ini didasarkan pada:

1. Sasaran Pembangunan didalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022
2. Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 dengan meletakkan Indeks Pembangunan Masyarakat yang diukur sebagai komposit dari Indeks Gotong Royong, Indeks Toleransi dan Indeks Rasa Aman.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan

Pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan memberikan alternative untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara manusiawi. Dalam proses pembangunan dibutuhkan perencanaan yang matang dan memiliki alternative yang memungkinkan untuk diaplikasikan dan menjadi aspirasi. Pembangunan menitikberatkan kepada keragaman kehidupan dengan berlandaskan hukum dan menjadi solusi untuk permasalahan yang ada. Pengertian pembangunan disini diartikan sebagai suatu proses pembangunan sebagai proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan (*growth*) maupun perubahan (*change*) dalam kehidupan bersama (organisasi) sosial dan budaya. Hal ini merupakan gambaran umum dari masyarakat luas (*society*).

Menelaah pembangunan dalam masyarakat sebagai proses pertumbuhan dan perubahan, yaitu suatu proses yang menggambarkan dinamika dalam masyarakat adalah hal yang baru dalam sejarah. Seperti yang diketahui bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya, dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan pedomannya. Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial sesuai dengan tujuan dan cita-cita dari kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan-perubahan yang lebih baik yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi rakyat yang adil.

Menurut Katz (dalam Yuwono 2001:47) mengatakan pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, sebagai usaha yang telah dilakukan pemerintah.

Pembangunan yang telah dicanangkan selama ini akan dapat berjalan sesuai harapan bersama apabila mendapat tanggapan positif dari masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Gran (dalam Yuwono 2001:54) bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan masyarakat lah yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahannya proses-proses pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya dalam Negara yang sedang berkembang yang lepas landas dari suatu keadaan taraf rendah, menuju taraf yang lebih atas yaitu modernisasi, dimana variable-variable dalam pembangunan dapat mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk

tercapainya pelaksanaan kegiatan pembangunan pada dasarnya dibutuhkan inisiatif, aktif dan kritis bagi setiap warga negaranya, artinya masyarakat dapat bertindak dengan arah yang tepat dan dengan mampu menjadikan sumber-sumber dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah dalam pembangunan.

Selanjutnya menurut Bachtiar effendi (2002:2) pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan. Menurut Soekanto (2005:437) pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Dari pendapat ini dikemukakan bahwa pembangunan dari segi perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena yang menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat, sebab didasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita suatu masyarakat terus-menerus bertambah dalam jangka panjang. Analisis tersebut menunjukkan bahwa data pendapatan perkapita bias digunakan untuk tiga tujuan sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kesejahteraan yang dicapai seluruh Negara pada suatu tahun tertentu.
2. Menggambarkan tingkat kecepatan / kelajuan pembangunan ekonomi diberbagai Negara.
3. Menunjukkan jurang pembangunan diantara berbagai Negara.

2.1.1 Tujuan pembangunan yang dilakukan mencakup sasaran seperti :

1. Dalam usaha meratakan pembangunan diseluruh daerah sekaligus untuk menghindari jurang perbedaan tingkat pembangunan antara daerah yang semakin dalam.
2. Pengarah dalam kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan aspirasi dan potensi yang terdapat didaerah. Baik bagi kepentingan perkembangan nasional maupun bagi kepentingan daerah yang saling sendiri.
3. Mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan agar terjalin ikatan-ikatan (ekonomi) antar daerah yang kuat didalam suatu rangka kesatuan ekonomi nasional yang kokoh.
4. Membina daerah-daerah yang minus, daerah perbatasan dan tanah-tanah rits, dan program-program khusus.

Menurut Purwoko (dalam Yuwono 2001:54) mengemukakan terdapat tiga pembangunan masyarakat yakni :

1. Pembangunan masyarakat sebagai pengadaan pelayanan masyarakat interpretasi pembangunan masyarakat yang demikian merupakan kelengkapan dan strategi kebutuhan pokok. Pembangunan dalam hal ini identik dengan peningkatan pelayanan

sosial dan pemberian fasilitas sosial, seperti kesehatan gizi, sanitasi, dan sebagainya yang keseluruhannya meningkatkan kesejahteraan.

2. Pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi. Di banyak Negara pembangunan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih sublime dan sukar diukur seperti, keadilan, pemerataan, peningkatan budaya, kedamaian pikiran, dan sebagainya.
3. Pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk berbuat. Anggapan dasar dari interpretasi pembangunan yang demikian adalah manusia dan bukan ekonomi dan teknologi yang menjadi fokus dan sumber pembangunan yang utama. Kehendak, komitmen dan kemampuan manusia sebagai anggota masyarakat merupakan sumber-sumber pembangunan yang strategi.

Dari pengertian ini jelas bahwa pembangunan harus terus dikembangkan dengan dukungan sumber-sumber daya yang tersedia, dan dari pendapat-pendapat diatas jelas bahwa masyarakat bertindak sebagai subjek dari suatu pembangunan dan dapat dipastikan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peranan penting bagi suksesnya sebuah pembangunan, baik pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan pusat maupun lingkup daerah. Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan adalah suatu usaha atau proses yang dilakukan baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik, dalam mengadakan perubahan-perubahan atau perkembangan menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan harus dapat memberikan perubahan hidup bagi masyarakat menuju suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

2.2 Definisi Masyarakat

Banyak para ahli mendefinisikan pengertian masyarakat. Namun Secara umum Pengertian Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa inggris yaitu "society" yang berarti "masyarakat", lalu kata society berasal dari bahasa latin yaitu "societas" yang berarti "kawan". Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa arab yaitu "musyarak".

Pengertian masyarakat terbagi atas dua yaitu pengertian masyarakat dalam arti luas dan pengertian masyarakat dalam arti sempit. Pengertian Masyarakat dalam Arti Luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan Pengertian Masyarakat dalam Arti Sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Pengertian masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena

memiliki tujuan yang sama. Pengertian Masyarakat secara Sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karna manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya.

2.2.1 Pengertian Masyarakat Menurut Definisi Para Ahli

1. Pengertian masyarakat menurut definisi Paul B. Harton, yang mengatakan pendapatnya bahwa pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama yang cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.
2. Pengertian masyarakat menurut definisi Abdul Syani mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah berkumpul, bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.
3. Pengertian masyarakat menurut definisi Richard T. Schaefer dan Robert P. Lamm mengatakan pendapatnya bahwa pengertian masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dari orang-orang di luar itu, dan memiliki budaya yang relatif sama.
4. Pengertian masyarakat menurut definisi Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah proses terjadinya interaksi sosial, suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu kontak sosial dan komunikasi.
5. Pengertian masyarakat menurut definisi John J. Macionis adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama.
6. Pengertian masyarakat menurut definisi Gillin & Gillin mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh bersamaan.
7. Pengertian masyarakat menurut definisi Harton haunt adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan.
8. Pengertian masyarakat menurut Selo Sumardjan yang mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
9. Pengertian masyarakat menurut Marx Weber yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian masyarakat adalah

Masyarakat memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang membuat kita lebih mudah mengetahui arti masyarakat. Karakteristik Masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Memiliki wilayah tertentu
2. Dengan secara yang kolektif menghadapi atau menghindari musuh
3. Mempunyai cara dalam berkomunikasi
4. Timbulnya diskriminasi warga masyarakat dan bukan warga masyarakat tersebut.
5. Setiap dari anggota masyarakat dapat bereproduksi dan beraktivitas.

2.2.2 Unsur-unsur suatu masyarakat

1. Harus ada perkumpulan manusia dan harus banyak
2. Telaah bertempat tinggal dalam waktu lama disuatu daerah tertentu.
3. adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

2.2.3 Bila dipandang cara terbentuknya masyarakat :

1. Masyarakat natur, yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya, seperti: geromboklan (harde), suku (stam), yang bertalian karena hubungan darah atau keturunan.
2. Masyarakat kultur, yaitu masyarakat yang terjadi karena kapentingan kedunian atau kepercayaan.
3. Masyarakat dipandang dari sudut Antropologi terdapat dua type masyarakat:
4. Masyarakat kecil yang belum begitu kompleks, belum mengenal pembagian kerja, belum mengenal tulisan, dan tehknologi nya sederhana.
5. Masyarakat sudah kompleks, yang sudah jauh menjalankan spesialisasi dalam segala bidang barmasyarakat, kerana pengetahuan modern sudah maju,tehknologi pun sudah berkembang,dan sudah mengenaltulisan.

2.2.4 Ciri-ciri dari suatu Masyarakat, diantaranya ialah :

1. Merupakan pengelompokkan individu.
2. Adanya interaksi antara individu-individu anggota masyarakat.
3. Adanya aturan-aturan yang mengatur perilaku anggota masyarakat.
4. Individu-individu sebagai satu kesatuan mendukung, mengembangkan, dan meneruskan kebudayaan.

Masyarakat sebenarnya menganut sistem adaptif (mudah menyesuaikan diri dengan keadaan), oleh karena masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan dan tentunya juga untuk dapat bertahan. Selain itu masyarakat sendiri juga mempunyai berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi agar masyarakat itu dapat hidup secara terus-menerus. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut sebagai berikut :

1. Masyarakat membutuhkan adanya populasi (population replacement)

2. Masyarakat membutuhkan informasi
3. Masyarakat membutuhkan energi
4. Masyarakat membutuhkan materi
5. Masyarakat membutuhkan sistem komunikasi
6. Masyarakat membutuhkan sistem produksi
7. Masyarakat membutuhkan sistem distribusi
8. Masyarakat membutuhkan sistem organisasi sosial
9. Masyarakat membutuhkan sistem pengendalian sosial
10. Masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap ancaman yang tertuju pada jiwa dan harta bendanya.

2.3 Pembangunan Masyarakat

Pembangunan masyarakat pada hakekatnya adalah merupakan suatu proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik lagi bagi masyarakat, dengan mengkondisikan serta menaruh kepercayaan kepada masyarakat itu sendiri untuk membangun dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Pengertian Baku mengenai pembangunan masyarakat telah ditetapkan PBB, dalam Konkon Subrata (1991:4) bahwa: "Pembangunan masyarakat adalah suatu proses yang ditumbuhkan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan ekonomi social masyarakat seluruhnya kepada inisiatif masyarakat".

Menurut definisi tersebut, pembangunan masyarakat merupakan suatu proses, baik ikhtiar masyarakat yang bersangkutan yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan pemerintah, dalam rangka untuk memperbaiki kondisi ekonomi social dan kebudayaan masyarakat (komunitas). Mengintegrasikan berbagai komunitas itu dalam kehidupan bangsa dan memampukan mereka untuk memberikan sepenuhnya demi kemajuan bangsa dan Negara berjalan terpadu didalam proses tersebut. Proses tersebut meliputi elemen dasar: pertama, partisipasi masyarakat itu sendiri dalam rangka usaha mereka untuk memperbaiki tarap hidup mereka. Sedapat-dapatnya berdasarkan kekuatan dan prakarsa sendiri. Kedua, bantuan dan pelayanan teknik yang bermaksud membangkitkan prakarsa, tekad untuk menolong diri sendiri dan kesediaan untuk menolong orang lain, dari pemerintah.

Proses tersebut dinyatakan dalam berbagai program yang dirancang untuk perbaikan proyek khusus terhadap proyek khusus (Talizudhun Ndraha,1990:34) Selanjutnya Konkon Subrata (1990:6) memberikan batasan tentang pembangunan masyarakat, yaitu: "Pembangunan masyarakat adalah proses evaluasi dimana sekelompok manusia yang mempunyai persamaan kebutuhan dan aspirasi bekerjasama untuk memperbaiki keadan social ekonomi yang lebih baik, materil dan spiritual bagi perseorangan dan masyarakat". Pengertian pembangunan masyarakat diatas, menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat sesungguhnya merupakan upaya terorganisir secara berkelompok yang memiliki kebutuhan

yang sama, yaitu untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang lebih baik, khususnya bagi anggotanya.

Tujuan pembangunan masyarakat adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi untuk tumbuhnya suatu masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara berswadaya dalam hal ini, adalah masyarakat miskin sehingga masyarakat mampu menetralkan belenggu-belenggu social yang dapat menahan laju perkembangan masyarakat (adapt, tradisi, kebiasaan, cara dan sikap hidup yang dapat menjadi hambatan pembangunan). Selanjutnya, Talizudhu Ndrana (1982:107) menguraikan tentang sasaran pembangunan masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan taraf hidup masyarakat, diusahakan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan peningkatan swadaya masyarakat. dan juga sebagai usaha menggerakkan partisipasi masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.
3. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya berkembang secara mandiri, terhadap hubungan yang erat sekali, ibarat dua sisi mata uang tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Masyarakat yang berkemampuan demikian biasa membangun dengan atau tanpa partisipasi vertikal dari pihak lain.
4. Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dapat ditumbuhkan melalui intensifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Lebih lanjut Talizudhu Ndrana (1989: 170) berpendapat bahwa keempat sasaran pembangunan masyarakat diatas yaitu perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin, pembangkitan partisipasi masyarakat dan menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri tidak berdiri sendiri melainkan diusahakan agar satu berkaitan dengan yang lainnya sehingga ketiganya sebuah paket usaha.

Pembangunan masyarakat diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip keterpaduan, keberlanjutan, keserasian, kemampuan sendiri kaderisasi. Prinsip keterpaduan mengandung arti bahwa program atau kegiatan pembangunan masyarakat disusun oleh, bersama, dalam dan untuk masyarakat atas dasar kebutuhan dan berbagai sumber yang tersedia untuk memenuhi kepentingan bersama dalam aspek kehidupan. Prinsip keberlanjutan, memberi arah bahwa pembangunan masyarakat itu tidak dilakukan sekaligus. Melainkan bertahap dan terus menerus menuju kearah yang lebih baik. Program yang telah berhasil merupakan titik awal untuk program berikutnya sedangkan suatu program yang perlu diperbaiki dan dikembangkan menurut adanya kegiatan lanjutan. Prinsip keserasian, mengandung makna bahwa program pembangunan masyarakat memperhatikan keserasian antara kebutuhan teras yang dinyatakan oleh perorangan, lembaga-lembaga dan pemerintah. Keserasian ini pun tercermin dalam kegiatan yang bertumpu pada kepentingan rakyat banyak dan pemerintah. Kegiatan dan sasarannya mengarah pada terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohaniah serta keseimbangan dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan. Keserasian itupun tercermin dalam

kegiatan yang bertumpu pada kepentingan rakyat banyak dan pemerintah. Kegiatan dan sasarannya mengarah pada terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohaniah serta keseimbangan dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan. Keserasian itupun tercermin antara kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan.

2.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat memiliki peranan penting bagi suksesnya sebuah pembangunan, baik pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan pusat maupun lingkup daerah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat merupakan subjek dari suatu pembangunan. Pelaksanaan pembangunan harus dapat memberikan perubahan hidup menuju kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu berdasarkan pemaparan dari Talizuduhu Ndrana (1989: 170) salah satu sasaran dalam pembangunan masyarakat adalah pembangkitan partisipasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Sumarto, 2003:17). Huraerah (2008: 103) menyatakan bahwa partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam program pembangunan. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa seseorang, kelompok atau masyarakat senantiasa dapat memberikan kontribusi/sumbangan yang sekiranya mampu untuk menunjang keberhasilan program pembangunan dengan berbagai bentuk atau jenis partisipasi. Menurut Muller (2006: 256), definisi partisipatif baik secara deskriptif maupun normatif terutama harus menekankan bahwa segala perkembangan masyarakat dan pembangunan merupakan proses yang hanya bisa berhasil jika hanya dijalankan bukan saja bagi tetapi juga bersama dengan dan oleh rakyat sendiri. Hal tersebut sejalan dengan Tjokroamidjojo (1977) dalam Wahyuni (2014: 11) yang menegaskan bahwa pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan, politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu negara.

2.4.1 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Huraerah (2008: 103) memaparkan bahwa bentuk partisipasi yang dimaksud ialah macamnya sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok atau masyarakat. Berikut merupakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat:

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat. Kehadiran seseorang dalam pertemuan akan mempengaruhi bagi masyarakat yang lain agar dapat ikut serta dalam memberikan sumbangsih pemikiran.
2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa pertolongan bagi orang lain.
3. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dengan memberikan makanan atau minuman seadanya tanpa ada timbal balik (jasa).
4. Partisipasi ketrampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri. Masyarakat yang memiliki keahlian agar dapat mendongkrak kaum muda dalam berwirausaha untuk menciptakan lapangan kerja.
5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan) dan sebagainya.
6. Partisipasi dalam bentuk memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi baik dengan maksud menerima, mentaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan dalam arti menerima maupun menolak pendapat dengan syarat. Meskipun hanya dengan bentuk mengiyakan itu merupakan partisipasi yang harus dihargai.

2.4.2 Pengelompokan Partisipasi Masyarakat

Huraerah (2008: 100) memaparkan bahwa terdapat tiga tradisi konsep partisipasi terutama jika dikaitkan dengan praktek pembangunan masyarakat yang demokratis antara lain:

1. Partisipasi politik merupakan representasi dalam demokrasi. Tujuannya untuk memengaruhi dan mendudukkan wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan daripada melibatkan langsung masyarakat dalam proses-proses-proses pemerintahan.
2. Partisipasi sosial merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat dipandang sebagai beneficiary pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari penilaian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi program.
3. Partisipasi warga ialah proses pengambilan keputusan langsung dalam kebijakan publik. Warga berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi menempatkan masyarakat tidak

hanya sebagai penerima (objek) tetapi sebagai subjek dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

2.5 Toleransi

Pada dasarnya konsep toleransi erat hubungannya dengan sikap terhadap segala sesuatu yang berbeda. Sikap yang dimaksudkan adalah sikap untuk menghormati, menghargai, bertenggang rasa, dan memberi kesempatan terhadap keberadaan segala sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam diri kita. Toleransi berasal dari bahasa latin “*tolerantia*”, yang berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Secara umum istilah toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, suka rela dan kelembutan. UNESCO mengartikan toleransi sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi dan karakter manusia (Walzer, 1997 dalam Casram, 2016: 188). Toleransi merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Toleransi dalam konteks sosial, budaya, politik dan agama dapat diartikan sebagai sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau yang tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat.

Casram (2016: 189) memaparkan bahwa konsep toleransi berkaitan dengan konsep multikulturalisme. Masyarakat multikultural dapat dimaknai sebagai suatu tatanan masyarakat yang memiliki karakteristik heterogen, dimana pola hubungan antarindividu dalam masyarakat bersifat toleran dan bersedia menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai satu sama lain dengan segala perbedaan yang ada. Terdapat tiga unsur dalam multikulturalisme yakni, (1) terkait dengan kebudayaan, (2) merujuk kepada pluralitas (keragaman) kebudayaan, dan (3) cara tertentu untuk menanggapi pluralitas tersebut. Karakter interaksi antar kebudayaan dalam masyarakat multikultural adalah terjadinya asimilasi kebudayaan. Orang-orang yang hidup dalam masyarakat multikultural berasimilasi mengenai bagaimana keberagaman yang baik dalam masyarakat yang heterogen. Hal tersebut kemudian menciptakan rasa toleransi dan kerjasama antar sesama.

2.6 Kebutuhan Rasa Aman

Menurut Abraham Maslow, kebutuhan rasa aman merupakan kebutuhan tingkat kedua. Seseorang mempunyai harapan untuk dapat memenuhi standar hidup yang dianggapnya wajar. Kebutuhan ini mengarah kepada rasa keamanan, ketentraman dan jaminan seseorang dalam kedudukannya, jabatannya, wewenangnya dan tanggung jawabnya sebagai karyawan. Dia dapat bekerja dengan antusias dan penuh produktivitas bila dirasakan adanya jaminan formal atas kedudukan dan wewenangnya. Setelah kebutuhan dasarnya

terpuaskan, munculah apa yang digambarkan Maslow sebagai kebutuhan akan rasa aman atau keselamatan. Kebutuhan ini menampilkan diri dalam kategori kebutuhan akan kemantapan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut, cemas dan kekalutan; kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum, batas-batas, dan sebagainya. Kebutuhan ini dapat kita amati pada seorang anak. Biasanya seorang anak membutuhkan suatu dunia atau lingkungan yang dapat diramalkan. Seorang anak menyukai konsistensi dan kerutinan sampai batas-batas tertentu. Jika hal-hal itu tidak ditemukan, maka ia akan menjadi cemas dan merasa tidak aman. Orang yang merasa tidak aman memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas serta akan berusaha keras menghindari hal-hal yang bersifat asing dan tidak diharapkan (Frank, 1987: 73). Kebutuhan akan keselamatan atau keamanan adalah kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya fisik.

2.7 Penanggulangan Bencana

Manajemen bencana menurut Rahmat merupakan seluruh aspek kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai siklus manajemen bencana. Tujuan dari manajemen bencana adalah untuk mencegah kehilangan jiwa, mengurangi penderitaan manusia, memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko dan mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis. Carter mendefinisikan pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (*measures*) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat dan pemulihan. Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

2.8 Kesadaran Hukum

Soeharso (2005) dalam Hasibuan (2013: 79) memaparkan bahwa kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Menurut Ewick dan Silbey dalam Achmad (2009:80), kesadaran hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Adanya kesadaran masyarakat akan hukum diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk ketaatan serta ketertiban hukum. Hal tersebut

sejalan dengan pemaparan dari Hasibuan (2013: 81) bahwa peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan: 1) Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Hal yang ditekankan sebenarnya adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 1982: 152). Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah (Kutschinsky dalam Soerjono Soekanto, 1982: 159): a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*) b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*) c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*) d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).

BAB III METODELOGI SURVEI

3.1 Metode Pengukuran Survey

Pengukuran survey indeks pembangunan masyarakat didasarkan pada metode survey yang mengacu kepada perhitungan rata-rata ukur (geometrik). Rata-rata ukur (geometrik) adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalikan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakarpangkatkan dengan jumlah data sampel tersebut. Secara matematis rata-rata ukur (geometrik) dirumuskan seperti berikut ini

$$G = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n}$$

Survei indeks pembangunan masyarakat ini dilakukan dengan teknik pemberian kuisioner, baik dengan pengisian sendiri maupun kuisioner dengan wawancara tatap muka. Dalam pengukuran hasil survey indeks pembangunan masyarakat ini didalamnya meliputi komposit indeks gotong royong, indeks toleransi dan indeks rasa aman.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel untuk pengukuran survey indeks pembangunan masyarakat kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 ini melihat pada transisi perubahan Dimensi dan Variabel yang diletakkan pada IPEMas Nasional Tahun 2015 kepada perubahan Dimensi dan Variabel perubahan pada tahun 2019 yang masih dalam proses penyelarasan dan sinkronisasi terhadap indikator dan item serta cara perhitungan yang terbaru. Oleh karena untuk IPEMas Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 ini menggunakan variabel, indikator dan item perubahan yang ada, tetapi menggunakan dimensi ukur yang sama dengan IPEMas Nasional tahun 2015 (dimensi gotong royong, dimensi toleransi dan dimensi rasa aman)

Adapun konversi variabel dan indikator yang ada guna menindaklanjuti rencana perubahan pada IPEMas Nasional itu, dibuat DOV sebagai berikut :

IPMas KONSEP AWAL (RPJMN 2015-2019)		
Dimensi	Komponen	Variabel
Gotong royong	Tingkat kepercayaan	Percaya untuk menitipkan rumah kepada tetangga ketika semua ART bepergian/menginap di tempat lain
		percaya menitipkan anak (usia 0 – 12 tahun) pada tetangga jika tidak ada satupun ART dewasa ada di rumah
	Tolong menolong	Kemudahan mendapatkan pertolongan dari tetangga (selain kerabat) di lingkungan tempat tinggal ketika sedang mengalami masalah keuangan
	Aksi kolektif	Kebiasaan mengikuti kegiatan bersama untuk membantu warga yang mengalami musibah (kematian, sakit, dll) di lingkungan tempat tinggal

IPMas KONSEP AWAL (RPJMN 2015-2019)		
Dimensi	Komponen	Variabel
Toleransi	Toleransi antar umat beragama	Tanggapan terhadap kegiatan di lingkungan tempat tinggal oleh sekelompok orang dari agama lain
	Toleransi antar suku	Tanggapan terhadap kegiatan di lingkungan tempat tinggal oleh sekelompok orang dari suku lain

IPMas Konsep AWAL (RPJMN 2015-2019)		
Dimensi	Komponen	Variabel
Kesadaran Hukum	Rasa Aman	Perasaan aman di lingkungan tempat tinggal

Hasil Pengembangan IPMas		
Dimensi	Isu/Konteks/Komponen	Variabel
Kohesi Sosial	Kerjasama sosial	Partisipasi dalam kegiatan sosial
	Jejaring sosial	Partisipasi dalam kegiatan kelompok
	Aksi kolektif	Partisipasi dalam kegiatan umum
	Kepercayaan sosial	Sikap percaya terhadap lingkungan

Hasil Pengembangan IPMas		
Dimensi	Isu/Konteks/Komponen	Variabel
Inklusi Sosial	Penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya	Tanggapan terhadap kegiatan keagamaan / etnis lain
	Inklusi terhadap minoritas	Tanggapan terhadap pimpinan daerah dari suku/etnis lain
	Kesetaraan gender	<ul style="list-style-type: none"> • Kesetaraan gender dalam pendidikan dan pekerjaan • Kesehatan ibu • Peran wanita dalam jabatan publik
	Dukungan sosial kepada minoritas	Hambatan dalam mengakses Fasum

Hasil Pengembangan IPMas		
Dimensi	Isu/Konteks / Komponen	Variabel
Pengembangan kapasitas Masyarakat Sipil	Kesadaran hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Sikap percaya terhadap penegak hukum dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan • Partisipasi dalam Pemilu yang terakhir (2014)
	Organisasi sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan LSM yang terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat • Keanggotaan dalam organisasi massa (ormas) dan partai politik (parpol)
	Mitigasi risiko sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan fasilitas / upaya antisipasi/mitigasi bencana alam • Partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana alam
	Penyelesaian sengketa secara beradab	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan aparat keamanan/pemerintah sebagai penengah dalam kekerasan massa • Keterlibatan tokoh agama/masyarakat sebagai penengah dalam keke- rasan massa

3.3 Populasi Dan Sampel

Teknik sampling dengan menggunakan *Cluster Random Sampling*, yang artinya membagi secara proporsional Kecamatan dan Desa yang menjadi sampel pengukuran. Pada sampel desa akan dipilih secara acak 5 desa yang mewakili kecamatan tersebut dengan memperhatikan Kelompok wilayah desa tersebut yaitu:

1. Desa tersebut berKelompok perkotaan atau dengan wilayah yang mempunyai akses jalan besar (jalan provinsi) yaitu terletak pada pusat kecamatan, dilalui jalur provinsi, dan berada di dalam pusat kota kabupaten.
2. Desa tersebut berKelompok rural/transisi dimana desa tersebut terletak pada luar pusat kecamatan dan tidak dilewati akses jalan besar (jalan provinsi).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, berikut desa yang menjadi sampel di setiap kecamatan:

Tabel 3. 1. Sampel Desa Setiap di Kecamatan

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan			Keterangan
1	ARUT SELATAN	1	Kelurahan	Baru	Dalam Kota Kabupaten
		2	Desa	Pasir Panjang	Dalam Kota Kabupaten
		3	Kelurahan	Mendawai	Dalam Kota Kabupaten
		4	Desa	Natai Raya	Diluar pusat kecamatan
		5	Desa	Kumpai Batu Atas	Diluar pusat kecamatan
2	ARUT UTARA	1	Kelurahan	Pangkut	Ibu Kota Kecamatan
		2	Desa	Nanga Mua	Diluar pusat kecamatan
		3	Desa	Sukarami	Diluar pusat kecamatan
		4	Desa	Sambi	Diluar pusat kecamatan
		5	Desa	Penyombaan	Diluar pusat kecamatan
3	PANGKALAN LADA	1	Desa	Pandu Sanjaya	Ibu Kota Kecamatan
		2	Desa	Pangkalan Tiga	Jalur Provinsi
		3	Desa	Lada Madala Jaya	Diluar pusat kecamatan
		4	Desa	Sumber Agung	Jalur Provinsi
		5	Desa	Purbasari	Jalur Provinsi

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan			Keterangan
4	PANGKALAN BANTENG	1	Desa	Karang Mulya	Ibu Kota Kecamatan
		2	Desa	Amin Jaya	Jalur Provinsi
		3	Desa	Simpang Berambai	Diluar pusat kecamatan
		4	Desa	Pangkalan Banteng	Diluar pusat kecamatan
		5	Desa	Kebun Agung	Diluar pusat kecamatan
5	KUMAI	1	Kelurahan	Kumai Hilir	Dalam Kota Kecamatan
		2	Desa	Bumi Harjo	Jalur Provinsi
		3	Desa	Kubu	Diluar pusat kecamatan
		4	Kelurahan	Kumai Hulu	Dalam Kota Kecamatan
		5	Kelurahan	Candi	Dalam Kota Kecamatan
6	KOTAWARINGIN LAMA	1	Kelurahan	Kotawaringin Hilir	Dalam Kota Kecamatan
		2	Kelurahan	Kotawaringin Hulu	Dalam Kota Kecamatan
		3	Desa	Riam Durian	Diluar pusat kecamatan
		4	Desa	Tempayung	Diluar pusat kecamatan
		5	Desa	Babual Baboti	Diluar pusat kecamatan

Adapun pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampling menurut Slovin, berikut adalah rumus penentuan sampling menurut slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2} \dots\dots\dots \text{RUMUS SLOVIN}$$

Keterangan:

N = besar populasi/jumlah populasi

n = jumlah sampel

e = batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Berdasarkan penentuan jumlah sampel menurut Slovin di atas, diketahui bahwa dari populasi sebanyak 293.975 responden maka jumlah sampelnya adalah 400 responden. Berdasarkan sampel tersebut selanjutnya sampel tersebut akan didistribusikan ke setiap desa yang menjadi sampel penelitian dengan rata-rata setiap desa mendapatkan sampel sebanyak 13 responden dan khusus untuk desa yang berada di pusat ibukota kabupaten yaitu pada Kecamatan Arut Selatan, jumlah sampelnya adalah 15 responden. Berikut rincian jumlah sampel setiap desa/kelurahan yang menjadi sampel di kecamatan:

Tabel 3. 2. Jumlah Sampel Setiap Desa/Kelurahan yang Menjadi Sampel di Kecamatan

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan		Jumlah Sampel
1	ARUT SELATAN	1	Kelurahan Baru	15
		2	Desa Pasir Panjang	15
		3	Kelurahan Mendawai	15
		4	Desa Natai Raya	15
		5	Desa Kumpai Batu Atas	15
2	ARUT UTARA	1	Kelurahan Pangkut	13
		2	Desa Nanga Mua	13
		3	Desa Sukarami	13
		4	Desa Sambu	13
		5	Desa Penyombaan	13

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan		Jumlah Sampel	
3	PANGKALAN LADA	1	Desa	Pandu Sanjaya	13
		2	Desa	Pangkalan Tiga	13
		3	Desa	Lada Madala Jaya	13
		4	Desa	Sumber Agung	13
		5	Desa	Purbasari	13
4	PANGKALAN BANTENG	1	Desa	Karang Mulya	13
		2	Desa	Amin Jaya	13
		3	Desa	Simpang Berambai	13
		4	Desa	Pangkalan Banteng	13
		5	Desa	Kebun Agung	13
5	K U M A I	1	Kelurahan	Kumai Hilir	13
		2	Desa	Bumi Harjo	13
		3	Desa	Kubu	13
		4	Kelurahan	Kumai Hulu	13
		5	Kelurahan	Candi	13
6	KOTAWARINGIN LAMA	1	Kelurahan	Kotawaringin Hilir	13
		2	Kelurahan	Kotawaringin Hulu	13
		3	Desa	Riam Durian	13
		4	Desa	Tempayung	13
		5	Desa	Babual Baboti	13

Untuk menghindari bias maka pemilihan responden adalah responden yang memiliki kedudukan penting dalam masyarakat seperti ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pengurus organisasi kemasyarakatan lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode survey menggunakan alat bantu kuesioner yang mencakup 3 Dimensi indeks pengukuran survei indeks pembangunan masyarakat yang sesuai dengan variabel dan indikator yang telah ditetapkan. Dari 3 dimensi indeks tersebut di turunkan menjadi 33 item atau pertanyaan kuesioner.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Nilai IPEMas dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing dimensi indeks. Dalam penghitungan survei indeks pembangun masyarakat terhadap 3 dimensi indeks yang dikaji, setiap dimensi indeks memiliki penimbang yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Indeks Gotong Royong

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Item}} = \frac{1}{12} = 0,084$$

Indeks Toleransi

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Item}} = \frac{1}{9} = 0,112$$

Indeks Rasa Aman

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Item}} = \frac{1}{12} = 0,084$$

Untuk memperoleh nilai masing-masing dimensi indeks tersebut digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dimensi Indeks} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per item} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total item yang terisi}}$$

3.6 Teknik Analisis Data

Nilai Indeks Variabel dihitung dari nilai rata rata tertimbang pada masing-masing item pertanyaan dengan jenis data berupa data ordinal. Metode penghitungan angka indeks digunakan nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pertanyaan dengan penghitungan rata rata tertimbang. Guna memudahkan interpretasi terhadap penilaian indeks variabel antara 0,25 - 1 maka dilakukan konversi dengan nilai dasar 0,25 yaitu dengan cara Jumlah Nilai Rata-rata Item X 0,25.

Dimensi Indeks = Total Nilai Rata-Rata Terbagi Unsur Item X 0,25

Tabel 3. 3. Kriteria Indeks Pembangunan Masyarakat

No	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kualitas Masyarakat	Kategori Pembangunan Masyarakat
1	1,00 – 1,75	0,25 – 0,43	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	0,44 – 0,62	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	0,63 – 0,81	B	Baik
4	3,26 – 4,00	0,82 – 1	A	Sangat Baik

Sedangkan yang menjadi rumus komposit dalam perhitungan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPEMas) Kabupaten Kotawaringin Barat, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{IPEMas} = \sqrt[3]{(\text{Indeks Toleransi} \times \text{Indeks Gotong royong} \times \text{Indeks Rasa Aman}) \times 100}$$

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.2.1. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

A. Aspek Geografi

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di Provinsi Kalimantan Tengah bagian barat, dengan ibu kota di Pangkalan Bun. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km² atau 6,2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat

Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1. Kotawaringin Lama	1.218	11,32
2. Arut Selatan	2.400	22,31
3. Kumai	2.921	27,15
4. Pangkalan Banteng	1.306	12,14
5. Pangkalan Lada	229	2,13
6. Arut Utara	2.685	24,96
Jumlah	10.759	100,00

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan Peta RTRWK tahun 2003, secara geografis Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada posisi 1°26' - 3°33' Lintang Selatan, dan 111°20'-112°6' Bujur Timur. Namun berdasarkan peta rekomendasi RTRWK tahun 2009 Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada posisi 1°26' - 3°33' Lintang Selatan, 111°13'-112°6' Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara.

B. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 berdasarkan proyeksi adalah sebesar 295.349 jiwa yang terdiri dari 156.549 jiwa penduduk laki-laki dan 138.800 jiwa penduduk perempuan. Apabila dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2016, penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan sebesar 3,01% dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 3,07% dan penduduk perempuan sebesar 2,95%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah sebesar 113.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan Tahun 2015-2017

No.	Kecamatan	Tahun			Laju Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2015-2016	2016-2017
1	Kotawaringin Lama	19.157	19.615	20.069	2,55	2,31
2	Arut Selatan	114.952	118.256	121.566	3,03	2,80
3	Kumai	54.015	55.495	56.974	2,90	2,67
4	Pangkalan Banteng	38.993	40.806	42.673	4,81	4,58
5	Pangkalan Lada	32.494	33.400	34.307	2,95	2,72
6	Arut Utara	18.530	19.142	19.760	3,47	3,23
	Kotawaringin Barat	278.141	286.714	295.349	3,08	3,01

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka, 2018

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 sebesar 28 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di keenam kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Pangkalan Lada dengan kepadatan sebesar 150 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Arut Utara sebesar 7 jiwa/km².

C. Sarana dan Prasarana Kabupaten Kotawaringin Barat

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah guna mendukung kegiatan masyarakatnya. Beberapa sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga, fasilitas kesehatan dan tempat peribadatan yang secara rinci datanya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Jumlah Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017/2018 Berdasarkan Tingkatan

No.	Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah	
		Negeri	Swasta
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	5	122
2.	Sekolah Dasar (SD)	165	24
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	44	16
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	9	4
5.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	10	5
6.	Perguruan Tinggi	-	2
Jumlah Total		233	173

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka 2018

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa jumlah fasilitas pendidikan berdasarkan tingkatan/jenjang sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017/2018 terdapat 233 sekolah negeri dan 173 sekolah swasta. Jumlah sekolah tersebut merupakan sekolah negeri dan sekolah swasta dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT). Sedangkan jumlah fasilitas pendidikan berdasarkan jenis sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017/2018 secara rinci tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Jumlah Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017/2018 Berdasarkan Jenis

No.	Jenis Sekolah	Jumlah
1.	Sekolah Luar Biasa (SLB)	6
2.	Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA)	11
3.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	17
4.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	9
5.	Madrasah Aliyah (MA)	5
Jumlah Total		48

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka 2018

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa jumlah fasilitas pendidikan berdasarkan jenis sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017/2018 terdapat 48 sekolah. Jumlah tersebut merupakan jumlah total dari berbagai jenis sekolah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017/2018. Sementara dibidang olahraga, jumlah prasarana/ fasilitas olahraga di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 secara rinci tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 5 Jumlah Prasarana/ Fasilitas Olahraga di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

No.	Fasilitas Olahraga	Jumlah
1.	Gedung Olahraga	21
2.	Lapangan Sepak Bola	72
3.	Lapangan Tennis	11
4.	Lapangan Bulutangkis	37
5.	Lapangan Basket	2
6.	Lapangan Voli	246
Jumlah Total		389

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka 2018

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa jumlah fasilitas olahraga di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 adalah sebanyak 389 fasilitas olahraga. Jumlah tersebut merupakan jumlah total dari gedung dan lapangan olahraga di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017. Sementara dibidang kesehatan, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 – 2017 secara rinci tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 6 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 – 2017

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah		
		2015	2016	2017
1.	Rumah Sakit	2	2	2
2.	Puskesmas	18	18	18
3.	Posyandu	195	225	-
4.	Klinik/ Balai Kesehatan	25	28	31
5.	Poskesdes	61	61	60
Jumlah Total		301	334	111

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka 2018

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 – 2017 mengalami fluktuasi. Di tahun 2015 jumlah fasilitas kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat sejumlah 301 dan mengalami peningkatan di tahun 2016 menjadi 334 kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 111. Penurunan tersebut disebabkan belum terdatanya jumlah posyandu pada tahun 2017 di Kabupaten Kotawaringin Barat serta adanya penurunan jumlah poskesdes. Sementara dibidang keagamaan, jumlah tempat peribadatan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 secara rinci tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 7 Jumlah Tempat Peribadatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

No.	Tempat Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	242
2.	Musholla	427
3.	Gereja Protestan	113
4.	Gereja Katolik	18
5.	Pura	1
6.	Vihara	1
7.	Lainnya	9
Jumlah Total		811

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka 2018

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa jumlah tempat peribadatan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 adalah sebanyak 811 tempat peribadatan. Jumlah tersebut terdiri atas 242 masjid, 427 musholla, 113 gereja protestan, 18 gereja katolik, 1 pura, 1 vihara, dan 9 tempat peribadatan lainnya.

4.2.2. Gambaran Umum Responden

A. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjadi responden dalam survey Indeks Pembangunan Masyarakat tahun 2019 terdiri dari laki-laki dan perempuan. Berikut adalah data responden survey Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4. 8 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	
		Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	196	49%
2.	Perempuan	204	51%
Jumlah Total		400	100%

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa jumlah total keseluruhan responden dalam survey Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 adalah sebanyak 400 orang dengan responden laki-laki berjumlah 196 orang dan responden perempuan berjumlah 204 orang. Secara persentase, jumlah responden laki-laki dalam survey ini adalah sebesar 49% sedangkan responden perempuan sebesar 51%.

B. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang dijadikan sebagai responden dalam survey Indeks Pembangunan Masyarakat tahun 2019 memiliki Usia yang beragam. Ragam Usia responden tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 5 kelompok Usia yaitu 20 tahun kebawah, 21 – 30 tahun, 31 – 40 tahun, 41 – 50 tahun, 50 tahun keatas. Berikut adalah data

jumlah responden survey Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 berdasarkan kelompok Usia:

Tabel 4. 9 Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Usia

No.	Kelompok Usia	Jumlah Responden	
		Jumlah	Persentase
1.	20 Tahun Kebawah	29	7%
2.	21 – 30 Tahun	109	27%
3.	31 – 40 Tahun	85	21%
4.	41 – 50 Tahun	95	24%
5.	50 Tahun Keatas	82	21%
Jumlah Total		400	100%

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa jumlah keseluruhan responden dalam survey Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 adalah sebanyak 400 responden. Jumlah responden terbanyak yaitu dari kelompok Usia 21 – 30 tahun dengan jumlah responden sebanyak 109 orang sedangkan jumlah responden yang paling sedikit yaitu dari kelompok Usia 20 tahun kebawah dengan jumlah responden sebanyak 29 orang. Secara persentase, jumlah responden dengan kelompok Usia 20 tahun kebawah adalah sebesar 7%, kelompok Usia 21 – 30 tahun sebesar 27%, kelompok Usia 31 – 40 tahun sebesar 21%, kelompok Usia 41 – 50 tahun sebesar 24%, dan kelompok Usia 50 tahun keatas sebesar 21%.

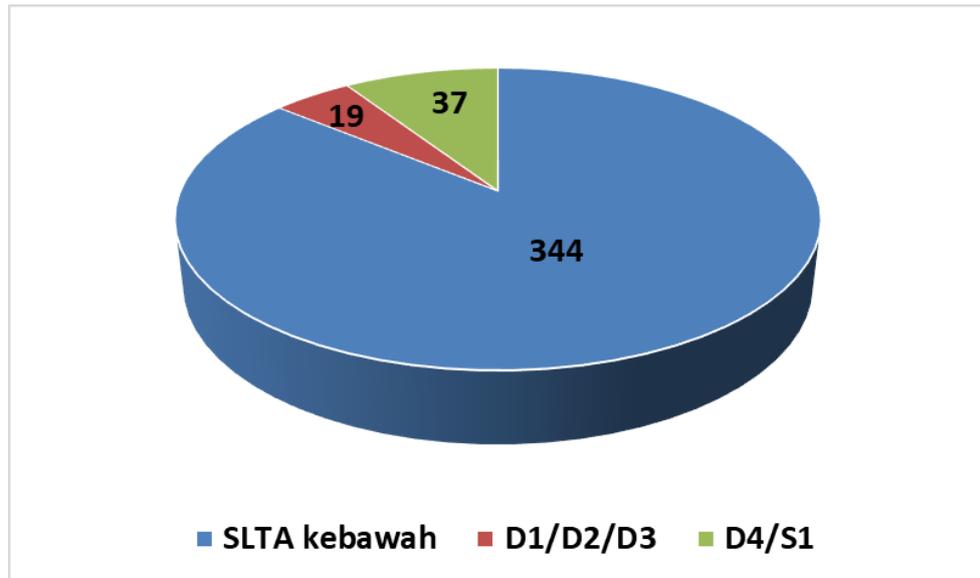
C. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang dijadikan sebagai responden dalam survey Indeks Pembangunan Masyarakat tahun 2019 ini memiliki background pendidikan yang beragam. Beragam background pendidikan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut kemudian digolongkan menjadi 4 tingkatan yaitu SLTA kebawah, D1/D2/D3, D4/S1, dan Pascasarjana (S2/S3). Berikut adalah data jumlah responden survey Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 dari masing-masing tingkatan pendidikan:

Tabel 4. 10 Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	
		Jumlah	Presentasi (%)
1.	SLTA kebawah	344	86%
2.	D1/D2/D3	19	5%
3.	D4/S1	37	9%
TOTAL		400	100%

Sumber: Data primer diolah, 2019



Gambar 4. 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
 Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan data tabel dan grafik diatas terlihat bahwa jumlah keseluruhan responden dalam survey indeks pembangunan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 adalah sebesar 400 responden. Jumlah responden terbanyak yaitu dari jenjang pendidikan SLTA kebawah dengan jumlah responden sebesar 344, sedangkan jumlah responden tersedikit yaitu dari jenjang pendidikan D1/D2/D3 dengan jumlah responden sebanyak 19 orang. Secara persentase, jumlah responden dengan tingkat pendidikan SLTA kebawah adalah sebesar 86%, tingkat D1/D2/D3 sebesar 5%, dan tingkat D4/S1 sebesar 9%.

D. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjadi responden dalam survey Indeks Pembangunan Masyarakat tahun 2019 ini memiliki pekerjaan yang beragam. Ragam jenis pekerjaan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 6 yaitu pelajar/ mahasiswa, wiraswasta, swasta, buruh, pegawai pemerintah, dan lain-lain. Berikut adalah data jumlah responden survey Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 dari masing-masing jenis pekerjaan:

Tabel 4. 11 Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Responden	
		Jumlah	Presentase
1.	Pelajar/ Mahasiswa	18	4%
2.	Wiraswasta	69	17%
3.	Swasta	58	15%
4.	Buruh	77	19%
5.	Pegawai Pemerintah	59	15%

6.	Lain-lain	119	30%
Jumlah Total		400	100%

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa jumlah keseluruhan responden dalam survey Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 adalah sebanyak 400 responden. Jumlah responden terbanyak yaitu dari jenis pekerjaan lain-lain dengan jumlah responden sebanyak 119 orang sedangkan jumlah responden paling sedikit yaitu dari jenis pekerjaan pelajar/ mahasiswa dengan jumlah responden sebanyak 18 orang. Secara persentase, jumlah responden dengan jenis pekerjaan pelajar/ mahasiswa adalah sebesar 4%, wiraswasta sebesar 17%, swasta sebesar 15%, buruh sebesar 19%, pegawai pemerintah sebesar 15%, dan lain-lain sebesar 30%.

4.2 Penyajian Data

4.2.1. Indeks Gotong Rorong

Indeks Gotong Royong merupakan salah satu variabel dalam survei Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) ini. Indeks Gotong Royong terdiri dari 4 indikator yakni kerjasama sosial, jejaring sosial, aksi kolektif serta kepercayaan sosial. Total item dari indeks ini sejumlah 12 item. Berdasarkan hasil perhitungan, Indeks Gotong Royong pada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 yaitu sebesar 0,66. Apabila dilihat pada klasifikasi rentang nilai (dapat dilihat pada tabel di bawah) maka Indeks Gotong Royong sebesar 0,66 tersebut menunjukkan kategori Baik (B) karena berada dalam rentang nilai 0,63-0,81.

Tabel 4. 12 Klasifikasi Rentang Nilai

1,00 – 1,75	0,25 – 0,43	D	Tidak Baik
1,76 – 2,50	0,44 – 0,62	C	Kurang Baik
2,51 – 3,25	0,63 – 0,81	B	Baik
3,26 – 4,00	0,82 – 1	A	Sangat Baik

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Indeks Gotong Royong sebesar 0,66 tersebut terdiri dari nilai indikator kerjasama sosial sebesar 0,72; jejaring sosial sebesar 0,56; aksi kolektif sebesar 0,73 dan kepercayaan sosial sebesar 0,71. Indikator yang memiliki nilai tertinggi diantara keempat indikator tersebut adalah indikator aksi kolektif, sedangkan indikator dengan nilai terendah adalah indikator jejaring sosial. Sejalan dengan nilai indikator tersebut, ketiga indikator tersebut memiliki nilai diatas 0,63 yang menunjukkan kriteria Baik (B) yakni indikator kerjasama sosial, aksi kolektif dan kepercayaan sosial. Sedangkan indikator jejaring sosial yang memiliki nilai terendah (0,56)

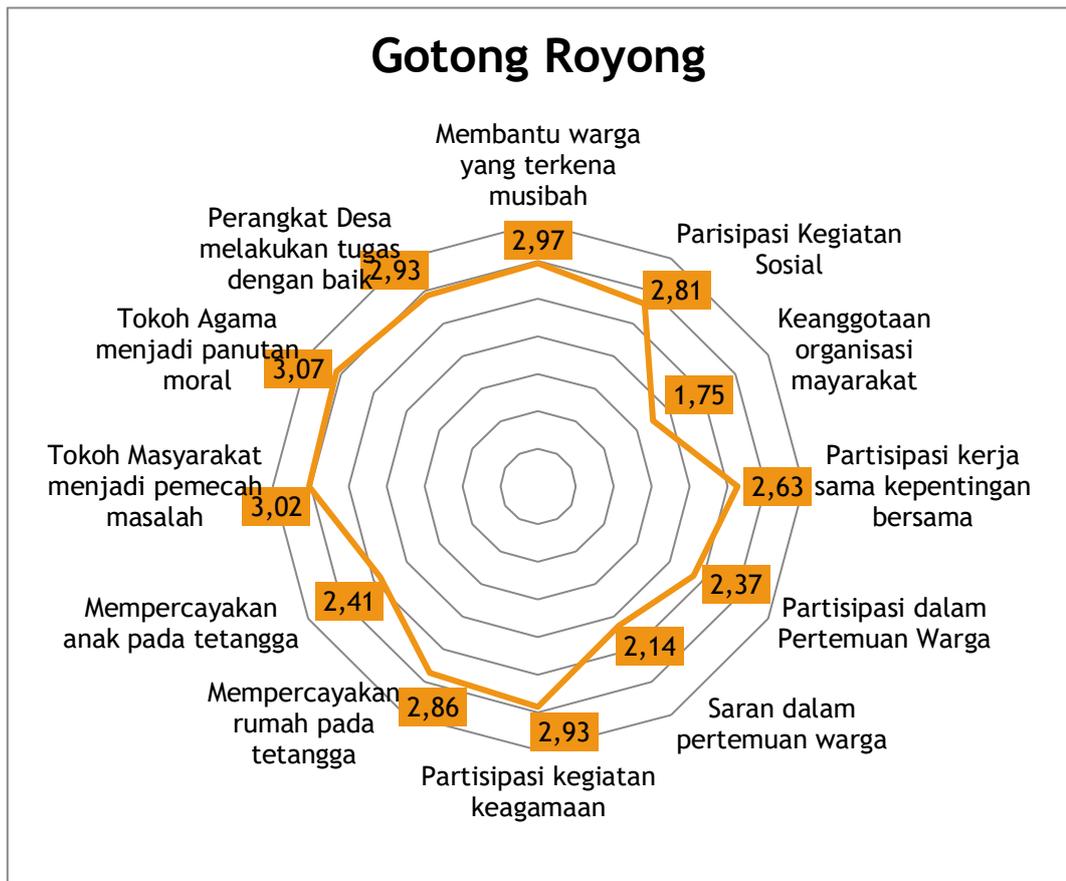
diantara empat indikator dalam Indeks Gotong Royong menunjukkan kriteria Kurang Baik (C). Berikut merupakan Grafik Indikator Indeks Gotong Royong:



Gambar 4. 2 Grafik IPMas Indeks Gotong Royong

Sumber: Data primer diolah, 2019

Indeks Gotong Royong terdiri atas 4 indikator dengan 12 item. Indikator kerjasama sosial terdiri atas 2 item; indikator jejaring sosial terdiri atas 2 item; indikator aksi kolektif terdiri atas 1 item serta indikator kepercayaan sosial terdiri atas 5 item. Apabila dilihat dari keseluruhan 12 item, berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa item dengan capaian indeks gotong royong yang tertinggi ada pada item tokoh agama menjadi panutan moral dengan nilai 3,07. Sedangkan item dengan capaian indeks gotong royong yang terendah ada pada item pernah menjadi anggota kelompok/ organisasi (yang mempunyai kepengurusan) di lingkungan sekitar tempat tinggal (Seperti: arisan, karang taruna, PKK) dengan nilai 1,75. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik radar item indeks gotong royong berikut ini:



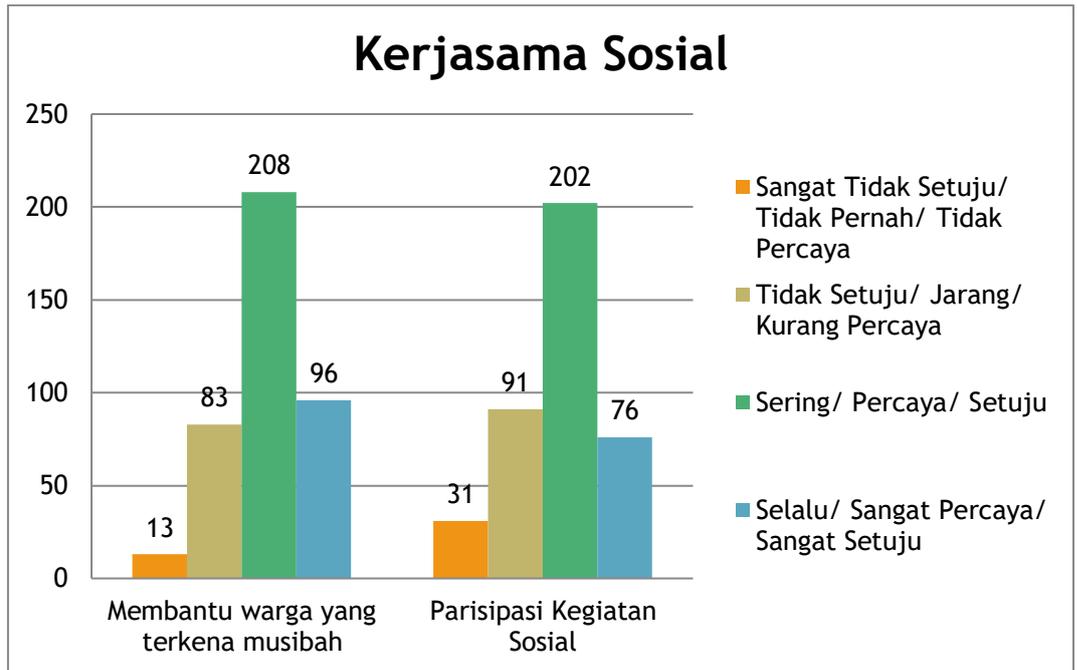
Gambar 4. 3. Radar Item Indeks Gotong Royong

Sumber: Data primer diolah, 2019

Variabel gotong royong terdiri dari 4 indikator yaitu indikator kerjasama sosial, indikator jejaring sosial, indikator aksi kolektif, dan indikator kepercayaan sosial. Penjelasan mengenai keempat indikator tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kerjasama Sosial

Indikator kerjasama sosial merupakan indikator pertama dari variabel gotong royong. Indikator kerjasama sosial ini terdiri dari 2 item yang secara rinci datanya tersaji dalam grafik berikut:



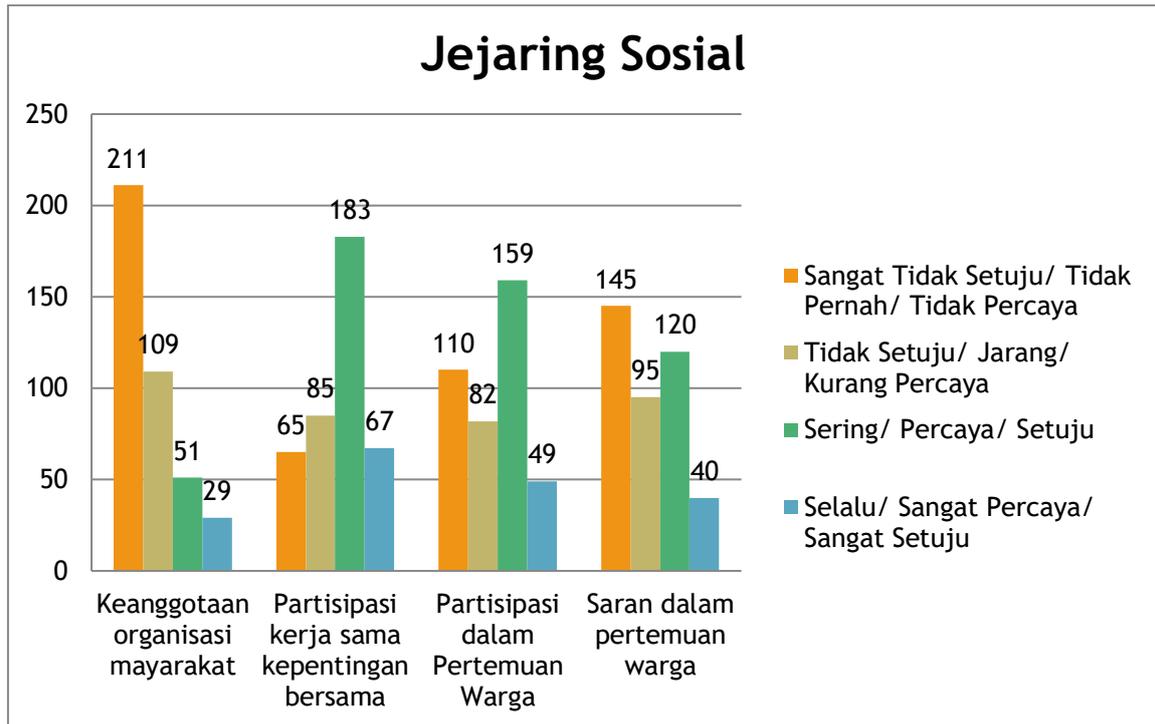
Gambar 4. 4. Indikator Kerja Sama Sosial Berdasarkan Skala Jawaban

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa kedua item dari indikator kerjasama sosial tersebut mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat. Pada item membantu warga yang terkena musibah dari 400 responden sebanyak 208 responden menjawab sering/setuju, 96 responden menjawab selalu/ sangat setuju, sebanyak 83 responden menjawab jarang/ tidak setuju, dan responden yang sangat tidak setuju/ tidak pernah membantu warga yang terkena musibah sebanyak 13 responden. Kemudian pada item partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar dari 400 responden sebanyak 202 menjawab sering/setuju, 76 responden menjawab selalu/ sangat setuju, sebanyak 91 responden menjawab jarang/ tidak setuju, dan responden yang sangat tidak setuju/ tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar sebanyak 31 responden.

2. Indikator jejaring sosial

Indikator jejaring sosial merupakan indikator kedua dari variabel gotong royong. Indikator kerjasama sosial ini terdiri dari 4 item yang secara rinci datanya tersaji dalam grafik berikut:



Gambar 4. 5. Indikator Jejaring Sosial Berdasarkan Skala Jawaban

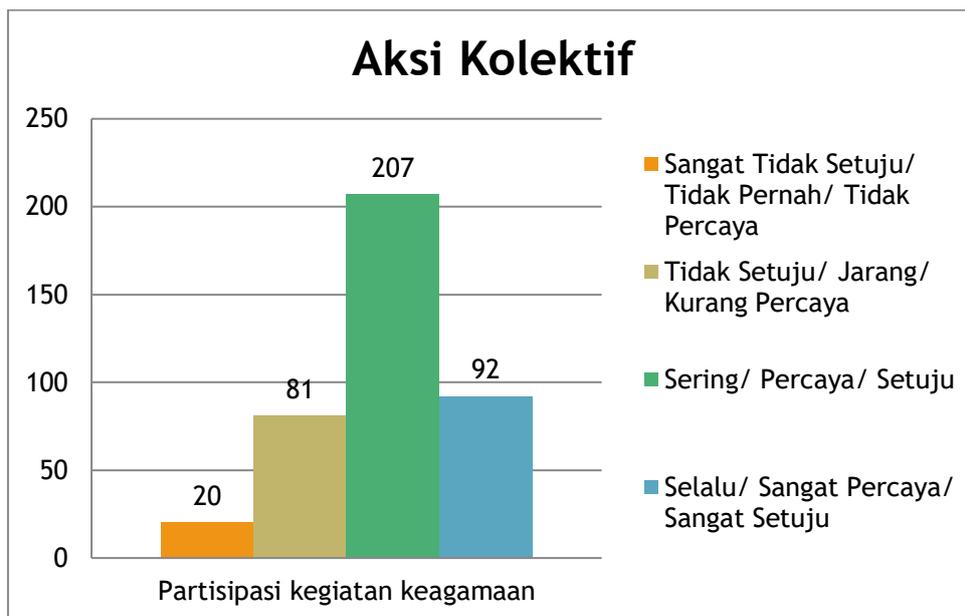
Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa sebagian item dari indikator jejaring sosial tersebut mendapat tanggapan yang kurang positif dari masyarakat. Pada item pernah mengikuti keanggotaan organisasi masyarakat, sebagian besar responden dari 400 responden memberi tanggapan negative, yaitu sebanyak 211 menjawab tidak pernah /sangat tidak setuju, sebanyak 109 responden menjawab jarang/ tidak setuju, sisanya sebanyak 51 responden menjawab sering/setuju, dan hanya 29 responden yang memberi jawaban selalu/sangat setuju. Kemudian pada item partisipasi dalam kerjasama untuk kepentingan bersama, respon dari masyarakat pada 400 responden cukup baik yaitu sebanyak 183 responden menjawab sering/ setuju dan 67 responden menjawab selalu/sangat setuju, sedangkan sebanyak 85 responden menjawab jarang/tidak setuju, dan 65 responden menjawab tidak pernah/sangat tidak setuju. Untuk item ketiga yaitu partisipasi dalam pertemuan/rapat warga mendapatkan respon yang cukupimbang dari masyarakat pada responden yang berjumlah 400 sebanyak 159 responden menjawab sering/setuju, 49 responden menjawab selalu/sangat setuju, kemudian 110 responden menjawab tidak pernah/sangat tidak setuju, dan sisanya 82 responden menjawab tidak pernah/sangat tidak setuju. Sedangkan pada item terakhir yaitu memberikan saran dalam pertemuan/rapat warga juga mendapatkan respon yang cukupimbang dari masyarakat, dari 400 responden 95 responden menjawab

jarang/tidak setuju, 145 responden menjawab tidak pernah/sangat tidak setuju, kemudian 120 responden menjawab sering/setuju, dan 40 responden menjawab selalu/ sangat setuju.

3. Indikator aktif kolektif

Indikator aksi kolektif merupakan indikator ketiga dari variabel gotong royong. Indikator aksi kolektif ini terdiri dari 1 item yang secara rinci datanya tersaji dalam grafik berikut:



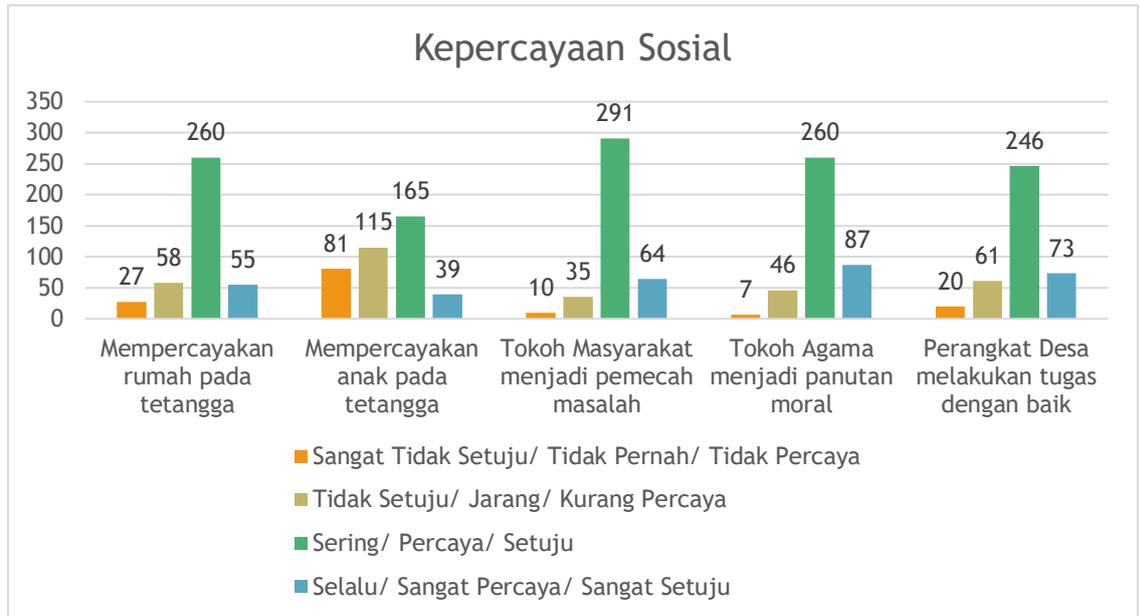
Gambar 4. 6. Indikator Aksi Kolektif Berdasarkan Skala Jawaban

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa item partisipasi dalam kegiatan keagamaan dari indikator aksi kolektif mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat. Lebih dari setengah jumlah responden (400 responden) menjawab sering/ setuju yaitu sebanyak 207 responden diikuti dengan 92 responden menjawab selalu/ sangat setuju, sedangkan sisanya sebanyak 81 responden menjawab jarang/tidak setuju, dan 20 responden menjawab tidak pernah/ sangat tidak setuju.

4. Indikator kepercayaan sosial

Indikator kepercayaan sosial merupakan indikator keempat dari variabel gotong royong. Indikator kepercayaan sosial ini terdiri dari 5 item yang secara rinci datanya tersaji dalam grafik berikut:



Gambar 4. 7. Indikator Kepercayaan Sosial Berdasarkan Skala Jawaban

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas, terlihat bahwa 4 item dari indikator kepercayaan sosial yaitu memperkirakan rumah pada tetangga, tokoh masyarakat menjadi pemecah masalah, tokoh agama menjadi panutan moral, dan perangkat desa melakukan tugas dengan baik mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat, sedangkan 1 item sisanya yaitu memperkirakan anak pada tetangga mendapatkan jumlah jawaban responden yang cukup berimbang antara responden yang setuju dengan responden yang tidak setuju. Pada item pertama yaitu memperkirakan rumah pada tetangga lebih dari setengah jumlah responden (400 responden) yaitu sebanyak 260 responden menjawab sering/ setuju dan 55 responden menjawab selalu/sangat setuju, kemudian 58 responden menjawab jarang/tidak setuju dan 27 responden menjawab tidak pernah/sangat tidak setuju. Item kedua yaitu memperkirakan anak pada tetangga merupakan item yang mendapatkan jawaban berimbang antara jawaban setuju dan tidak setuju, dimana dari 400 responden 165 responden menjawab sering/setuju diikuti 39 responden menjawab selalu/sangat setuju, sedangkan sebanyak 115 responden menjawab jarang/tidak setuju diikuti 81 responden menjawab tidak pernah/sangat tidak setuju. Untuk item ketiga yaitu tokoh masyarakat menjadi pemecah masalah, sebagian besar responden yaitu sebanyak 291 responden menjawab sering/setuju bersama dengan itu 64 responden menjawab selalu/sangat setuju, 35 responden menjawab jarang/tidak setuju, dan sisanya hanya 10 responden yang menjawab tidak pernah/sangat tidak setuju. Tidak jauh dari itu, pada item keempat yaitu tokoh agama menjadi panutan moral, dari 400 responden sebagian besar responden (260

responden) menjawab sering/setuju bersamaan dengan itu 87 responden menjawab selalu/sangat setuju, sedangkan 46 responden menjawab jarang/tidak setuju, dan sisanya hanya 7 responden yang menjawab tidak pernah/sangat tidak setuju. Untuk item terakhir yaitu perangkat desa melakukan tugas dengan baik, dari 400 responden lebih dari setengah responden (246 responden) menjawab sering/setuju, 73 responden menjawab selalu/sangat setuju, 61 responden menjawab jarang/tidak setuju, dan sisanya 20 responden yang menjawab tidak pernah/sangat tidak setuju.

Indeks Gotong Royong merupakan salah satu variabel dari Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) yang menggambarkan hubungan sosial dan wujud partisipasi masyarakat berkaitan dengan kerjasama, jejaring sosial, aksi kolektif dan kepercayaan sosial terhadap lingkungan sekitar. Indikator Kerjasama Sosial pada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digambarkan dari tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan saat ada musibah yang cukup tinggi, sebagian besar responden memberikan jawaban sering dan selalau dalam item tersebut. Indikator jejaring sosial masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat digambarkan dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan masyarakat (rapat, pertemuan, dan kegiatan untuk kepentingan bersama). Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengikuti kegiatan bersama untuk kepentingan warga (seperti kerja bakti, siskamling dan sebagainya) di lingkungan sekitar tempat tinggal dan dalam pertemuan warga adalah sering. Namun hal yang harus menjadi perhatian adalah tingkat keaktifan partisipasi masyarakat dalam bentuk buah pikiran dan pengembangan diri. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan hasil survei menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tidak pernah menjadi anggota kelompok/ organisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal (seperti arisan, karang taruna dan sebagainya), dan tidak pernah memberikan pendapat atau saran ketika rapat. Indikator Aksi Kolektif pada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digambarkan dari tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Aksi kolektif merupakan bentuk kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat berkaitan dengan event tertentu. Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kegiatan keagamaan (seperti pengajian atau perayaan keagamaan) di lingkungan sekitar tempat tinggal dalam kurun waktu satu tahun terakhir adalah sering. Indikator Kepercayaan Sosial masyarakat digambarkan dari kepercayaan terhadap masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perangkat desa. Berdasarkan hasil survei sebagian besar masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat percaya bahwa tokoh agama sebagai panutan, tokoh masyarakat dapat menyelesaikan masalah dan perangkat desa telah menjalankan tugasnya dengan baik. Tingkat kepercayaan masyarakat untuk menitipkan rumah kepada tetangga juga baik tetapi dalam hal menitipkan anak kepada

tetangga masih kurang baik. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan sebagai bentuk kehati-hatian (antisipasi) masyarakat.

Berdasarkan hasil survei indeks Gotong Royong menunjukkan bahwa secara garis besar tingkat partisipasi sosial masyarakat dalam bidang sosial, kemasyarakatan, kegiatan bersama untuk kepentingan warga dan keagamaan serta tingkat kepercayaan sosial sudah baik. Sejalan dengan teori dari Huraerah (2008: 103) bahwa salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah partisipasi sosial, yakni partisipasi yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan) dan sebagainya. Kepercayaan sosial merupakan salah satu bentuk gotong royong masyarakat dalam poin dasar dalam untuk mendukung proses pembangunan masyarakat. Kepercayaan sosial berkaitan dengan bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberian tanggapan. Berdasarkan pemaparan dari Huraerah (2008:103), partisipasi dalam bentuk memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi baik dengan maksud menerima, mentaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan dalam arti menerima maupun menolak pendapat dengan syarat. Meskipun hanya dengan bentuk mengiyakan itu merupakan partisipasi yang harus dihargai. Namun hal yang harus menjadi perhatian adalah partisipasi masyarakat dalam pertemuan, tingkat keaktifan partisipasi masyarakat dalam bentuk buah pikiran dan pengembangan diri. Hal tersebut merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan masyarakat. Berdasarkan teori yang dipaparkan oleh Huraerah (2008: 103) salah satu bentuk partisipasi adalah partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat. Kehadiran seseorang dalam pertemuan akan mempengaruhi bagi masyarakat yang lain agar dapat ikut serta dalam memberikan sumbangsih pemikiran. Huraerah juga menyebutkan partisipasi ketrampilan dan kemahiran yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri (pengalaman dalam organisasi).

4.2.2. Indeks Toleransi

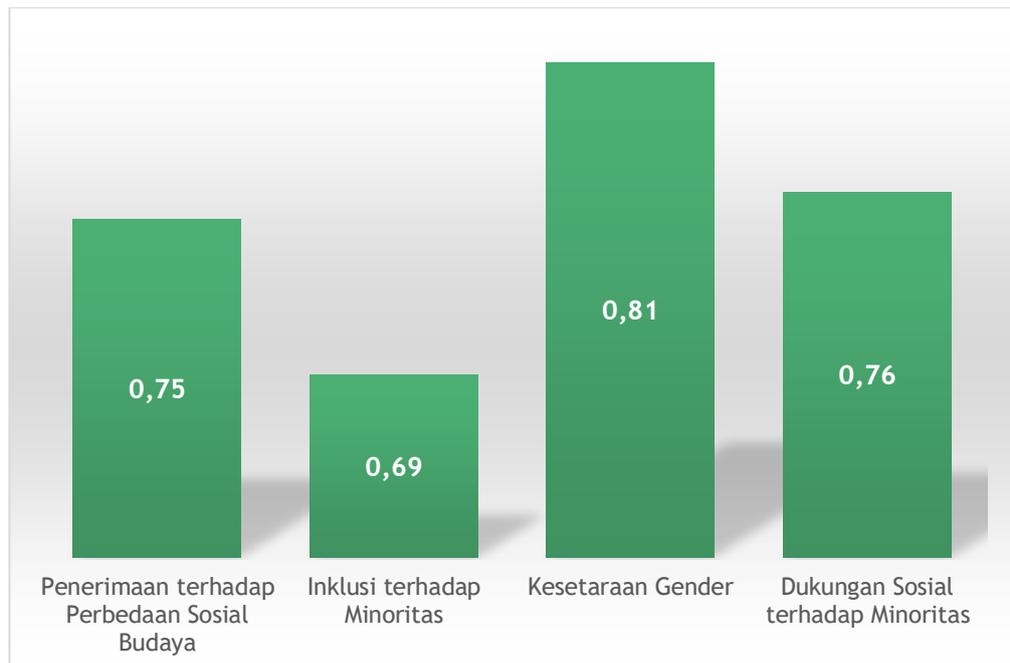
Indeks toleransi merupakan salah satu variabel dalam survey Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas). Indeks toleransi terdiri dari 4 indikator yaitu penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya, inklusi terhadap minoritas, kesetaraan gender, dan dukungan sosial pada minoritas. Total item dari indeks toleransi ini sejumlah 9 item. Berdasarkan hasil perhitungan indeks toleransi pada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 sebesar 0,77. Apabila dilihat pada klasifikasi rentang nilai (dapat dilihat pada tabel) maka indeks toleransi sebesar 0,77 tersebut termasuk dalam kategori Baik (B).

Tabel 4. 13 Klasifikasi Rentang Nilai

1,00 – 1,75	0,25 – 0,43	D	Tidak Baik
1,76 – 2,50	0,44 – 0,62	C	Kurang Baik
2,51 – 3,25	0,63 – 0,81	B	Baik
3,26 – 4,00	0,82 – 1	A	Sangat Baik

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai indeks toleransi sebesar 0,77 yang berada pada kategori Baik (B) tersebut juga dipengaruhi oleh indikator-indikator dan item-item pembentuk variabel toleransi. Pada indikator penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya memiliki nilai sebesar 0,75; inklusi terhadap minoritas sebesar 0,69; kesetaraan gender sebesar 0,81; dan dukungan sosial pada minoritas sebesar 0,76. Sejalan dengan nilai tersebut, maka keseluruhan dari indikator pada indeks toleransi yaitu kesetaraan gender, penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya, dukungan sosial pada minoritas, dan inklusi terhadap minoritas termasuk dalam kategori baik (B) karena berada dalam rentan nilai 0,63-081. Berikut merupakan grafik IPMas Indeks Toleransi:

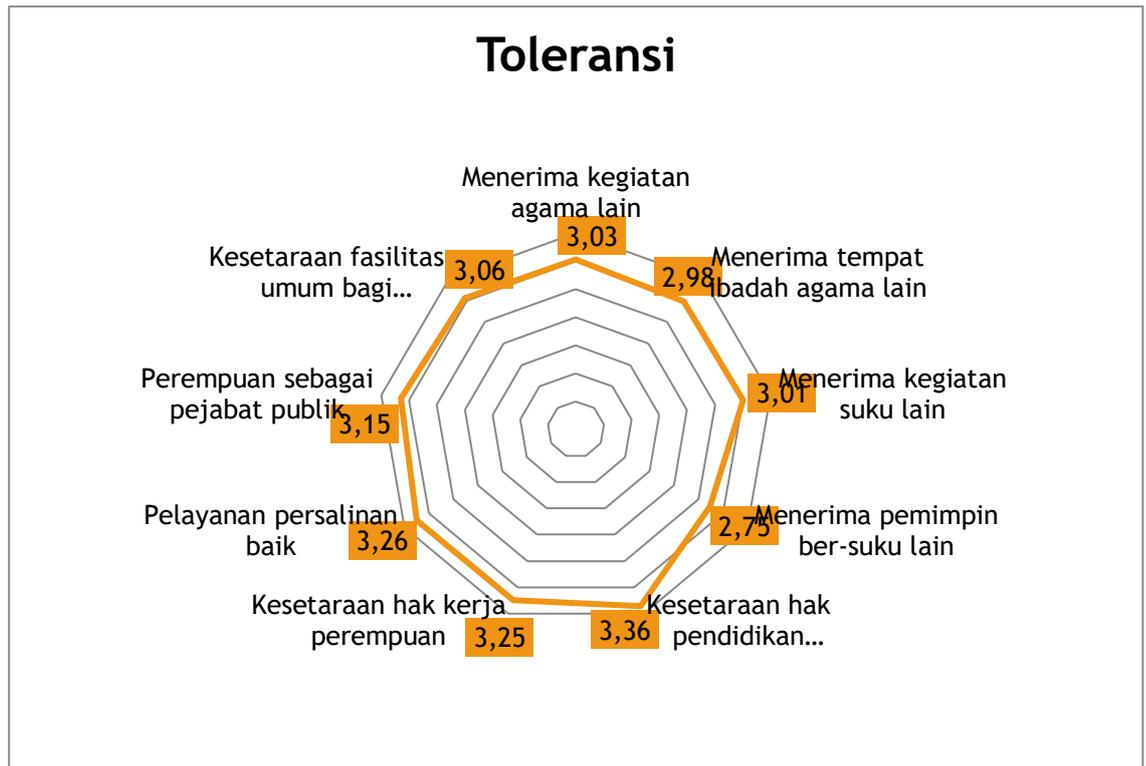


Gambar 4. 8 Grafik Indeks Toleransi

Sumber: Data primer diolah, 2019

Indeks Toleransi terdiri atas 4 indikator dengan 9 item. Indikator Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial Budaya terdiri atas 3 item; Inklusi terhadap Minoritas terdiri atas 1 item; Kesetaraan Gender terdiri atas 4 item serta Dukungan Sosial kepada Minoritas terdiri atas 1 item. Secara keseluruhan, indeks toleransi memiliki 4 indikator dan 9 item

dan ketika dilihat berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa item dengan capaian indeks toleransi yang tertinggi ada pada item kesetaraan hak pendidikan perempuan di lingkungan sekitar (perempuan diperbolehkan untuk menempuh pendidikan formal sampai tingkat SMA/ perguruan tinggi) dengan nilai 3,36. Sedangkan item dengan capaian indeks toleransi yang terendah ada pada item menerima pemimpin ber-suku lain di lingkungan sekitar tempat tinggal dengan nilai 2,75. Kemudian secara rinci data nilai pada item-item dalam indeks toleransi tersaji dalam grafik radar item berikut:



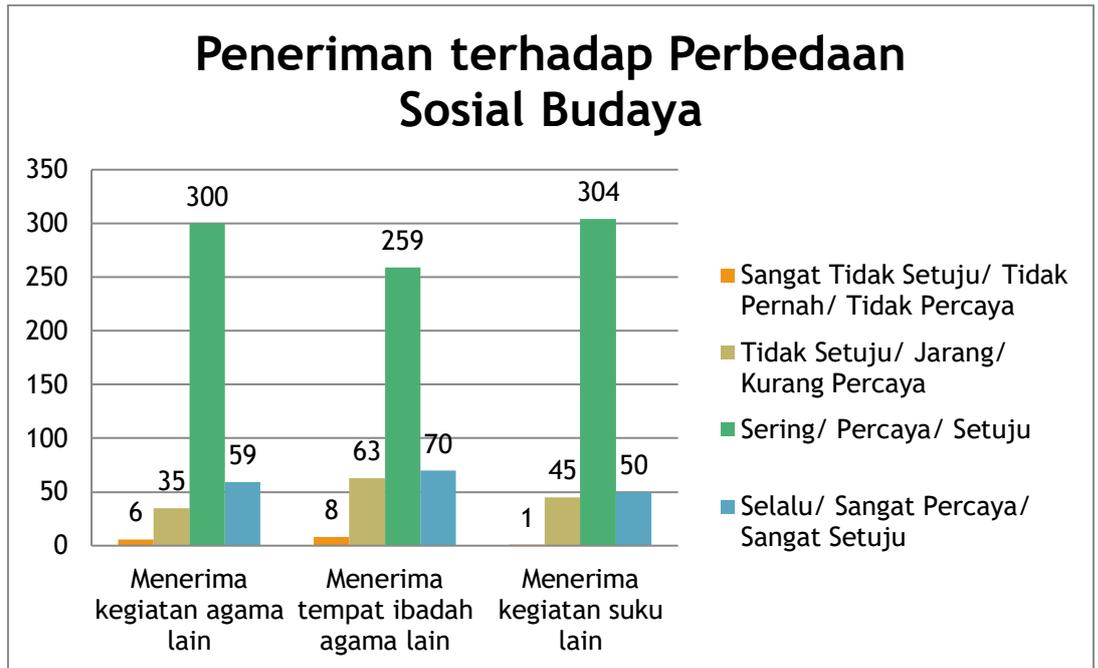
Gambar 4. 9 Radar Item Indeks Toleransi

Sumber: Data primer diolah, 2019

Variabel toleransi terdiri dari 4 indikator yaitu indikator penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya, indikator inklusi terhadap minoritas, indikator kesetaraan gender, dan indikator dukungan sosial pada minoritas. Penjelasan mengenai keempat indikator tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Indikator penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya

Indikator penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya merupakan indikator pertama dari variabel toleransi. Indikator penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya ini terdiri dari 3 item yang secara rinci datanya tersaji dalam grafik berikut:



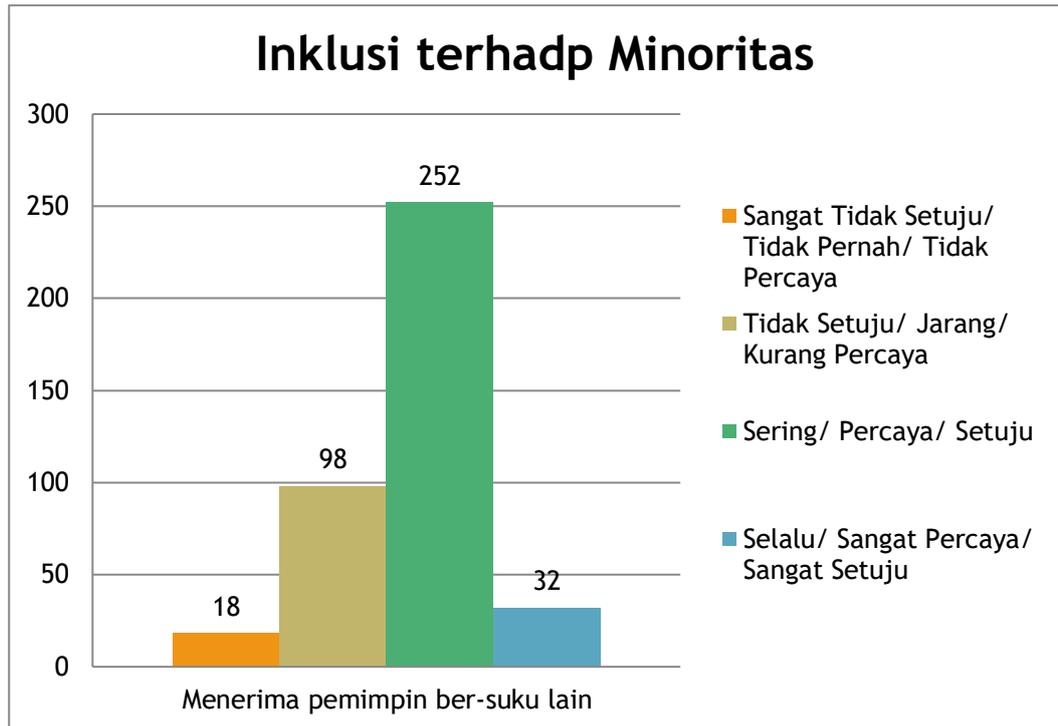
Gambar 4. 10 Indikator Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial Budaya Berdasarkan Skala Jawaban

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas maka dapat dilihat bahwa keseluruhan dari ketiga item dalam indikator penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat. Pertama pada item menerima kegiatan agama lain, dari 400 responden sebagian besar responden (300) menjawab sering/setuju, 59 responden menjawab selalu/sangat setuju, 35 responden menjawab jarang/tidak setuju, dan hanya 6 responden menjawab tidak pernah/sangat tidak setuju. Kemudian pada item kedua yaitu menerima tempat ibadah agama lain mendapat jawaban setuju sebanyak 259 responden, jawaban sangat setuju sebanyak 70 responden, tidak setuju sebanyak 63 responden dan hanya 8 responden menjawab sangat tidak setuju. Selanjutnya pada item menerima kegiatan suku lain sebagian besar dari 400 responden menjawab setuju yaitu sebanyak 304 responden, kemudian 50 responden menjawab sangat setuju, sedangkan 45 responden dan hanya 1 responden sisanya menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.

2. Indikator inklusi terhadap minoritas

Indikator inklusi terhadap minoritas merupakan indikator kedua dari variabel toleransi. Indikator inklusi terhadap minoritas ini terdiri dari 1 item yang secara rinci datanya tersaji dalam grafik berikut:



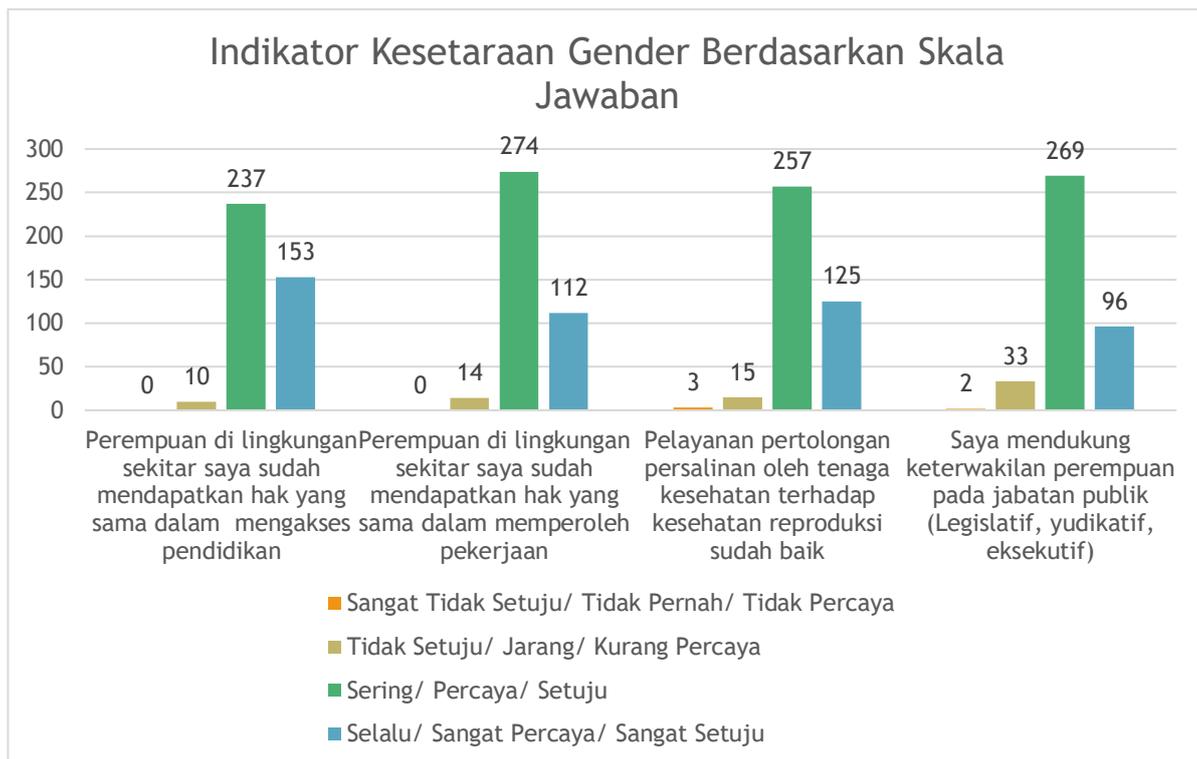
Gambar 4. 11 Indikator Inklusi terhadap Minoritas Berdasarkan Skala Jawaban

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik tersebut, dapat terlihat bahwa meskipun menjadi item yang memiliki nilai terendah diantara ke 8 item lainnya dalam indeks toleransi item menerima pemimpin ber-suku lain dalam indikator inklusi terhadap minoritas mendapatkan jawaban yang cukup baik dari masyarakat. Dari grafik di atas sebagian besar dari 400 responden yaitu sebanyak 252 responden yang menjawab setuju dan 32 responden menjawab sangat setuju, sedangkan bagian lainnya yaitu sebanyak 98 responden menjawab tidak setuju dan 18 responden menjawab sangat tidak setuju.

3. Indikator kesetaraan gender

Indikator kesetaraan gender merupakan indikator ketiga dari variabel toleransi. Indikator kesetaraan gender ini terdiri dari 4 item yang secara rinci datanya tersaji dalam grafik berikut:



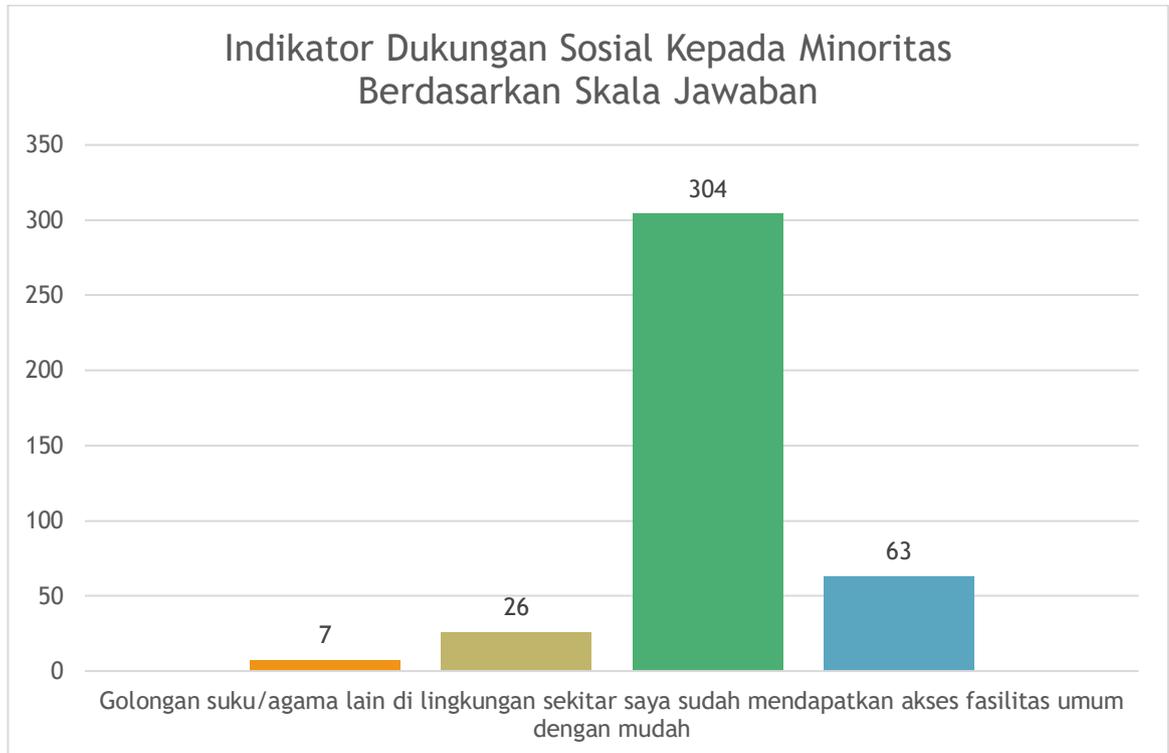
Gambar 4. 12 Indikator Kesetaraan Gender Berdasarkan Skala Jawaban

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa secara keseluruhan item dari indikator kesetaraan gender mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat. Untuk item perempuan di lingkungan sekitar saya sudah mendapatkan hak yang sama dalam mengakses pendidikan sebanyak 237 responden menjawab setuju, dan sebanyak 153 responden menjawab sangat setuju, sedangkan sebanyak 10 responden menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Untuk item perempuan di lingkungan sekitar saya sudah mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan sebanyak 274 responden menjawab setuju, dan sebanyak 112 responden menjawab sangat setuju, sedangkan sebanyak 14 responden menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Untuk item pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terhadap kesehatan reproduksi sudah baik sebanyak 257 responden menjawab setuju, dan sebanyak 125 responden menjawab sangat setuju, sedangkan sebanyak 15 responden menjawab tidak setuju, dan sebanyak 3 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk item saya mendukung keterwakilan perempuan pada jabatan publik (legislatif, yudikatif, eksekutif) sebanyak 269 responden menjawab setuju, dan sebanyak 96 responden menjawab sangat setuju, sedangkan sebanyak 33 responden menjawab tidak setuju, dan sebanyak 2 responden menjawab sangat tidak setuju.

4. Indikator dukungan sosial terhadap minoritas

Indikator dukungan sosial terhadap minoritas merupakan indikator keempat dari variabel toleransi. Indikator dukungan sosial terhadap minoritas ini terdiri dari 1 item yang secara rinci tersaji dalam grafik berikut:



Gambar 4. 13 Indikator Dukungan Sosial Kepada Minoritas Berdasarkan Skala Jawaban

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa item dari indikator dukungan sosial kepada minoritas mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Salah satunya item dari indikator dukungan sosial kepada minoritas yaitu golongan suku/agama lain di lingkungan sekitar saya sudah mendapatkan akses fasilitas umum dengan mudah. Item tersebut sebanyak 304 respondennya menjawab setuju, dan sebanyak 63 respondennya menjawab sangat setuju, sedangkan sebanyak 26 respondennya menjawab tidak setuju, dan sebanyak 7 respondennya menjawab sangat tidak setuju.

Pada dasarnya konsep toleransi erat hubungannya dengan sikap terhadap segala sesuatu yang berbeda. Sikap yang dimaksudkan adalah sikap untuk menghormati, menghargai, bertenggang rasa, dan memberi kesempatan terhadap keberadaan segala sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam diri kita. Indeks Toleransi merupakan

salah satu variabel dari Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) yang menggambarkan respon dan bentuk sikap masyarakat terhadap adanya perbedaan sosial budaya (suku, agama, budaya, gender) dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Indikator Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial Budaya pada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digambarkan dari tanggapan apabila agama dan suku lain melakukan kegiatan di lingkungan sekitar dan jika dibangun tempat ibadah agama lain. Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan tanggapan setuju apabila suku dan agama lain melakukan kegiatan di lingkungan sekitar. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat juga memberikan tanggapan setuju apabila dibangun tempat ibadah agama lain. Indikator Inklusi terhadap Minoritas masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digambarkan dari tanggapan apabila ada lingkungan di sekitar yang dipimpin oleh suku lain. Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan jawaban setuju apabila suku lain menjadi pemimpin di lingkungan sekitar. Namun jumlah masyarakat yang memberikan jawaban tidak setuju juga cukup banyak apabila dibandingkan dengan pilihan sangat setuju dan sangat tidak setuju. Indikator Kesetaraan Gender masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digambarkan dari hak perempuan dalam jabatan publik, mendapatkan pelayanan kesehatan, pekerjaan serta pendidikan. Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan jawaban setuju bahwa perempuan telah mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan dan pekerjaan. Masyarakat juga memberikan jawaban setuju bahwa terdapat keterwakilan perempuan pada jabatan publik (legislatif, yudikatif, eksekutif) meskipun nilainya terendah dibandingkan tiga item lainnya namun masih termasuk kriteria Baik. Hal itu kemungkinan dikarenakan kurangnya informasi atau data yang dimiliki oleh masyarakat berkaitan dengan hal tersebut. Indikator Dukungan Sosial kepada Minoritas masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digambarkan dari tanggapan mengenai aksesibilitas suku atau agama lain terhadap fasilitas umum. Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan jawaban setuju bahwa masyarakat suku atau agama lain dapat mengakses fasilitas umum dengan mudah. Masyarakat berpendapat bahwa tidak terdapat hambatan aksesibilitas suku atau agama lain terhadap fasilitas umum.

Berdasarkan hasil survei indeks Toleransi menunjukkan bahwa secara garis besar tingkat Penerimaan atas Perbedaan Sosial Budaya, Dukungan Sosial kepada Minoritas dan Kesetaraan Gender pada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sudah baik. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya ketidaksetujuan terhadap aktivitas dan perbedaan perlakuan terhadap suku/agama lain serta perbedaan gender. Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki toleransi apabila suku dan agama lain melakukan kegiatan dan dibangun tempat ibadah agama lain di lingkungan sekitar. Bentuk toleransi dalam hal

dukungan sosial kepada minoritas masyarakat juga digambarkan dari tidak adanya hambatan bagi suku atau agama lain dalam aksesibilitas fasilitas umum. Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat juga menyatakan bahwa tidak ada ketidakadilan pemberian hak bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan serta keterwakilan dalam jabatan publik. Hal tersebut sejalan dengan pemaparan dari Casram (2016:189) bahwa konsep toleransi berkaitan dengan konsep multikulturalisme. Masyarakat multikultural dapat dimaknai sebagai suatu tatanan masyarakat yang memiliki karakteristik heterogen, dimana pola hubungan antar individu dalam masyarakat bersifat toleran dan bersedia menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai satu sama lain dengan segala perbedaan yang ada. Terdapat tiga unsur dalam multikulturalisme yakni, (1) terkait dengan kebudayaan, (2) merujuk kepada pluralitas (keragaman) kebudayaan, dan (3) cara tertentu untuk menanggapi pluralitas tersebut. Karakter interaksi antar kebudayaan dalam masyarakat multikultural adalah terjadinya asimilasi kebudayaan. Orang-orang yang hidup dalam masyarakat multikultural berasimilasi mengenai bagaimana keberagaman yang baik dalam masyarakat yang heterogen. Hal tersebut kemudian menciptakan rasa toleransi dan kerjasama antar sesama.

4.2.3. Indeks Rasa Aman

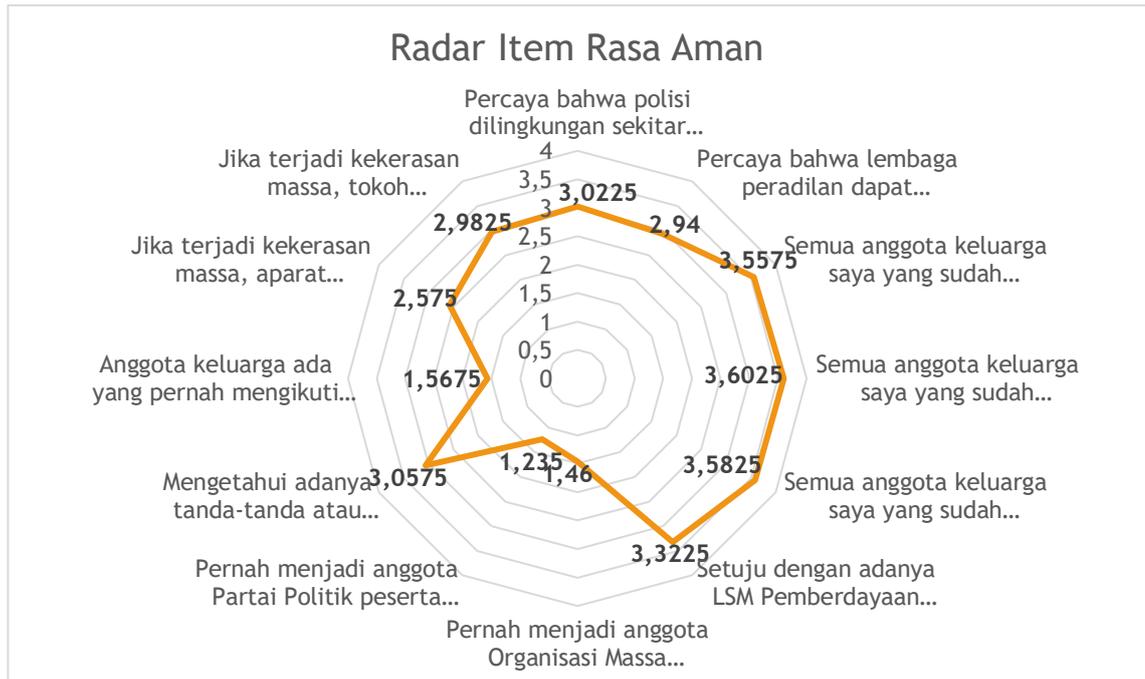
Indeks rasa aman merupakan salah satu variabel dalam survey Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas). Total item dari indeks rasa aman ini adalah sejumlah 12 item. Berdasarkan hasil perhitungan indeks rasa aman pada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 sebesar 0,68. Apabila dilihat pada klasifikasi rentang nilai (dapat dilihat pada tabel) maka indeks rasa aman sebesar 0,68 tersebut termasuk dalam kategori Baik (B).

Tabel 4. 14 Klasifikasi Rentang Nilai

1,00 – 1,75	0,25 – 0,43	D	Tidak Baik
1,76 – 2,50	0,44 – 0,62	C	Kurang Baik
2,51 – 3,25	0,63 – 0,81	B	Baik
3,26 – 4,00	0,82 – 1	A	Sangat Baik

Sumber: Data primer diolah, 2019

Nilai indeks rasa aman sebesar 0,68 yang berada pada kategori Baik (B) tersebut juga dipengaruhi oleh indikator-indikator dan item-item pembentuk variabel rasa aman. Secara rinci data tersebut tersaji dalam grafik radar item indeks rasa aman berikut:



Gambar 4. 14 Radar Item Indeks Rasa Aman

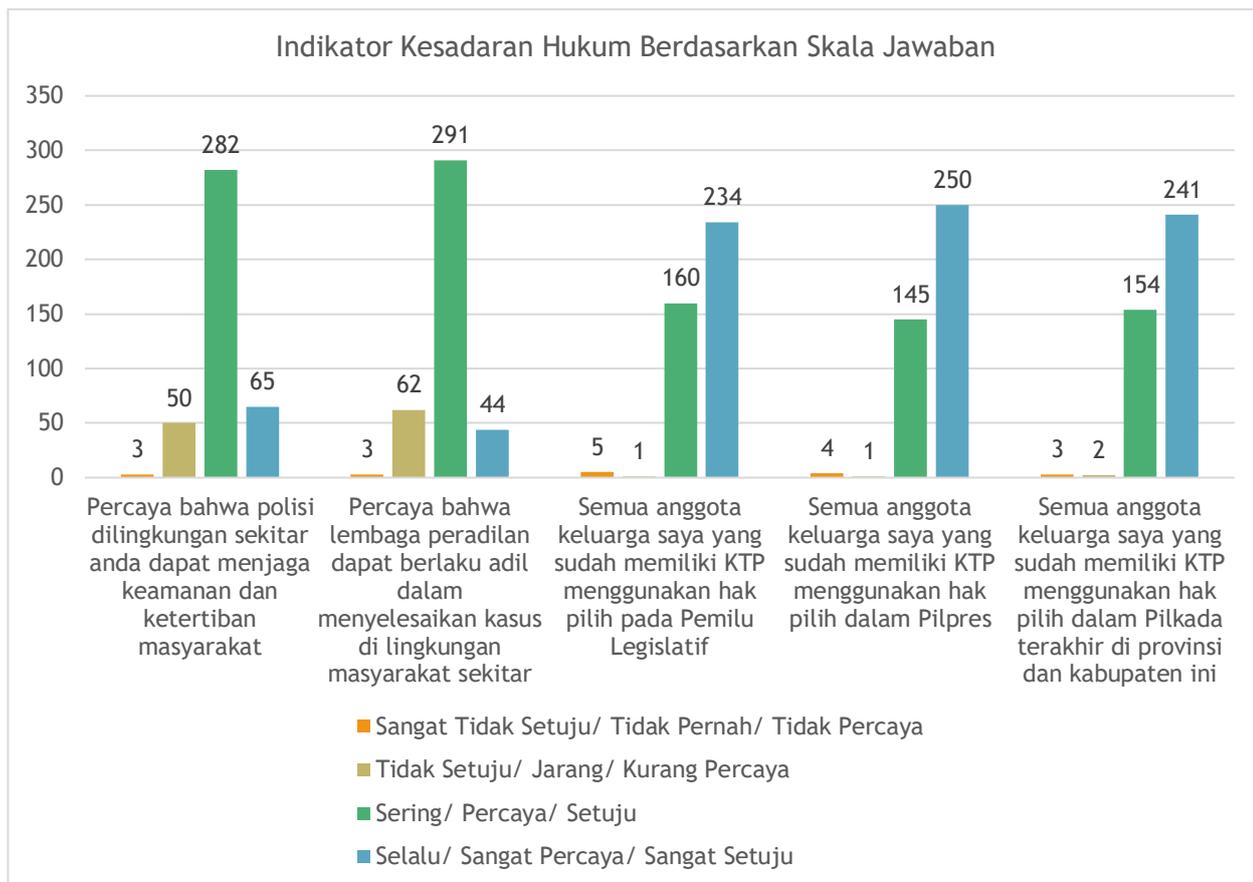
Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa item dengan capaian indeks rasa aman yang tertinggi ada pada item semua anggota keluarga yang sudah memiliki KTP menggunakan hak pilih dalam Pilpres dengan nilai 3,6025. Sedangkan item dengan capaian indeks rasa aman yang terendah ada pada item pernah menjadi anggota partai politik peserta pemilu dengan nilai 1,234.

Variabel rasa aman terdiri dari 4 indikator yaitu kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi risiko sosial, dan penyelesaian sengketa secara beradab. Penjelasan mengenai keempat indikator tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kesadaran Hukum

Indikator kesadaran hukum merupakan indikator pertama dari variabel rasa aman. Indikator kesadaran hukum ini terdiri dari 5 item yang secara rinci datanya tersaji dalam grafik berikut:



Gambar 4. 15 Indikator Kesadaran Hukum Berdasarkan Skala Jawaban

Sumber: Data primer diolah, 2019

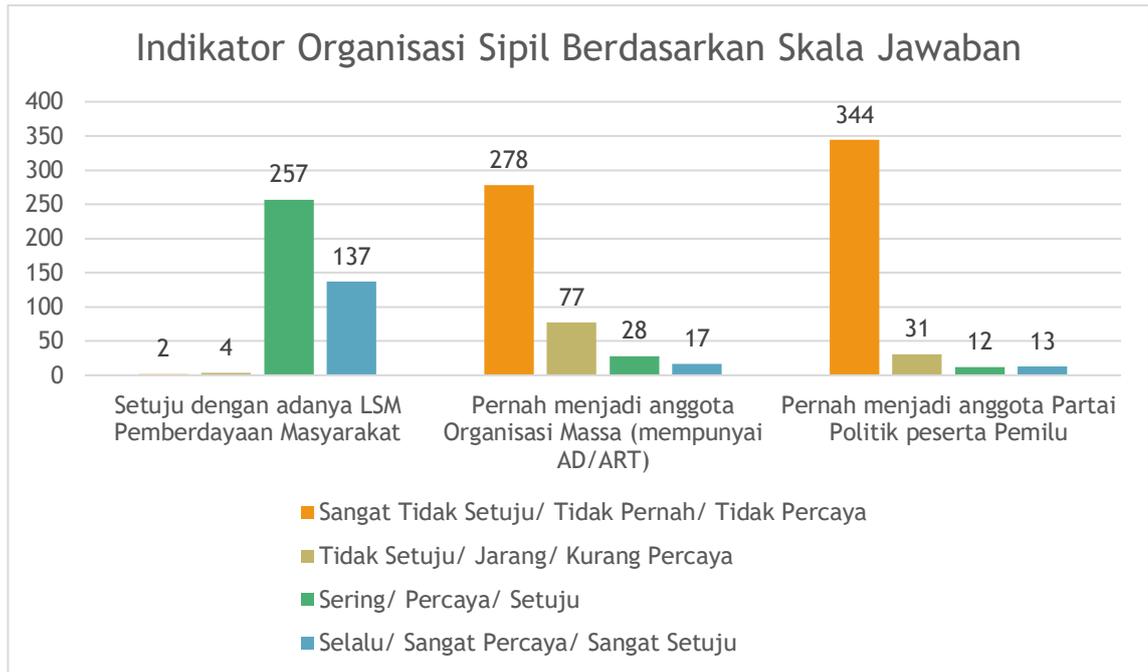
Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa dari semua item indikator kesadaran hukum memperoleh jawaban positif dari sebagian besar responden. Item percaya bahwa polisi dilingkungan sekitar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebanyak 282 responden menjawab percaya, dan sebanyak 65 responden menjawab sangat percaya, sedangkan sebanyak 50 responden menjawab kurang percaya, dan sebanyak 3 responden menjawab tidak percaya. Untuk item percaya bahwa lembaga peradilan dapat berlaku adil dalam penyelesaian kasus dilingkungan masyarakat sekitar sebanyak 291 responden menjawab percaya, dan sebanyak 44 responden menjawab sangat percaya, sedangkan sebanyak 62 responden menjawab kurang percaya, dan sebanyak 3 responden menjawab tidak percaya.

Untuk item semua anggota keluarga saya yang sudah memiliki KTP menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif sebanyak 234 responden menjawab semua anggota keluarganya yang telah memiliki KTP telah menggunakan hak pilih di pemilu legislatif dan sebanyak 160 responden menjawab sebagian anggota keluarganya yang sudah memiliki KTP yang telah menggunakan hak pilih dalam

pemilu legislatif, sedangkan sebanyak 1 orang responden menjawab hanya dirinya yang menggunakan hak pilih dalam pemilu legislatif, dan sebanyak 5 responden menjawab tidak ada dari anggota keluarganya yang menggunakan hak pilih dalam pemilu legislatif. Untuk item semua anggota keluarga saya yang sudah memiliki KTP menggunakan hak pilih dalam pilpres sebanyak 250 responden menjawab semua anggota keluarga yang sudah memiliki KTP menggunakan hak pilih dalam pilpres, dan sebanyak 145 responden menjawab hanya sebagian dari anggota keluarganya yang sudah memiliki KTP telah menggunakan hak pilih dalam pilpres, sedangkan sebanyak 1 responden menjawab hanya dirinya yang telah menggunakan hak pilih dalam pilpres, dan sebanyak 4 responden menjawab tidak ada dari anggota keluarganya yang menggunakan hak pilih dalam pilpres. Untuk item semua anggota keluarga yang memiliki KTP menggunakan hak pilih dalam pilkada terakhir di provinsi dan kabupaten ini sebanyak 241 responden menjawab semua anggota keluarganya yang sudah memiliki KTP telah menggunakan hak pilih dalam pilkada terakhir di provinsi dan kabupaten ini, dan sebanyak 154 responden menjawab sebagian anggota keluarganya yang sudah memiliki KTP telah menggunakan hak pilih dalam pilkada terakhir di provinsi dan kabupaten ini, sedangkan sebanyak 2 responden menjawab hanya dirinya yang menggunakan hak pilih dalam pilkada terakhir provinsi dan kabupaten ini, dan sebanyak 3 responden menjawab tidak ada dari anggota keluarganya yang menggunakan hak pilih dalam pilkada terakhir provinsi dan kabupaten ini.

2. Indikator Organisasi Sipil

Indikator organisasi sipil merupakan indikator kedua dari variabel rasa aman. Indikator organisasi sipil memiliki 3 item yang secara rinci tersaji dalam grafik berikut:



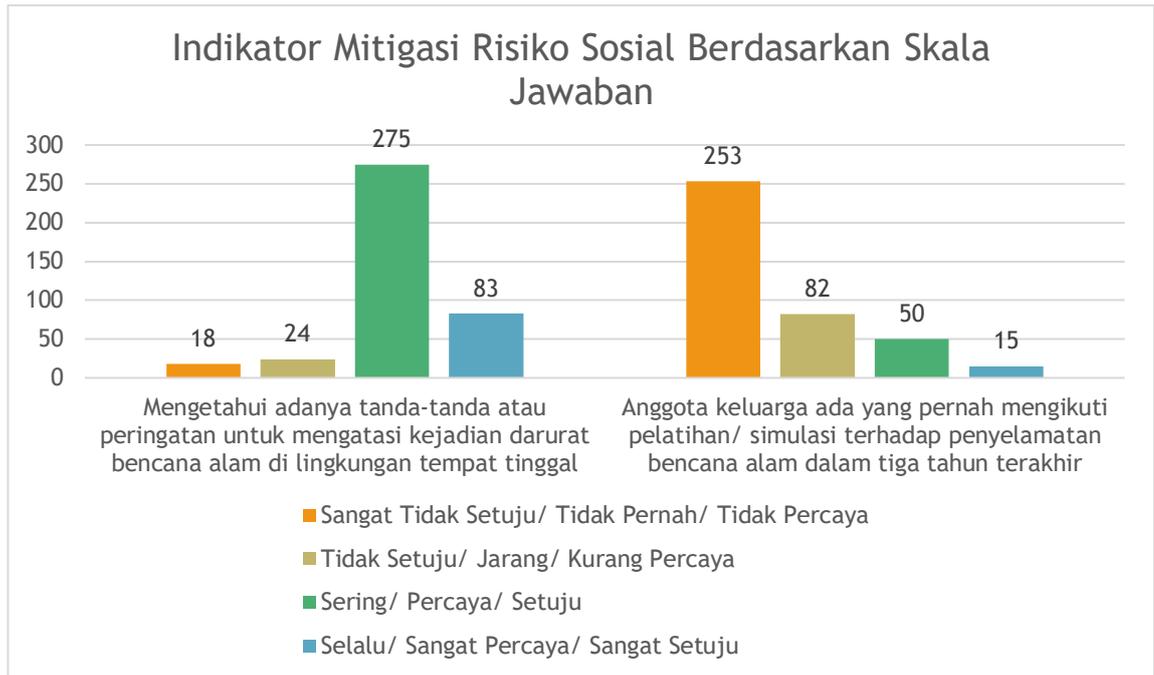
Gambar 4. 16 Indikator Organisasi Sipil Berdasarkan Skala Jawaban

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa 2 dari 3 item indikator organisasi sipil mendapat jawaban negatif dari sebagian besar responden. Item setuju dengan adanya LSM Pemberdayaan Masyarakat sebesar 257 responden menjawab setuju, dan sebanyak 137 responden menjawab sangat setuju, sedangkan sebanyak 4 responden menjawab tidak setuju, dan sebanyak 2 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk item pernah menjadi anggota Organisasi Massa (mempunyai AD/ART) sebanyak 278 responden menjawab tidak pernah, sebanyak 77 responden hanya ikut 1 organisasi, sebanyak 28 responden menjawab mengikuti 2 organisasi, dan sebanyak 17 responden menjawab mengikuti lebih dari 2 organisasi. Untuk item pernah menjadi anggota Partai Politik peserta Pemilu sebanyak 344 responden menjawab tidak pernah, sebanyak 31 responden menjawab 1 kali, sebanyak 12 responden menjawab 2 kali, dan sebanyak 13 responden menjawab lebih dari 2 kali.

3. Indikator Mitigasi Risiko Sosial

Indikator mitigasi risiko sosial merupakan indikator ketiga dari variabel rasa aman. Indikator mitigasi risiko sosial memiliki 2 item yang secara rinci datanya tersaji dalam grafik berikut:



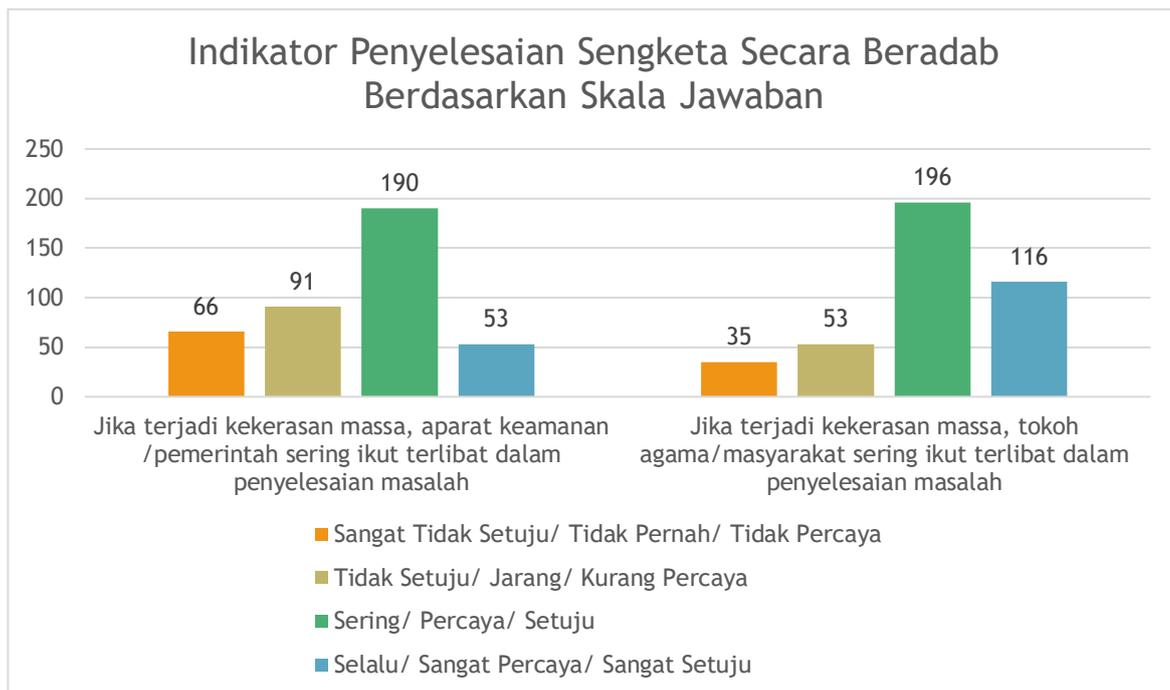
Gambar 4. 17 Indikator Mitigasi Risiko Sosial Berdasarkan Skala Jawaban

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa item mengetahui adanya tanda-tanda atau peringatan untuk mengatasi kejadian darurat bencana alam di lingkungan tempat tinggal sebanyak 275 responden menjawab setuju, dan sebanyak 83 responden menjawab sangat setuju, sedangkan sebanyak 24 responden menjawab tidak setuju, dan sebanyak 18 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk item anggota keluarga ada yang pernah mengikuti pelatihan/ simulasi terhadap penyelamatan bencana alam dalam tiga tahun terakhir sebanyak 253 responden menjawab tidak pernah, sebanyak 82 responden menjawab jarang, sebanyak 50 responden menjawab sering, dan sebanyak 15 responden menjawab selalu.

4. Indikator Penyelesaian Sengketa Secara Beradab

Indikator penyelesaian sengketa secara beradab merupakan indikator keempat dari variabel rasa aman. Indikator penyelesaian sengketa secara beradab memiliki 2 item yang secara rinci datanya tersaji dalam grafik berikut:



Gambar 4. 18 Indikator Penyelesaian Sengketa Secara Beradab Berdasarkan Skala Jawaban

Sumber: Data primer diolah, 2019

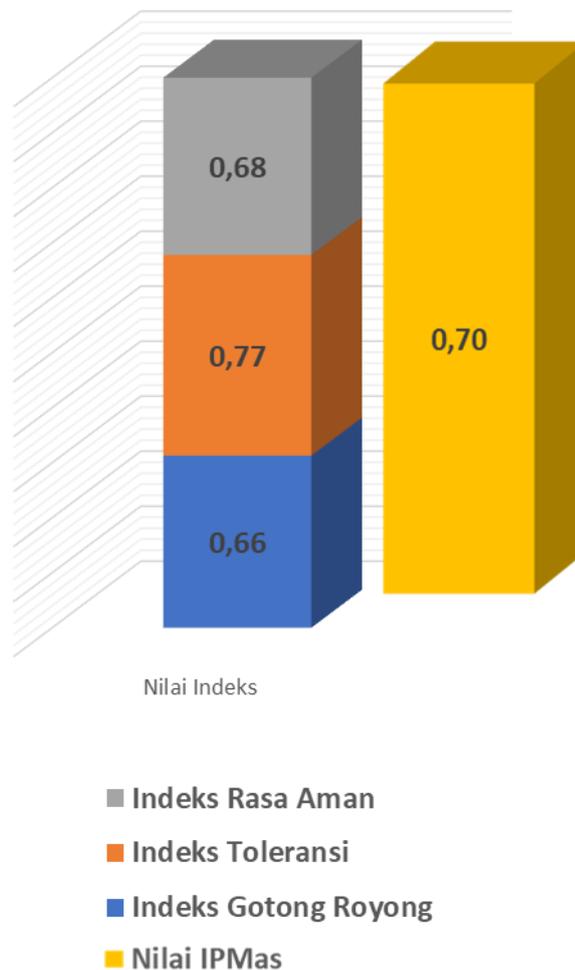
Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa item dari indikator penyelesaian sengketa secara beradab mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Item jika terjadi kekerasan massa aparat keamanan/ pemerintah ikut terlibat dalam penyelesaian masalah sebanyak 190 responden menjawab sering, dan sebanyak 53 responden menjawab selalu, sedangkan sebanyak 91 responden menjawab jarang, dan sebanyak 66 responden menjawab tidak pernah. Untuk item jika terjadi kekerasan massa, tokoh agama/ masyarakat sering ikut terlibat dalam penyelesaian masalah sebanyak 196 responden menjawab sering, dan sebanyak 116 responden menjawab selalu, sedangkan sebanyak 53 responden menjawab jarang, dan sebanyak 35 responden menjawab tidak pernah.

4.3 Pembahasan

4.3.1. Analisis Data Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

Kabupaten

Berikut merupakan nilai indeks pembangunan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019, Indeks Pembangunan masyarakat merupakan indikator kinerja Utama yang ditetapkan pada RPJMD yang wajib diukur nilai indeks tersebut di bagi menjadi indeks gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Hasil nilai tersebut telah di uji secara validitas maupun reabilitas.



Gambar 4. 19. Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat 2019

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019

Tabel 4. 15. Klasifikasi Rentang Nilai

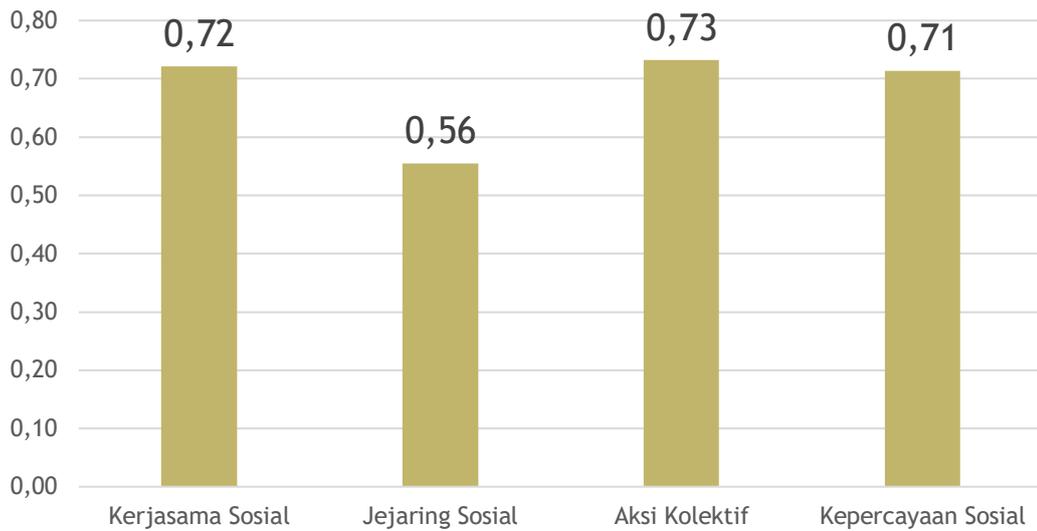
1,00 – 1,75	0,25 – 0,43	D	Tidak Baik
1,76 – 2,50	0,44 – 0,62	C	Kurang Baik
2,51 – 3,25	0,63 – 0,81	B	Baik
3,26 – 4,00	0,82 – 1	A	Sangat Baik

Berdasarkan dari ketiga indeks tersebut diketahui bahwa indeks toleransi paling tinggi nilai nya dengan nilai indeks toleransi 0.77 artinya kategori pembangunan masyarakat di dimensi toleransi baik (B). Indeks gotong royong bernilai 0.66 dan rasa aman 0.68, artinya bahwa berkategori pembangunan masyarakat baik (B), namun dengan nilai tersebut masih memungkinkan jatuh menjadi nilai (C). Kumulatif Indeks toleransi, gotong royong, dan rasa aman membentuk Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 dengan nilai 0.70. jika di bandingkan dengan nilai Indeks pembangunan Masyarakat secara nasional di tahun 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat masih lebih tinggi.

Nilai indeks gotong royong masih yang paling rendah maka perlu afirmasi dalam kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Afirmasi tersebut dapat berupa kebijakan untuk mengatur kegiatan yang bersifat interaksi antar masyarakat, seperti kerjabakti rutin, rapat kegiatan antar warga yang diinsiasi oleh masyarakat, atau event Bersama di dalam masyarakat. Indeks toleransi paling tinggi dengan nilai 0.77, namun nilai tersebut bisa jadi lebih tinggi, tahun 2019 merupakan tahun politik dimana adanya polarisasi antar masyarakat. Terakhir indeks rasa aman dengan nilai indeks 0.68. rasa aman merupakan kebutuhan setiap individu dalam kesadaran hukum, penyelesaian sengkata, maupun mitigasi resiko sosial,

A. Indeks Gotong Royong

Indeks gotong royong pada dasarnya menyajikan gambaran tentang perilaku individu yang berhubungan dengan masyarakat di lingkungannya. Indeks Gotong Royong merupakan salah satu variabel dalam survei Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) ini. Indeks Gotong Royong terdiri dari 4 indikator yakni kerjasama sosial, jejaring sosial, aksi kolektif serta kepercayaan sosial.



Gambar 4. 20. Indeks Gotong Royong Kabupaten Kotawaringin Barat 2019

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019

Tabel 4. 16. Klasifikasi Rentang Nilai

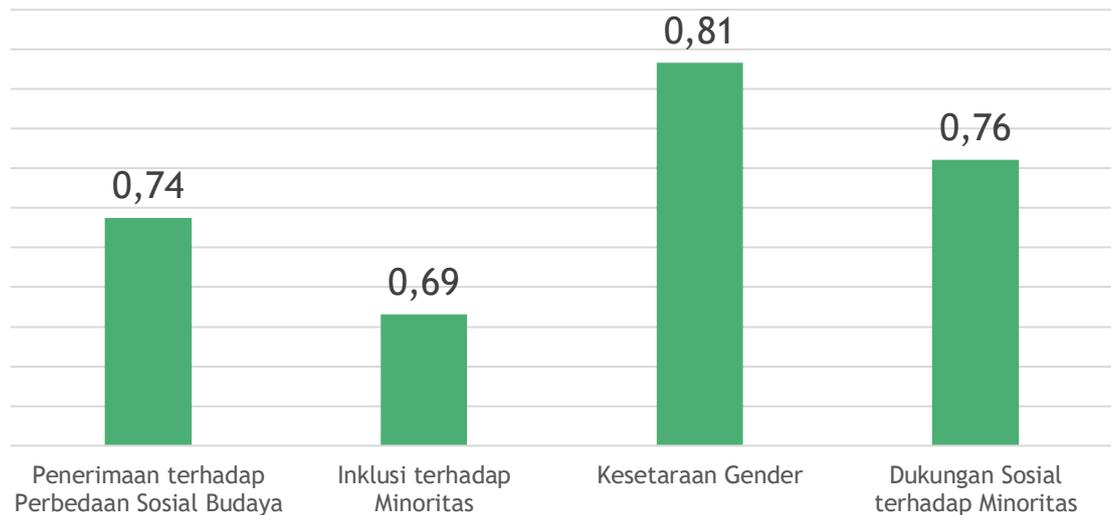
1,00 – 1,75	0,25 – 0,43	D	Tidak Baik
1,76 – 2,50	0,44 – 0,62	C	Kurang Baik
2,51 – 3,25	0,63 – 0,81	B	Baik
3,26 – 4,00	0,82 – 1	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai indikator kerjasama sosial sebesar 0,72; jejaring sosial sebesar 0,56; aksi kolektif sebesar 0,73 dan kepercayaan sosial sebesar 0,71. Indikator yang memiliki nilai tertinggi diantara keempat indikator adalah aksi kolektif. Sedangkan indikator dengan nilai terendah adalah jejaring sosial. Sejalan dengan nilai indikator tersebut, ketiga indikator yang memiliki nilai diatas 0,63 menunjukkan kriteria Baik (B) yakni indikator kerjasama sosial, aksi kolektif dan kepercayaan sosial. Indikator jejaring sosial yang memiliki nilai terendah diantara empat indikator dalam Indeks Gotong Royong menunjukkan kriteria Kurang Baik (C).

Nilai jejaring sosial menunjukkan nilai terendah, artinya bahwa jejaring sosial warga kurang baik. Jejaring sosial merupakan aktivitas warga dalam kegiatan keorganisasian. Bagaimana dalam memberikan saran dalam rapat, pertemuan antar warga, atau menjadi anggota kegiatan keorganisasian. Sehingga jika frekuensi masyarakat dalam menjalankan jejaring sosial rendah, nilai tersebut rendah. Afirmasi yang dapat dilakukan pemerintah yaitu mengadakan FGD dengan agenda menstimulasi Ketua RT atau ketua RW untuk mengajak warga lebih aktif dalam kegiatan keorganisasian.

B. Indeks Toleransi

Indeks toleransi pada dasarnya menyajikan gambaran tentang perilaku individu dalam penerimaan terhadap perbedaan di lingkungan. Indeks Toleransi merupakan salah satu variabel dalam survei Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) ini. Indeks Toleransi terdiri dari 4 indikator yakni penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya, inklusi terhadap minoritas, kesetaraan gender dan dukungan sosial kepada minoritas.



Gambar 4. 21. Indeks Toleransi Kabupaten Kotawaringin Barat 2019

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019

Tabel 4. 17. Klasifikasi Rentang Nilai

1,00 – 1,75	0,25 – 0,43	D	Tidak Baik
1,76 – 2,50	0,44 – 0,62	C	Kurang Baik
2,51 – 3,25	0,63 – 0,81	B	Baik
3,26 – 4,00	0,82 – 1	A	Sangat Baik

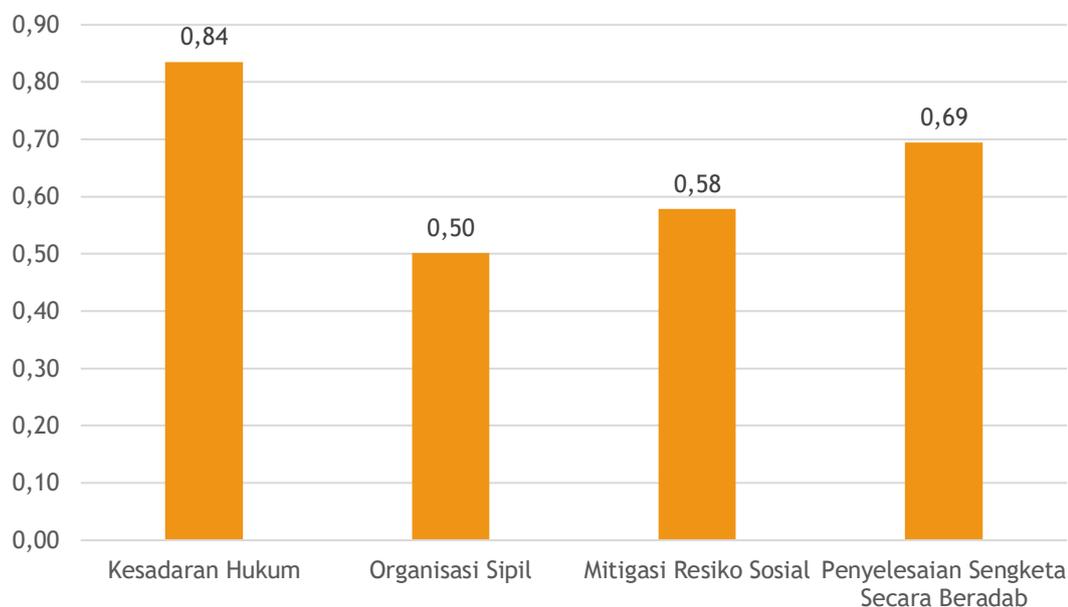
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Indeks Toleransi tersebut terdiri dari nilai indikator penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya sebesar 0,74; inklusi terhadap minoritas sebesar 0,69; kesetaraan gender sebesar 0,81 dan dukungan sosial kepada minoritas sebesar 0,76. Nilai kesetaraan gender paling tinggi, dan yang terendah dari indikator tersebut yaitu 0,69.

Nilai inklusi terhadap minoritas paling rendah, inklusi terhadap minoritas yaitu kemampuan masyarakat dalam menerima kepemimpinan dari suku lain. Hal ini sangat menyangkut terkait toleransi. Kesukuan merupakan hal yang sangat sensitive akhir akhir ini terutama pada isu nasional. Afirmasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu menginisiasi kegiatan forum antar umat beragama atau suku. Sehingga dapat menjalin komunikasi yang harmonis antar tokoh adat/ suku.

C. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman merupakan salah satu variabel dalam survei Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) ini. Indeks Rasa Aman terdiri dari 4 indikator yakni kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi risiko sosial dan penyelesaian sengketa secara beradab.



Gambar 4. 22. Indeks Rasa Aman Kabupaten Kotawaringin Barat 2019

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019

Tabel 4. 18. Klasifikasi Rentang Nilai

1,00 – 1,75	0,25 – 0,43	D	Tidak Baik
1,76 – 2,50	0,44 – 0,62	C	Kurang Baik
2,51 – 3,25	0,63 – 0,81	B	Baik
3,26 – 4,00	0,82 – 1	A	Sangat Baik

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018

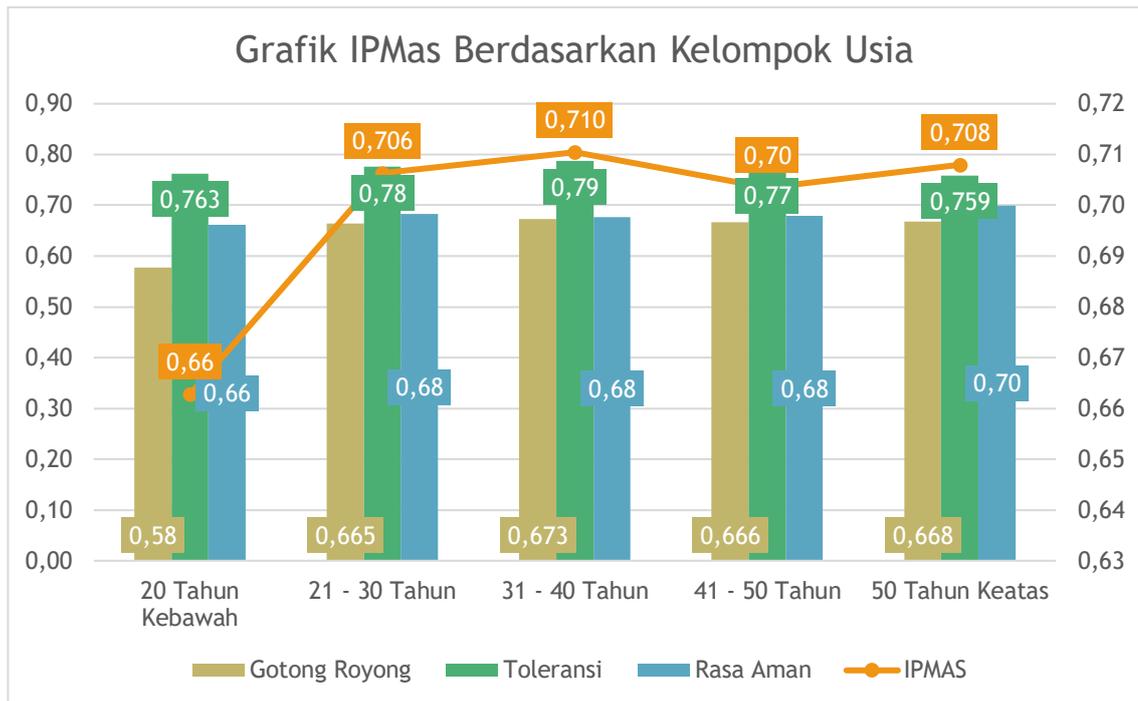
Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Indeks Rasa Aman sebesar terdiri dari nilai indikator Kesadaran Hukum sebesar 0,84; Organisasi Sipil sebesar 0,50; Mitigasi Risiko Sosial sebesar 0,58 dan Penyelesaian Sengketa Secara Beradab sebesar 0,69. Indikator yang memiliki nilai tertinggi diantara keempat indikator adalah Kesadaran Hukum dengan kriteria Sangat Baik (A). Indikator yang memiliki nilai terendah adalah Organisasi Sipil dengan kriteria Kurang Baik (C).

Indikator organisasi sosial merupakan indikator yang menjelaskan tentang persepsi setuju atau tidak adanya LSM Pemberdayaan Masyarakat, keanggotaan organisasi massal, dan organisasi parpol. Rendahnya tersebut karena mayoritas organisasi massal berpersepsi tidak penting mengikuti kegiatan tersebut. Karena tidak berimplikasi pada kehidupan masyarakat.

4.3.2. Analisis Data Indeks Pembangunan Masyarakat Berdasarkan Profil Masyarakat

A. Kelompok Usia

Dalam survey Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 salah satu Kelompok yang diukur adalah Kelompok Usia. Terdapat 3 variabel dalam Kelompok Usia pada survey Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 ini yaitu gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Variabel-variabel tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai IPMas pada masing-masing kelompok Usia responden. Berikut adalah grafik IPMas berdasarkan Kelompok Usia responden:

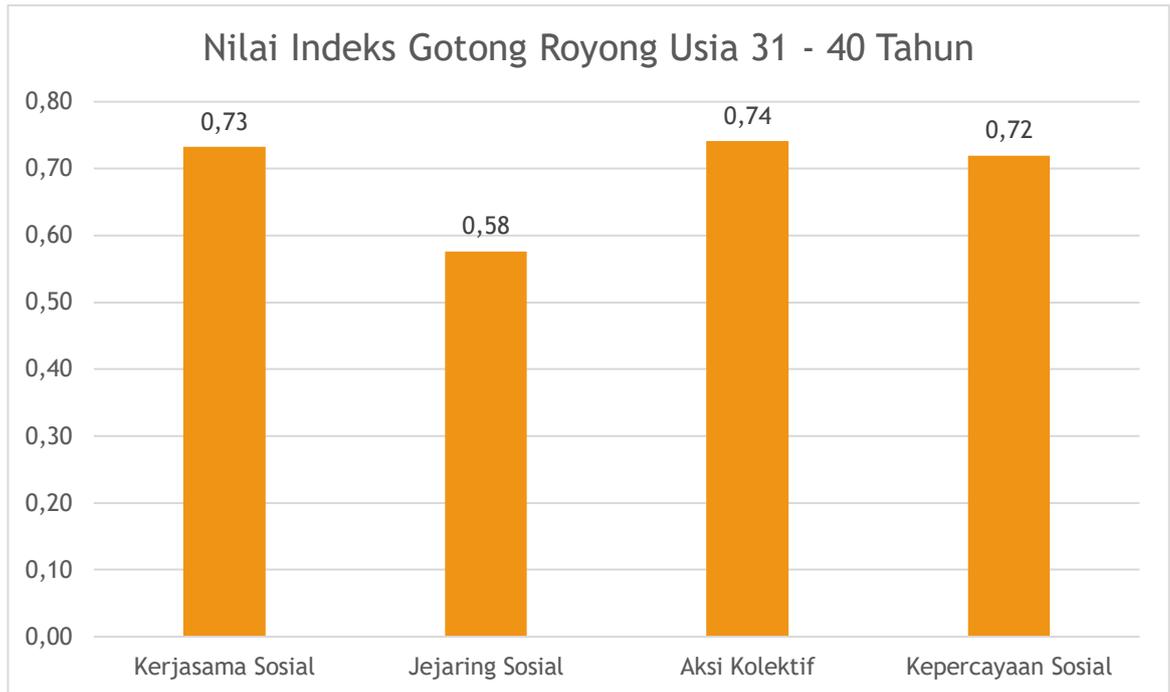


Gambar 4. 23 Grafik IPMas Berdasarkan Kelompok Usia

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa nilai IPMas tertinggi pada Kelompok Usia yaitu responden dengan rentang Usia 31 – 40 tahun dengan nilai IPMas 0,710. Sementara nilai IPMas terendah pada Kelompok Usia yaitu responden dengan rentang Usia 0,66. Nilai IPMas pada kedua Kelompok pekerjaan tersebut masuk pada kategori B (Baik) yaitu pada rentang nilai 0,63 – 0,81. Selain IPMas, terdapat 3 variabel pembentuk IPMas yaitu gotong royong, toleransi, dan rasa aman yang disajikan dalam grafik diatas. Untuk variabel gotong royong nilai tertinggi diraih oleh responden dengan rentang usia 31 – 40 tahun dengan nilai gotong royong 0,673 termasuk dalam kategori B (Baik) sedangkan nilai terendah diraih oleh responden dengan rentang usia 20 tahun kebawah dengan nilai gotong royong 0,58 termasuk dalam kategori C (Kurang Baik). Untuk variabel toleransi nilai tertinggi diraih oleh responden dengan rentang usia 31 – 40 tahun dengan nilai toleransi 0,79 termasuk kategori B (Baik) sementara nilai terendah diraih oleh responden dengan rentang usia 50 tahun keatas dengan nilai toleransi 0,759 termasuk dalam kategori B (Baik). Untuk variabel rasa aman nilai tertinggi diraih oleh responden dengan rentang usia 50 tahun keatas dengan nilai rasa aman 0,70 termasuk dalam kategori B (Baik) sementara nilai terendah diraih oleh responden dengan rentang usia 20 tahun kebawah dengan nilai rasa aman 0,66 termasuk dalam kategori B (Baik).

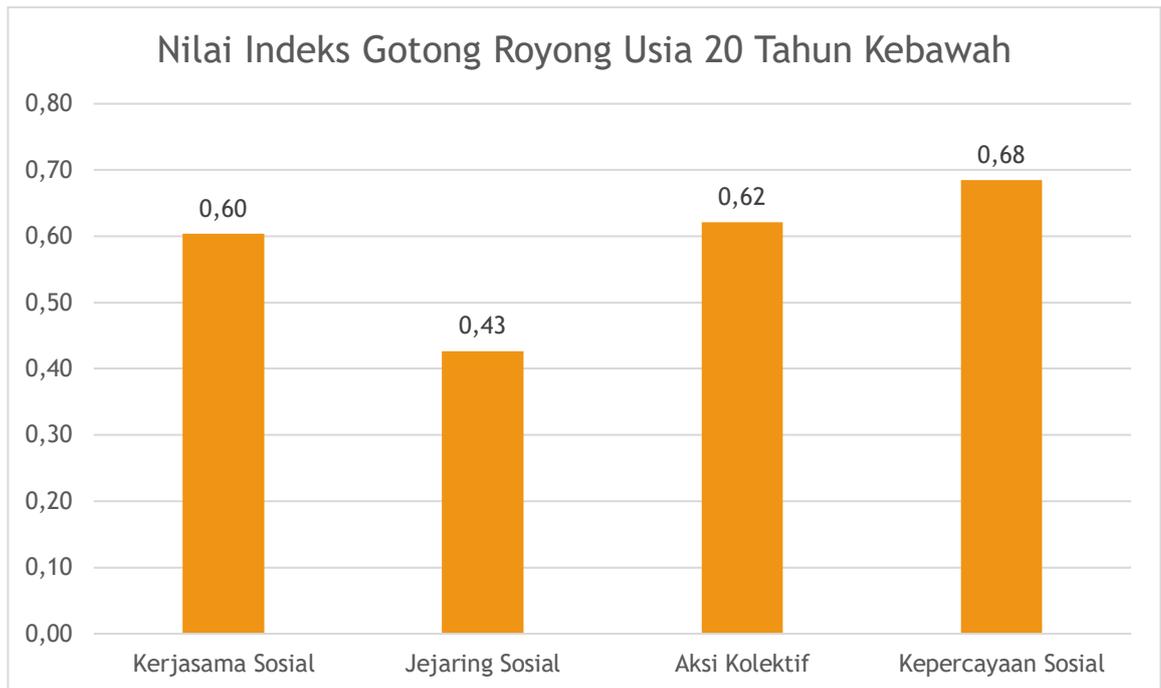
Jika dilihat berdasarkan nilai indikator pada tiap-tiap variabelnya menurut Kelompok Usia, secara rinci datanya terlihat seperti grafik-grafik dibawah ini:



Gambar 4. 24 Nilai Indeks Gotong Royong Usia 31 – 40 Tahun

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa nilai indeks gotong royong yang paling tinggi diraih oleh kelompok Usia 31 – 40 tahun. Dari keempat indikator dari variabel gotong royong, yang memperoleh nilai indeks tertinggi adalah indikator aksi kolektif yaitu sebesar 0,74 yang kemudian diikuti oleh indikator kerjasama sosial yaitu sebesar 0,73 dan dilanjut oleh indikator kepercayaan sosial yaitu sebesar 0,72 serta yang terakhir yaitu indikator jejaring sosial dengan nilai indeks sebesar 0,58. Capaian nilai variabel dari indeks gotong royong pada kelompok Usia 31 – 40 tahun tersebut termasuk pada kategori B (Baik) kecuali 1 indikator yaitu jejaring sosial dengan kategori C (Kurang Baik). Hasil diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang berusia 31 – 40 tahun masih guyub rukun sehingga memiliki kepercayaan antar sesama, dapat bekerjasama dan aksi kolektif yang baik. Tingkat jejaring sosial sebagai indikator pembentuk yang berkontribusi atas rendahnya capaian rata-rata tingkat gotong royong masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang berusia 31 – 40 tahun berada pada kategori C (Kurang Baik). Sementara itu, nilai indeks gotong royong berdasarkan kelompok Usia yang paling rendah diraih oleh kelompok Usia 20 tahun kebawah dengan rincian sebagai berikut:



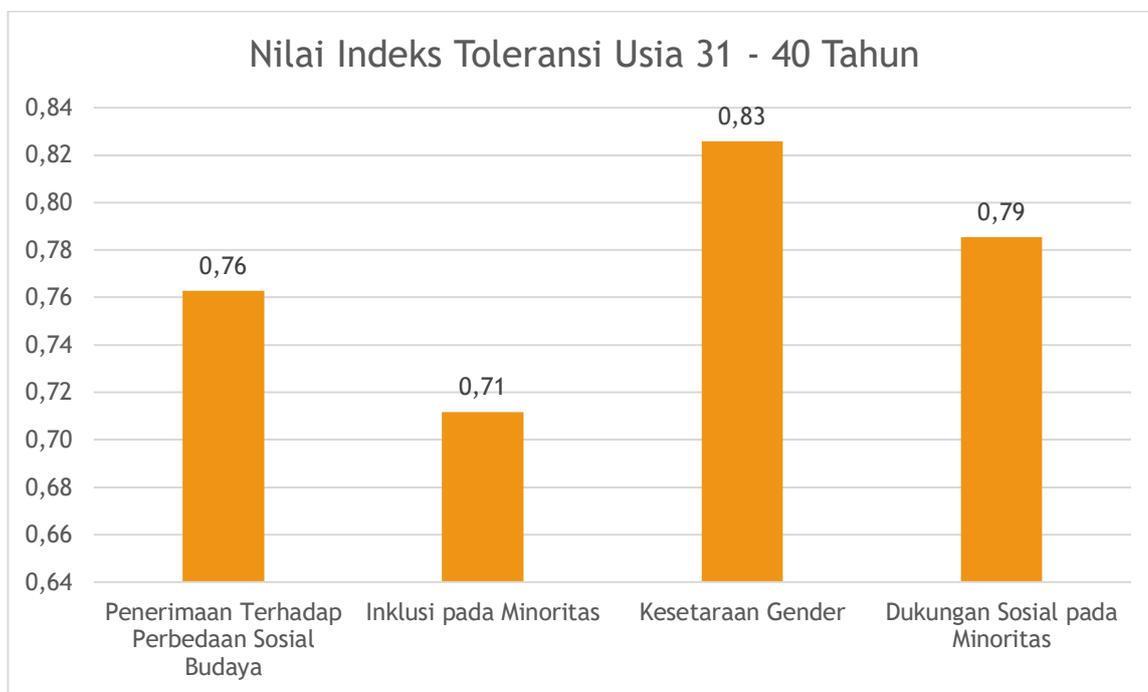
Gambar 4. 25 Nilai Indeks Gotong Royong Usia 20 Tahun Kebawah

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa nilai indeks gotong royong yang paling rendah diraih oleh kelompok Usia 20 tahun kebawah. Dari keempat indikator dari variabel gotong royong, yang memperoleh nilai indeks tertinggi adalah indikator kepercayaan sosial yaitu sebesar 0,68 yang kemudian diikuti oleh indikator aksi kolektif yaitu sebesar 0,62 dan dilanjut oleh indikator kerjasama sosial yaitu sebesar 0,60 serta yang terakhir yaitu indikator jejaring sosial dengan nilai indeks sebesar 0,43. Capaian nilai variabel dari indeks gotong royong pada kelompok Usia 20 tahun tersebut termasuk pada kategori C (Kurang Baik) bahkan untuk indikator jejaring sosial termasuk dalam kategori D (Tidak Baik) dan hanya ada 1 indikator dengan kategori B (Baik) yaitu kepercayaan sosial. Hasil diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang berusia 20 tahun kebawah memiliki kepercayaan antar sesama yang cukup baik namun dalam hal kerjasama antar sesama dan aksi kolektif masih kurang baik bahkan tingkat jejaring sosialnya justru tidak baik.

Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dengan kelompok Usia 31 – 40 tahun (yang memiliki capaian gotong royong tertinggi) dan kelompok Usia 20 tahun kebawah (yang memiliki capaian gotong royong terendah) perlu memperhatikan tingkat partisipasi masyarakat dalam menjadi anggota organisasi, mengikuti kegiatan bersama dan pertemuan untuk kepentingan warga, serta keaktifan masyarakat dalam pertemuan masih kurang. Gotong royong menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat bersama-sama dalam mewujudkan pembangunan masyarakat. Tingkat jejaring sosial masyarakat

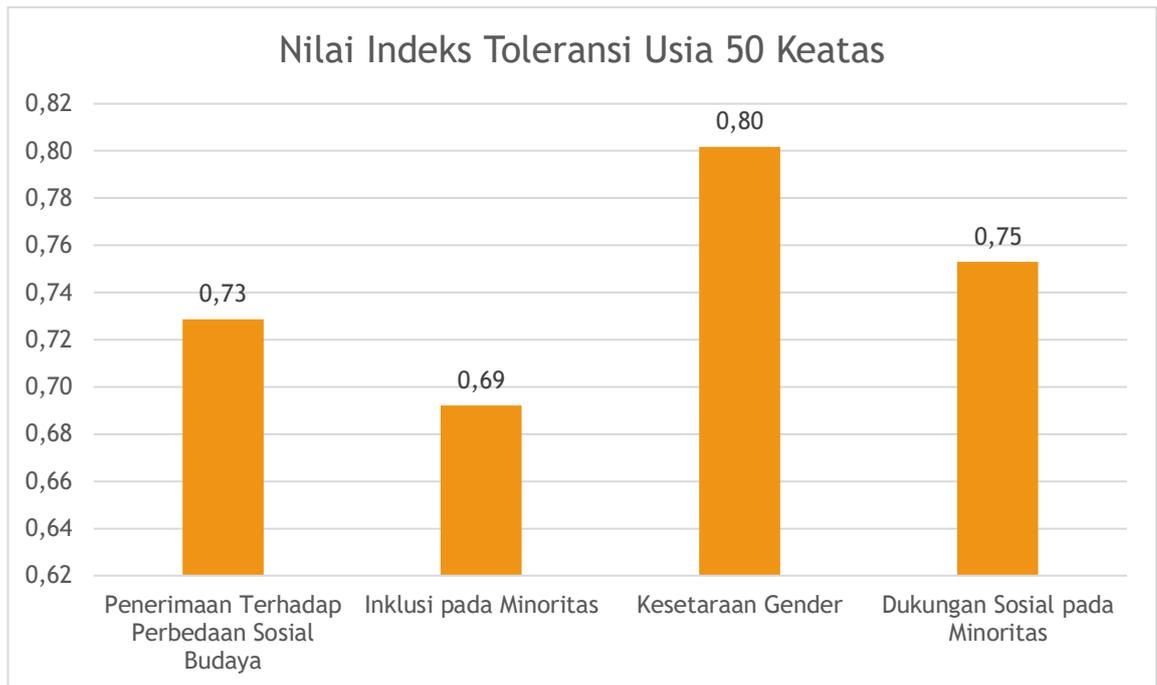
sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pandangan dari Talizuduhu Nddrana (1982:107) bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Untuk nilai indeks toleransi pada kelompok Usia, yang memperoleh nilai tertinggi yaitu pada kelompok Usia 31 – 40 tahun, secara rinci datanya tersaji pada grafik berikut:



Gambar 4. 26 Nilai Indeks Toleransi Usia 31 – 40 Tahun

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa nilai indeks toleransi yang paling tinggi diraih oleh kelompok Usia 31 – 40 tahun. Dari keempat indikator dari variabel toleransi, yang memperoleh nilai indeks tertinggi adalah indikator kesetaraan gender yaitu sebesar 0,83 yang kemudian diikuti oleh indikator dukungan sosial pada minoritas yaitu sebesar 0,79 dan dilanjut oleh indikator penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya yaitu sebesar 0,76 serta yang terakhir yaitu indikator inklusi pada minoritas dengan nilai indeks sebesar 0,71. Capaian nilai variabel dari indeks toleransi pada kelompok Usia 31 – 40 tahun tersebut termasuk pada kategori B (Baik). Hasil diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang berusia 31 – 40 tahun memiliki toleransi yang baik dalam hal kesetaraan gender, dukungan terhadap minoritas, penerimaan perbedaan sosial budaya dan inklusi pada minoritas sudah baik. Sementara itu, nilai indeks toleransi berdasarkan kelompok Usia yang paling rendah diraih oleh kelompok Usia 50 tahun keatas dengan rincian sebagai berikut:



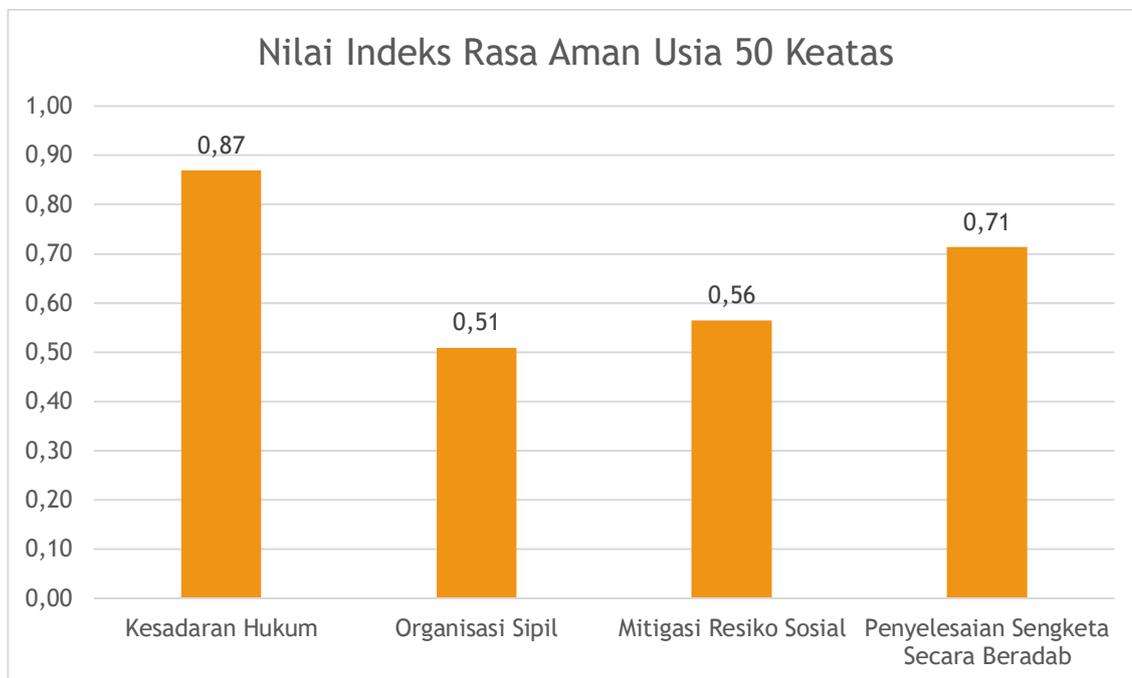
Gambar 4. 27 Nilai Indeks Toleransi Usia 50 Keatas

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa nilai indeks toleransi yang paling rendah diraih oleh kelompok Usia 50 tahun keatas. Dari keempat indikator dari variabel toleransi, yang memperoleh nilai indeks tertinggi adalah indikator kesetaraan gender yaitu sebesar 0,80 yang kemudian diikuti oleh indikator dukungan sosial pada minoritas yaitu sebesar 0,75 dan dilanjut oleh indikator penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya yaitu sebesar 0,73 serta yang terakhir yaitu indikator inklusi pada minoritas dengan nilai indeks sebesar 0,69. Capaian nilai variabel dari indeks toleransi pada kelompok Usia 50 tahun keatas tersebut termasuk pada kategori B (Baik). Hal diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang berusia 50 tahun keatas juga masih memiliki pemahaman terhadap perbedaan sosial budaya, inklusi pada minoritas, kesetaraan gender, dan dukungan sosial pada minoritas yang baik meskipun nilai indeks toleransi pada kelompok Usia ini memiliki capaian yang terendah diantara kelompok Usia lainnya.

Pemahaman masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat pada kelompok Usia yang memiliki capaian tertinggi dalam hal toleransi (31 – 40 tahun) dan yang memiliki capaian terendah dalam hal toleransi (50 tahun kebawah) dalam kesetaraan gender, dukungan sosial terhadap minoritas, penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya, dan inklusi pada minoritas sudah bukan menjadi isu yang menjadi hambatan pada tingkat toleransi kehidupan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Tingkat toleransi merefleksikan pemahaman dan cara bersikap masyarakat dalam kehidupan sosial

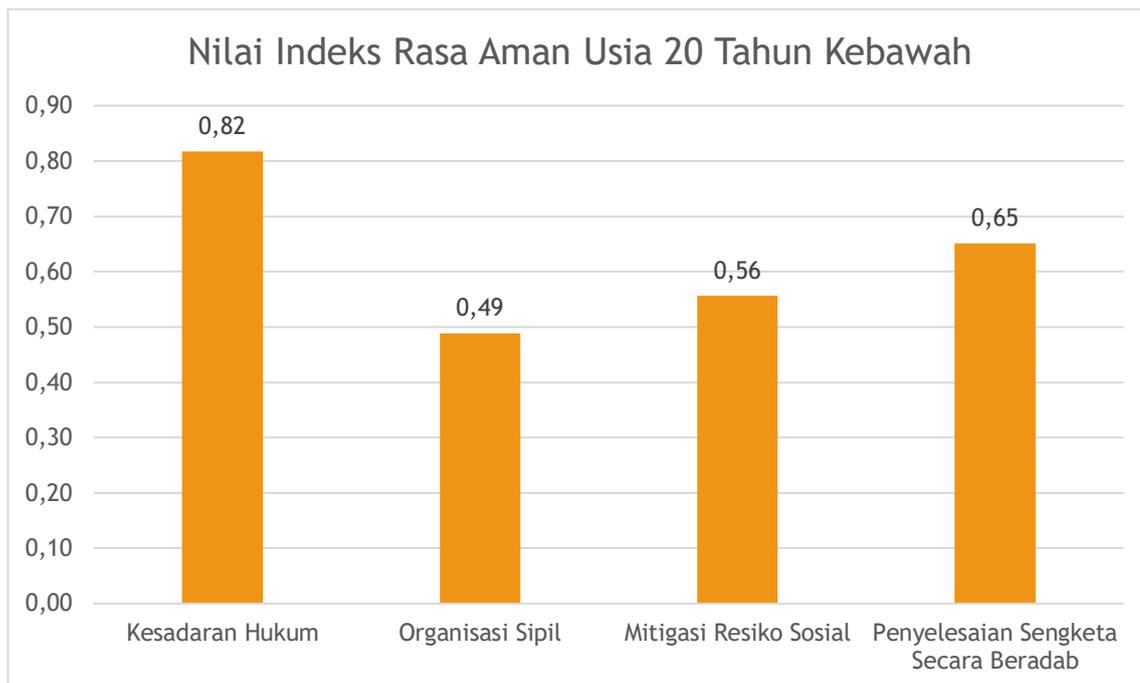
masyarakat yang heterogen dan multikultural. Untuk nilai indeks rasa aman pada kelompok Usia, yang memperoleh nilai tertinggi yaitu pada kelompok Usia 50 tahun keatas, secara rinci datanya tersaji pada grafik berikut:



Gambar 4. 28 Nilai Indeks Rasa Aman Usia 50 Keatas

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa nilai indeks rasa aman yang paling tinggi diraih oleh kelompok Usia 50 tahun keatas. Dari keempat indikator dari variabel rasa aman, yang memperoleh nilai indeks tertinggi adalah indikator kesadaran hukum yaitu sebesar 0,87 yang kemudian diikuti oleh indikator penyelesaian sengketa secara beradab yaitu sebesar 0,71 dan dilanjut oleh indikator mitigasi resiko sosial yaitu sebesar 0,56 serta yang terakhir yaitu indikator organisasi sipil dengan nilai indeks sebesar 0,51. Capaian nilai variabel dari indeks rasa aman pada kelompok Usia 50 tahun keatas tersebut termasuk pada kategori B (Baik) kecuali 2 indikator yaitu mitigasi resiko sosial dan organisasi sipil yang termasuk dalam kategori C (Kurang Baik). Hal diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang berusia 50 tahun keatas memiliki kesadaran hukum dan penyelesaian sengketa secara beradab yang baik. Namun dalam hal organisasi sipil dan mitigasi resiko sosial masih kurang baik. Sementara itu, nilai indeks rasa aman berdasarkan kelompok Usia yang paling rendah diraih oleh kelompok Usia 20 tahun kebawah dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 4. 29 Nilai Indeks Rasa Aman Usia 20 Tahun Kebawah

Sumber: Data primer diolah, 2019

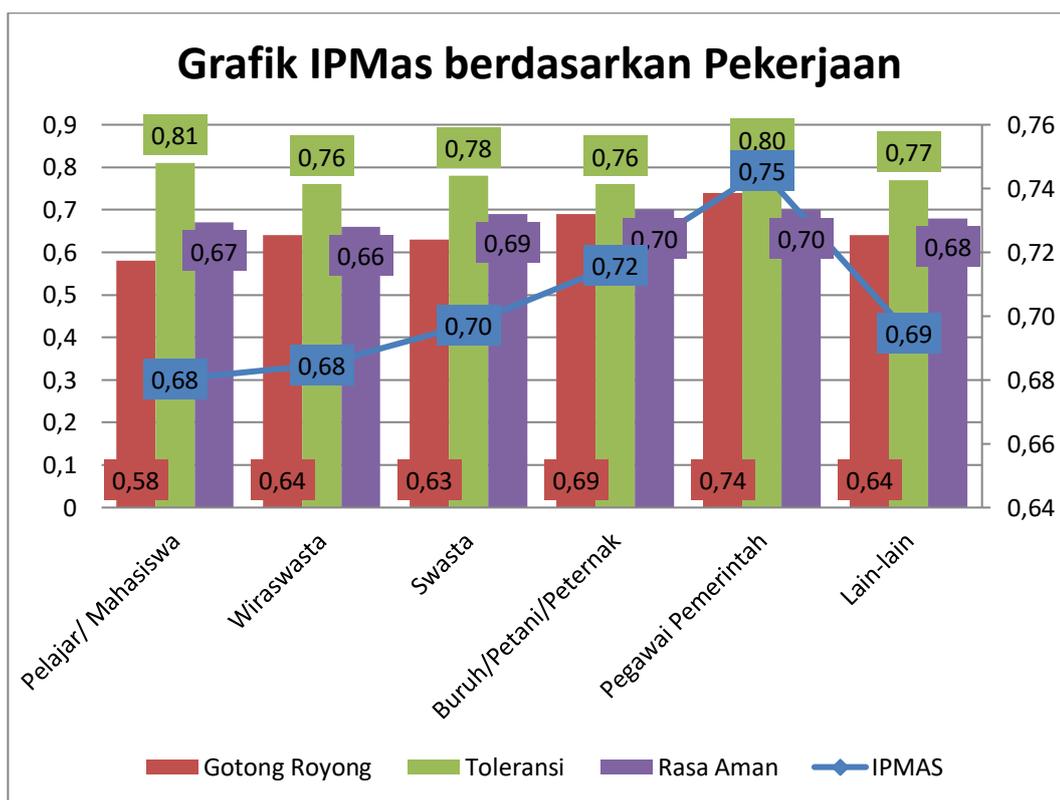
Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa nilai indeks rasa aman yang paling rendah diraih oleh kelompok Usia 20 tahun kebawah. Dari keempat indikator dari variabel rasa aman, yang memperoleh nilai indeks tertinggi adalah indikator kesadaran hukum yaitu sebesar 0,82 yang kemudian diikuti oleh indikator penyelesaian sengketa secara beradab yaitu sebesar 0,65 dan dilanjut oleh indikator mitigasi resiko sosial yaitu sebesar 0,56 serta yang terakhir yaitu indikator organisasi sipil dengan nilai indeks sebesar 0,49. Capaian nilai variabel dari indeks toleransi pada kelompok Usia 20 tahun kebawah tersebut termasuk pada kategori B (Baik) kecuali 2 indikator yaitu mitigasi resiko sosial dan organisasi sipil yang termasuk dalam kategori C (Kurang Baik). Hasil diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang berusia 20 tahun kebawah memiliki kesadaran hukum dan penyelesaian sengketa secara beradab yang baik meski kelompok Usia ini merupakan kelompok Usia dengan capaian indeks rasa aman yang terendah. Namun dalam hal organisasi sipil dan mitigasi resiko sosial masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat pada kelompok Usia 20 tahun kebawah memiliki capaian yang kurang baik.

Tingkat rasa aman masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat baik itu masyarakat yang berUsia 50 tahun keatas (yang memiliki capaian rasa aman tertinggi) maupun masyarakat yang berUsia 20 tahun kebawah (yang memiliki capaian rasa aman terendah) dalam hal mitigasi risiko sosial dan organisasi sipil masih cenderung lemah. Hal tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan masyarakat terkait tanda-tanda atau peringatan untuk mengatasi kejadian darurat bencana alam di lingkungan tempat tinggal

juga masih kurang. Selain itu tidak adanya pelatihan atau simulasi terhadap penyelamatan bencana alam dalam tiga tahun terakhir. Rendahnya capaian indikator organisasi sipil dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat dalam organisasi massa maupun politik hanya sebagian kecil. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam organisasi massa disebabkan preferensi masyarakat berdasarkan struktur demografi masyarakat seperti usia responden yang mempengaruhi pemahaman dan kecenderungan aktivitas.

B. Kelompok Pekerjaan

Salah satu Kelompok yang diukur dalam survey Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 adalah Kelompok pekerjaan. Terdapat 3 variabel dalam Kelompok pekerjaan pada survey Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 ini yaitu gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Variabel-variabel tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai IPMas pada masing-masing kelompok pekerjaan responden. Berikut adalah grafik IPMas berdasarkan Kelompok pekerjaan responden:



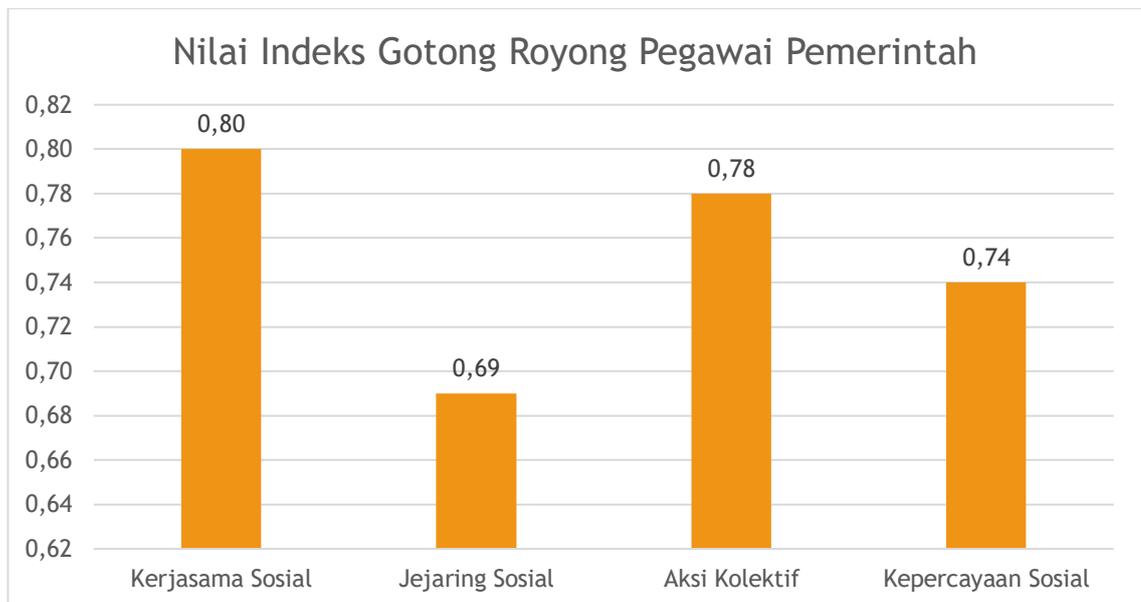
Gambar 4. 30 Grafik IPMas Berdasarkan Kelompok Pekerjaan

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa nilai IPMas tertinggi berdasarkan Kelompok pekerjaan yaitu pada responden dengan profesi pegawai pemerintah dengan nilai IPMas 0,75. Sementara nilai IPMas terendah berdasarkan Kelompok pekerjaan

yaitu responden dengan profesi pelajar/ mahasiswa dengan nilai IPMas 0,68. Nilai IPMas pada kedua Kelompok pekerjaan tersebut masuk pada kategori B (Baik) yaitu pada rentang nilai 0,63 – 0,81. Selain IPMas, terdapat 3 variabel pembentuk IPMas yaitu gotong royong, toleransi, dan rasa aman yang disajikan dalam grafik diatas. Untuk variabel gotong royong nilai tertinggi diraih oleh responden dengan profesi pegawai pemerintah dengan nilai gotong royong 0,74 termasuk pada kategori B (Baik) sementara nilai terendah diraih oleh responden dengan profesi pelajar/ mahasiswa dengan nilai gotong royong 0,58 termasuk pada kategori C (Kurang Baik). Untuk variabel toleransi nilai tertinggi diraih oleh responden dengan profesi pelajar/ mahasiswa dengan nilai toleransi 0,81 termasuk pada kategori B (Baik) sementara nilai terendah diraih oleh responden dengan profesi buruh dan wiraswasta dengan nilai toleransi 0,76 termasuk pada kategori Baik. Untuk variabel rasa aman nilai tertinggi diraih oleh responden dengan profesi buruh dan pegawai pemerintah dengan nilai rasa aman 0,70 termasuk pada kategori B (Baik) sementara nilai terendah diraih oleh responden dengan profesi wiraswasta dengan nilai 0,66 termasuk pada kategori B (Baik).

Jika dilihat berdasarkan nilai indikator pada tiap-tiap variabelnya menurut Kelompok pekerjaan, secara rinci datanya terlihat seperti grafik-grafik dibawah ini:

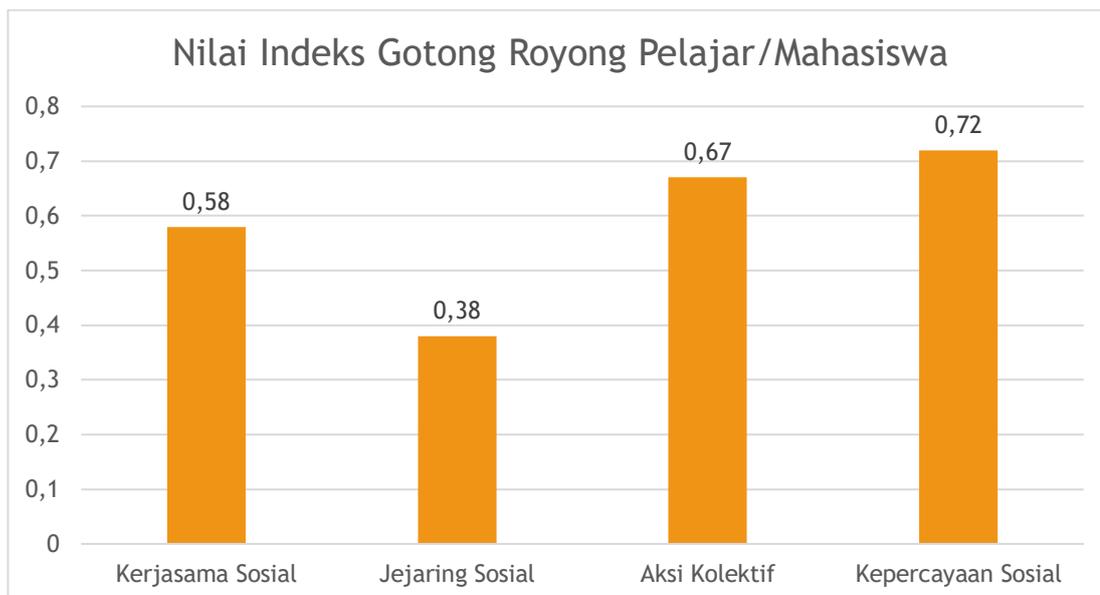


Gambar 4. 31 Nilai Indeks Gotong Royong Pegawai Pemerintah

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa nilai indeks gotong royong yang paling tinggi diraih oleh responden dengan profesi pegawai pemerintah. Dari keempat indikator dari variabel gotong royong, yang memperoleh nilai indeks tertinggi adalah indikator kerjasama sosial yaitu sebesar 0,80 yang kemudian diikuti oleh indikator aksi kolektif yaitu sebesar 0,78 dan dilanjut oleh indikator kepercayaan sosial yaitu sebesar

0,74 serta yang terakhir yaitu indikator jejaring sosial dengan nilai indeks sebesar 0,69. Capaian nilai variabel dari indeks gotong royong pada responden dengan profesi pegawai pemerintah tersebut termasuk pada kategori B (Baik). Hasil diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dengan profesi pegawai pemerintah masih guyub rukun sehingga memiliki kepercayaan antar sesama, jejaring sosial, dapat bekerjasama dan aksi kolektif yang baik. Sementara itu, nilai indeks gotong royong berdasarkan pekerjaan responden yang paling rendah diraih oleh responden dengan pekerjaan pelajar/ mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:

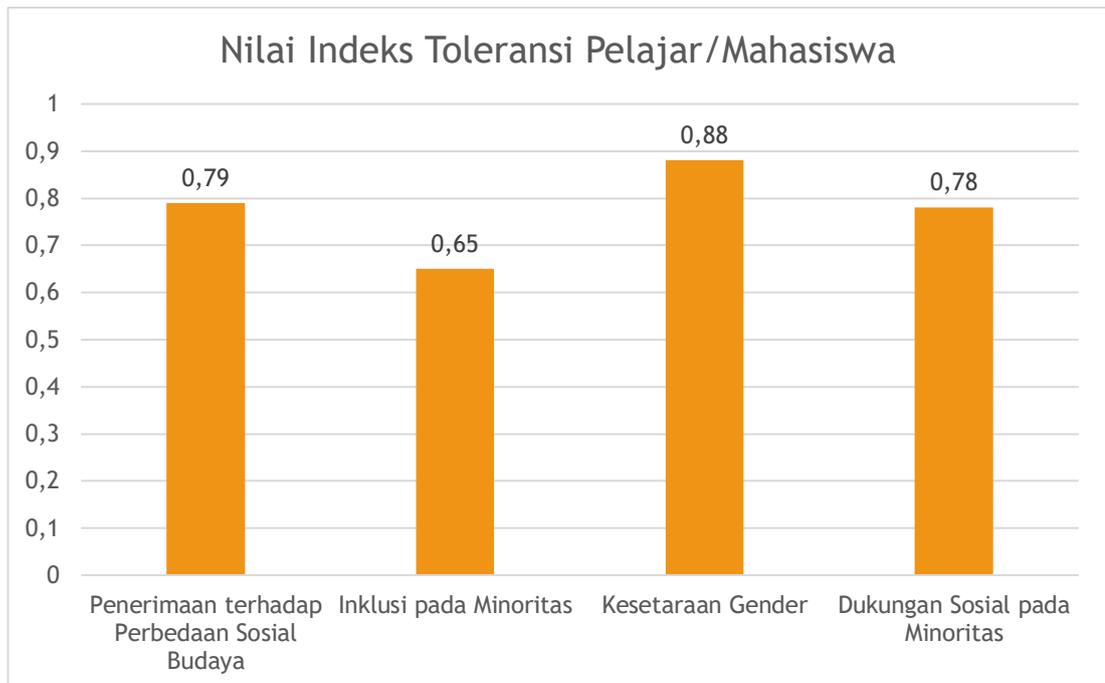


Gambar 4. 32 Nilai Indeks Gotong Royong Pelajar/ Mahasiswa

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa nilai indeks gotong royong yang paling rendah diraih oleh responden dengan profesi pelajar/ mahasiswa. Dari keempat indikator dari variabel gotong royong, yang memperoleh nilai indeks tertinggi adalah indikator kepercayaan sosial yaitu sebesar 0,72 yang kemudian diikuti oleh indikator aksi kolektif yaitu sebesar 0,67 dan dilanjut oleh indikator kerjasama sosial yaitu sebesar 0,58 serta yang terakhir yaitu indikator jejaring sosial dengan nilai indeks sebesar 0,38. Capaian nilai variabel dari indeks gotong royong pada responden dengan profesi pelajar/ mahasiswa tersebut termasuk pada kategori B (Baik) kecuali 2 indikator yaitu kerjasama sosial yang termasuk kategori C (Kurang Baik) dan jejaring sosial yang termasuk kategori D (Tidak Baik). Hasil diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang berprofesi sebagai pelajar/ mahasiswa memiliki kepercayaan antar sesama dan aksi kolektif yang cukup baik namun dalam hal kerjasama antar sesama masih kurang baik bahkan tingkat jejaring sosialnya justru tidak baik.

Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang berprofesi sebagai pegawai pemerintah (yang memiliki capaian gotong royong tertinggi) dan yang berprofesi sebagai pelajar/ mahasiswa (yang memiliki capaian gotong royong terendah) perlu memperhatikan tingkat partisipasi masyarakat dalam menjadi anggota organisasi, mengikuti kegiatan bersama dan pertemuan untuk kepentingan warga, serta keaktifan masyarakat dalam pertemuan masih kurang. Gotong royong menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat bersama-sama dalam mewujudkan pembangunan masyarakat. Tingkat jejaring sosial masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pandangan dari Talizuduhu Nddrana (1982:107) bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Untuk nilai indeks toleransi pada pekerjaan responden, yang memperoleh nilai tertinggi yaitu responden dengan profesi sebagai pelajar/ mahasiswa, secara rinci datanya tersaji pada grafik berikut:

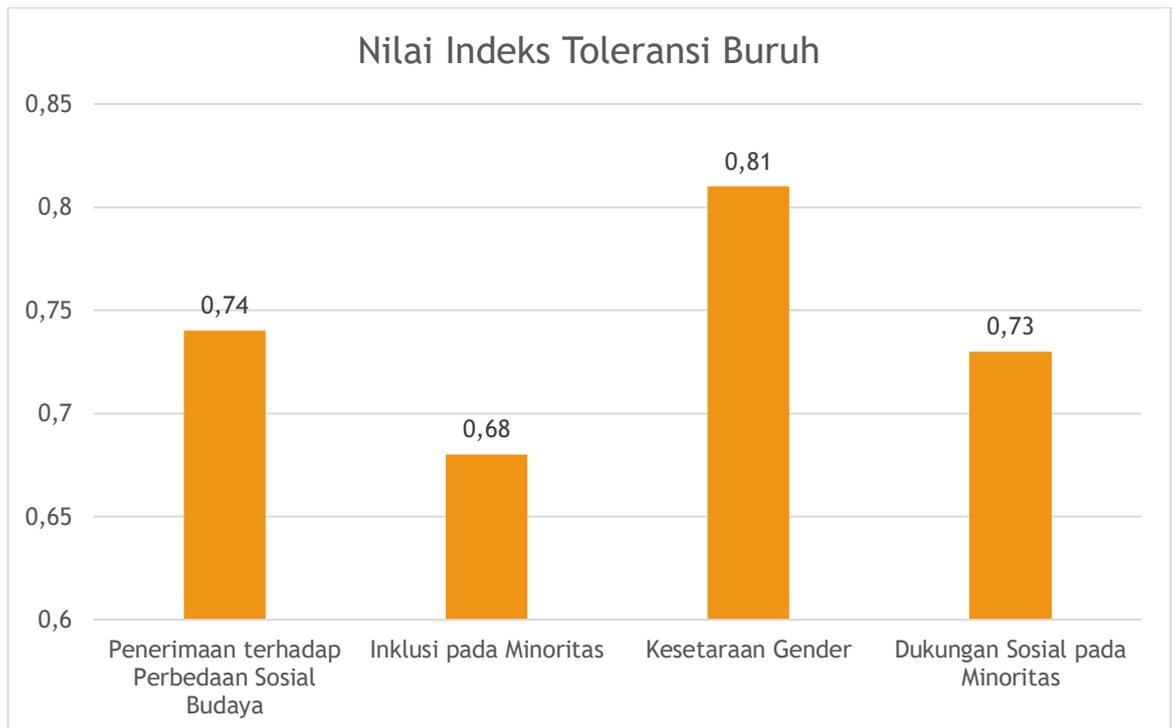


Gambar 4. 33 Nilai Indeks Toleransi Pelajar/ Mahasiswa

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa nilai indeks toleransi yang paling tinggi diraih oleh responden dengan profesi pelajar/ mahasiswa. Dari keempat indikator dari variabel toleransi, yang memperoleh nilai indeks tertinggi adalah indikator kesetaraan gender yaitu sebesar 0,88 yang kemudian diikuti oleh indikator penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya yaitu sebesar 0,79 dan dilanjut oleh indikator dukungan sosial pada minoritas sebesar 0,78 serta yang terakhir yaitu indikator

inklusi pada minoritas dengan nilai indeks sebesar 0,65. Capaian nilai variabel dari indeks toleransi pada responden dengan profesi pelajar/ mahasiswa tersebut termasuk pada kategori B (Baik). Hasil diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang berprofesi sebagai pelajar/ mahasiswa memiliki toleransi yang baik dalam hal kesetaraan gender, dukungan terhadap minoritas, penerimaan perbedaan sosial budaya dan inklusi pada minoritas. Sementara itu, nilai indeks toleransi berdasarkan pekerjaan responden yang paling rendah diraih oleh responden dengan profesi buruh dan wiraswasta dengan rincian sebagai berikut:

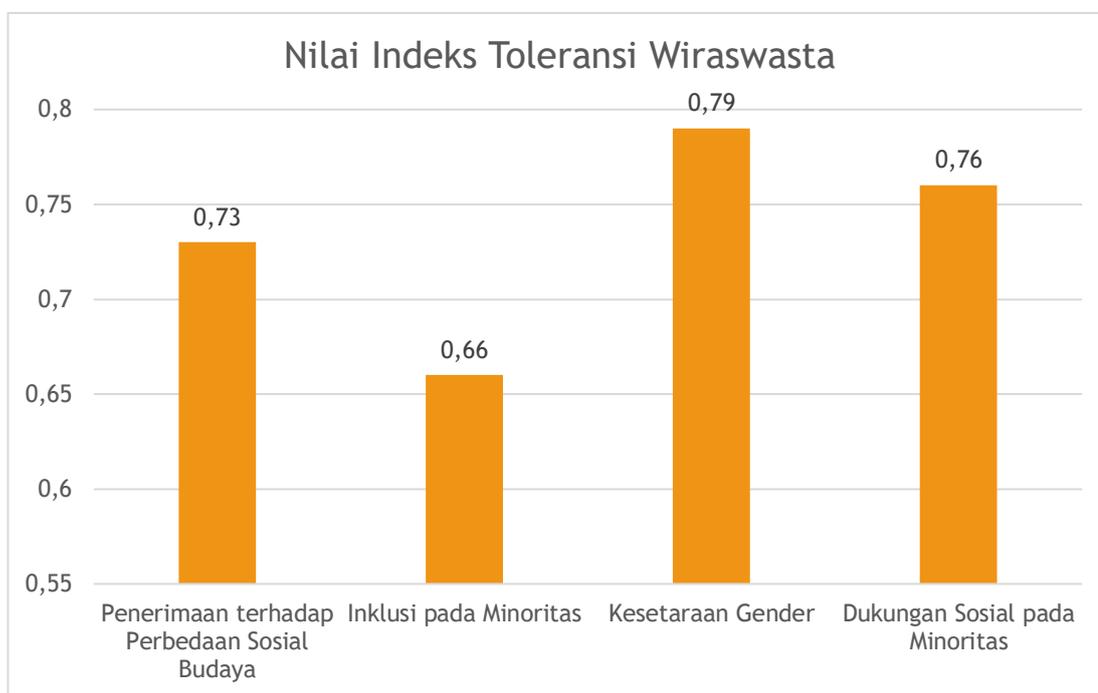


Gambar 4. 34 Nilai Indeks Toleransi Buruh

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa nilai indeks toleransi yang paling rendah yang pertama diraih oleh responden dengan profesi buruh. Dari keempat indikator dari variabel toleransi, yang memperoleh nilai indeks tertinggi adalah indikator kesetaraan gender yaitu sebesar 0,81 yang kemudian diikuti oleh indikator penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya yaitu sebesar 0,74 dan dilanjut oleh indikator dukungan sosial pada minoritas yaitu sebesar 0,73 serta yang terakhir yaitu indikator inklusi pada minoritas dengan nilai indeks sebesar 0,68. Capaian nilai variabel dari indeks toleransi pada responden dengan profesi buruh tersebut termasuk pada kategori B (Baik). Hasil diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang berprofesi sebagai buruh memiliki toleransi yang baik dalam hal kesetaraan gender, dukungan terhadap minoritas, penerimaan perbedaan sosial budaya dan inklusi pada

minoritas. Selanjutnya untuk nilai indeks toleransi yang paling rendah berikutnya yaitu responden dengan profesi wiraswasta, secara rinci datanya tersaji pada grafik berikut:



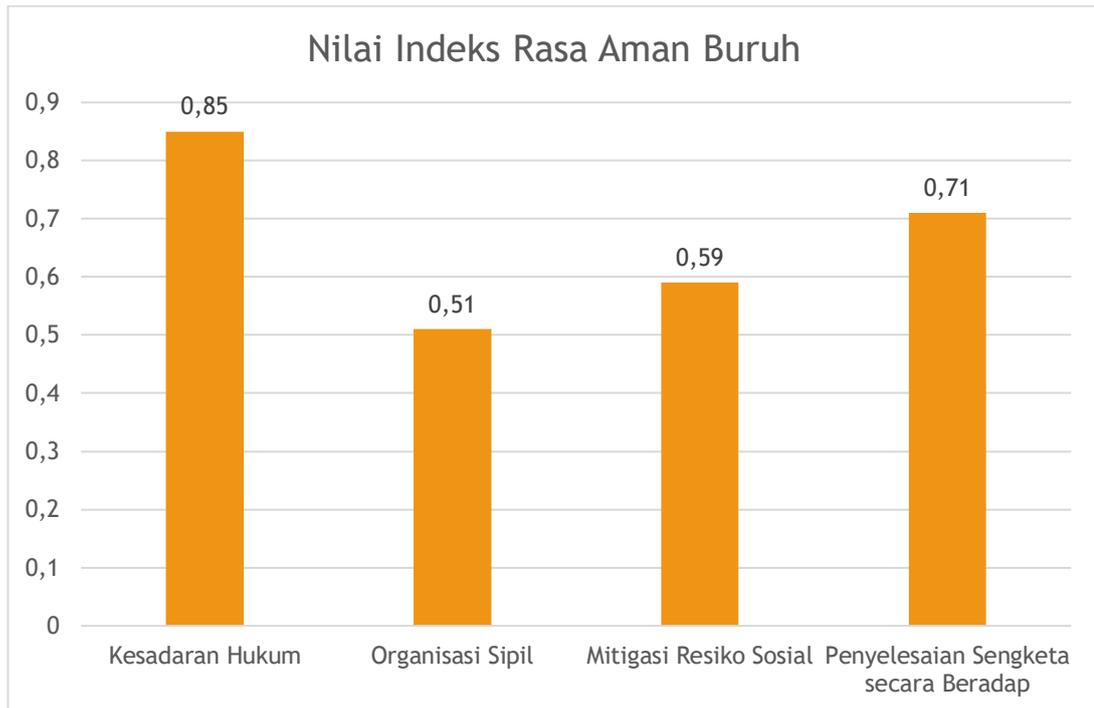
Gambar 4. 35 Nilai Indeks Toleransi Wiraswasta

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa nilai indeks toleransi yang paling rendah yang kedua diraih oleh responden dengan profesi wiraswasta. Dari keempat indikator dari variabel toleransi, yang memperoleh nilai indeks tertinggi adalah indikator kesetaraan gender yaitu sebesar 0,79 yang kemudian diikuti oleh indikator penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya yaitu sebesar 0,73 dan dilanjut oleh indikator dukungan sosial pada minoritas yaitu sebesar 0,76 serta yang terakhir yaitu indikator inklusi pada minoritas dengan nilai indeks sebesar 0,66. Capaian nilai variabel dari indeks toleransi pada responden dengan profesi wiraswasta tersebut termasuk pada kategori B (Baik). Hal diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang berprofesi sebagai wiraswasta juga masih memiliki pemahaman terhadap perbedaan sosial budaya, inklusi pada minoritas, kesetaraan gender, dan dukungan sosial pada minoritas yang baik meskipun nilai indeks toleransi pada kelompok pekerjaan ini memiliki capaian yang terendah diantara kelompok pekerjaan lainnya.

Pemahaman masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan pekerjaan/profesi yang memiliki capaian tertinggi dalam hal toleransi (pelajar/ mahasiswa) dan yang memiliki capaian terendah dalam hal toleransi (buruh dan wiraswasta) dalam kesetaraan gender, dukungan sosial terhadap minoritas, penerimaan terhadap perbedaan

sosial budaya, dan inklusi pada minoritas sudah bukan menjadi isu yang menjadi hambatan pada tingkat toleransi kehidupan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Tingkat toleransi merefleksikan pemahaman dan cara bersikap masyarakat dalam kehidupan sosial masyarakat yang heterogen dan multikultural. Untuk nilai indeks rasa aman pada pekerjaan responden, yang memperoleh nilai tertinggi yaitu responden dengan profesi buruh dan pegawai pemerintah, secara rinci datanya tersaji pada grafik berikut:

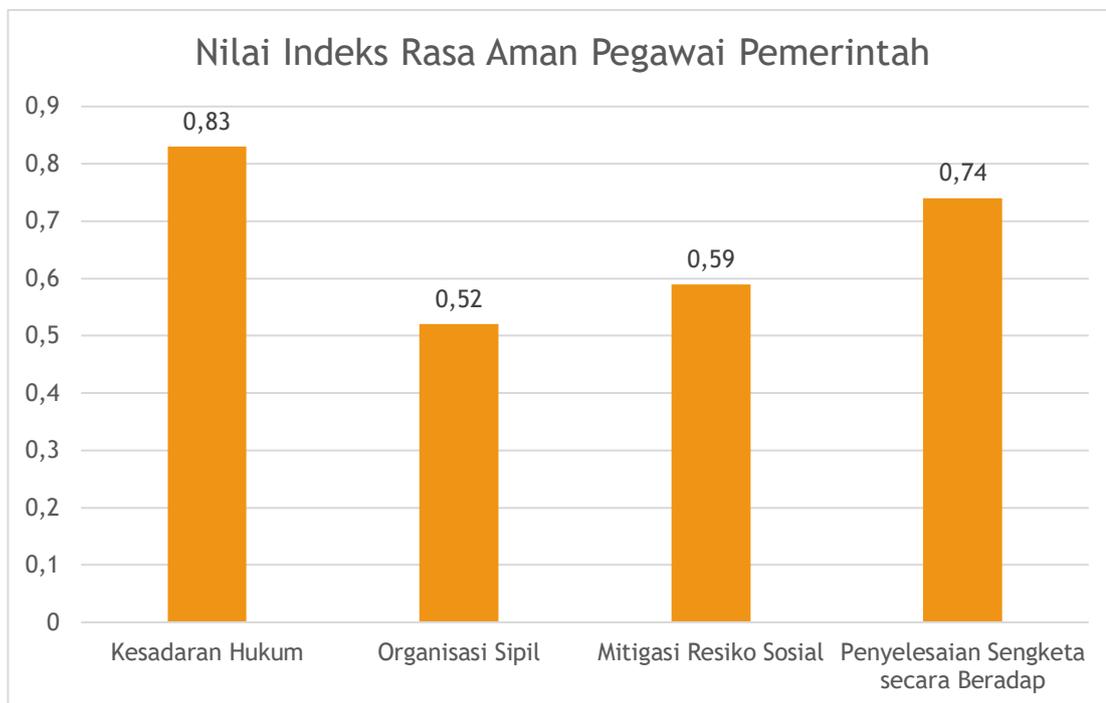


Gambar 4. 36 Nilai Indeks Rasa Aman Buruh

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa nilai indeks rasa aman yang paling tinggi yang pertama diraih oleh responden dengan profesi buruh. Dari keempat indikator dari variabel rasa aman, yang memperoleh nilai indeks tertinggi adalah indikator kesadaran hukum yaitu sebesar 0,85 yang kemudian diikuti oleh indikator penyelesaian sengketa secara beradab yaitu sebesar 0,71 dan dilanjut oleh indikator mitigasi resiko sosial yaitu sebesar 0,59 serta yang terakhir yaitu indikator organisasi sipil dengan nilai indeks sebesar 0,51. Capaian nilai variabel dari indeks rasa aman pada responden dengan profesi buruh tersebut termasuk pada kategori B (Baik) kecuali 2 indikator yaitu organisasi sipil dan mitigasi resiko sosial yang termasuk kategori C (Kurang Baik). Hal diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang berprofesi sebagai buruh memiliki kesadaran hukum dan penyelesaian sengketa secara beradab yang baik. Namun dalam hal organisasi sipil dan mitigasi resiko sosial masih kurang baik.

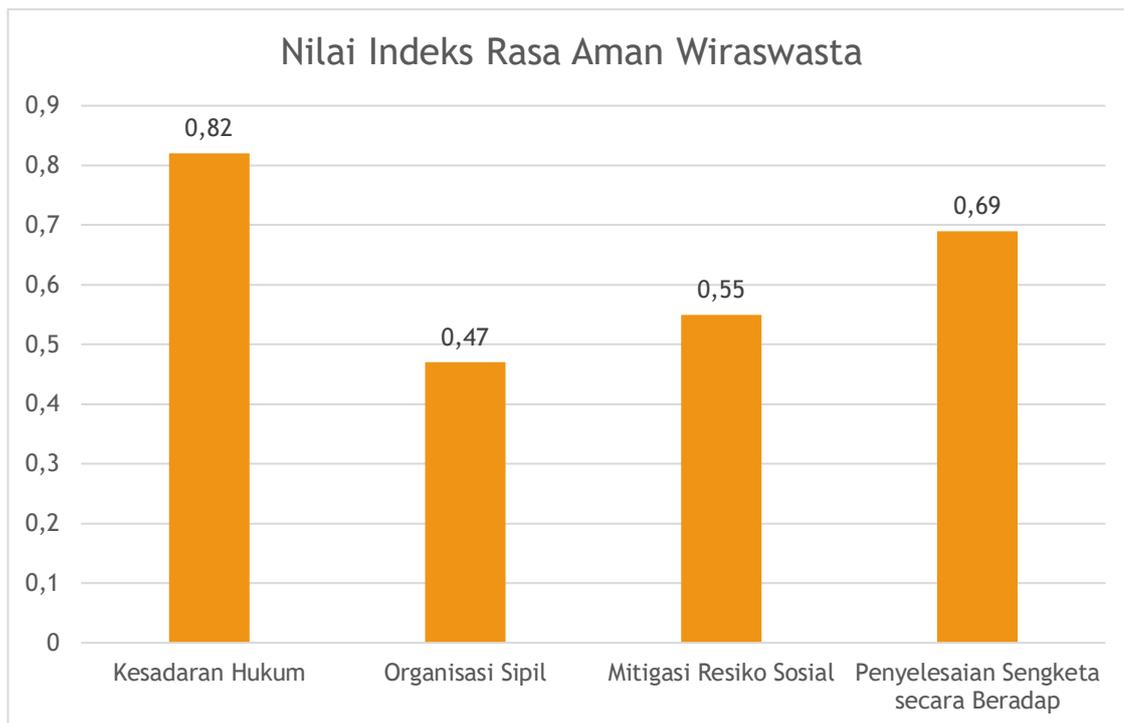
Selanjutnya untuk nilai indeks rasa aman yang paling tinggi berikutnya yaitu responden dengan profesi pegawai pemerintah, secara rinci datanya tersaji pada grafik berikut:



Gambar 4. 37 Nilai Indeks Rasa Aman Pegawai Pemerintah

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa nilai indeks rasa aman yang paling tinggi yang kedua diraih oleh responden dengan profesi pegawai pemerintah. Dari keempat indikator dari variabel rasa aman, yang memperoleh nilai indeks tertinggi adalah indikator kesadaran hukum yaitu sebesar 0,83 yang kemudian diikuti oleh indikator penyelesaian sengketa secara beradab yaitu sebesar 0,74 dan dilanjut oleh indikator mitigasi resiko sosial yaitu sebesar 0,59 serta yang terakhir yaitu indikator organisasi sipil dengan nilai indeks sebesar 0,52. Capaian nilai variabel dari indeks rasa aman pada responden dengan profesi pegawai pemerintah tersebut termasuk pada kategori B (Baik) kecuali 2 indikator yaitu organisasi sipil dan mitigasi resiko sosial yang termasuk kategori C (Kurang Baik). Hal diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang berprofesi sebagai pegawai pemerintah memiliki kesadaran hukum dan penyelesaian sengketa secara beradab yang baik. Namun dalam hal organisasi sipil dan mitigasi resiko sosial masih kurang baik. Sementara itu, nilai indeks rasa aman berdasarkan pekerjaan responden yang paling rendah diraih oleh responden dengan profesi wiraswasta dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 4. 38 Nilai Indeks Rasa Aman Wiraswasta

Sumber: Data primer diolah, 2019

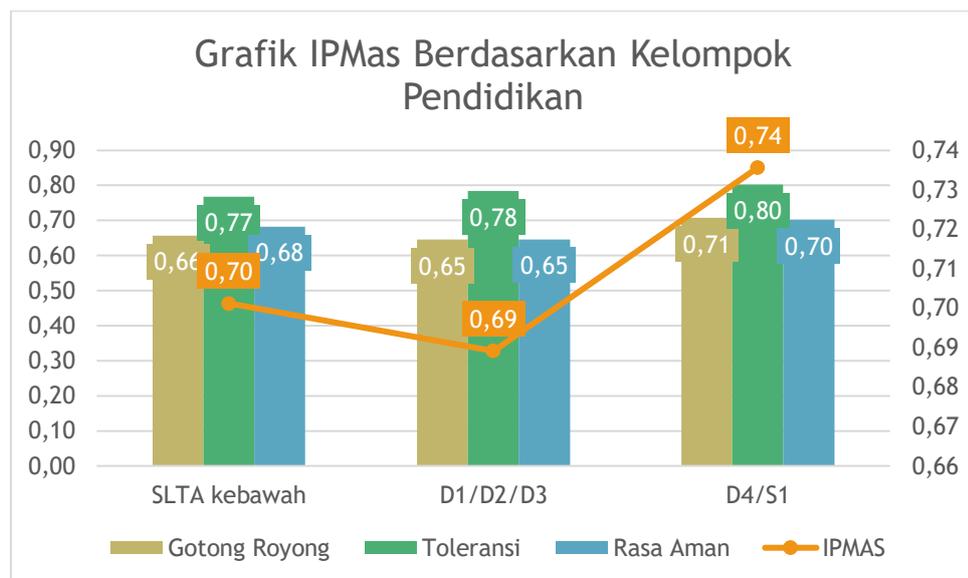
Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa nilai indeks rasa aman yang paling rendah diraih oleh responden dengan profesi wiraswasta. Dari keempat indikator dari variabel rasa aman, yang memperoleh nilai indeks tertinggi adalah indikator kesadaran hukum yaitu sebesar 0,82 yang kemudian diikuti oleh indikator penyelesaian sengketa secara beradab yaitu sebesar 0,69 dan dilanjut oleh indikator mitigasi resiko sosial yaitu sebesar 0,55 serta yang terakhir yaitu indikator organisasi sipil dengan nilai indeks sebesar 0,47. Capaian nilai variabel dari indeks rasa aman pada responden dengan profesi wiraswasta tersebut termasuk pada kategori B (Baik) kecuali 2 indikator yaitu organisasi sipil dan mitigasi resiko sosial yang termasuk kategori C (Kurang Baik). Hasil diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang berprofesi sebagai wiraswasta memiliki kesadaran hukum dan penyelesaian sengketa secara beradap yang baik meski responden yang berprofesi sebagai wiraswasta ini merupakan kelompok dengan capaian indeks rasa aman yang terendah. Namun dalam hal organisasi sipil dan mitigasi resiko sosial masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang berprofesi sebagai wiraswasta memiliki capaian yang kurang baik.

Tingkat rasa aman masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat baik itu masyarakat yang berprofesi sebagai buruh (yang memiliki capaian rasa aman tertinggi) maupun masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai pemerintah dan wiraswasta (yang memiliki capaian rasa aman terendah) dalam hal mitigasi resiko sosial dan organisasi sipil masih cenderung lemah. Hal tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan masyarakat

terkait tanda-tanda atau peringatan untuk mengatasi kejadian darurat bencana alam di lingkungan tempat tinggal juga masih kurang. Selain itu tidak adanya pelatihan atau simulasi terhadap penyelamatan bencana alam dalam tiga tahun terakhir. Rendahnya capaian indikator organisasi sipil dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat dalam organisasi massa maupun politik hanya sebagian kecil. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam organisasi massa disebabkan preferensi masyarakat berdasarkan struktur demografi masyarakat seperti pekerjaan/ profesi responden yang mempengaruhi pemahaman dan kecenderungan aktivitas.

C. Kelompok Pendidikan

Dalam survey indeks pembangunan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 ini terdapat 3 (tiga) variabel diantaranya yaitu gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Pada pembahasan kali ini, variabel-variabel tersebut akan dilihat melalui Kelompok jenjang pendidikan pada responden yang ada. Selanjutnya ketiga variabel tersebut akan dibandingkan dengan nilai IPMas pada masing-masing jenjang pendidikan responden. Berikut adalah grafik IPMas berdasarkan Kelompok pendidikan responden:



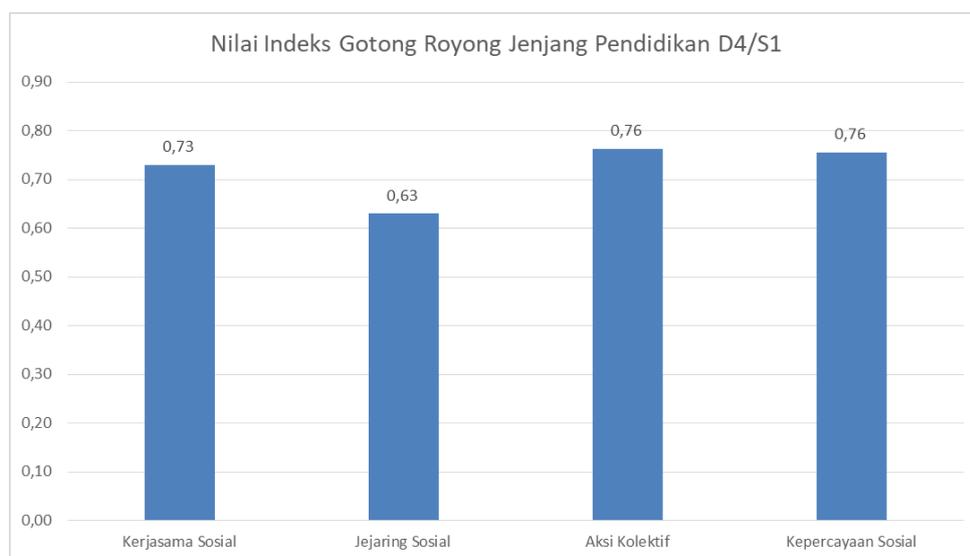
Gambar 4. 39 Grafik IPMas Berdasarkan Kelompok Pendidikan

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa nilai IPMas tertinggi berdasarkan Kelompok pendidikan yaitu pada responden yang memiliki jenjang pendidikan diploma 4 atau sarjana (D4/S1) dengan nilai IPMas 0,74. Sementara nilai IPMas terendah berdasarkan Kelompok pendidikan yaitu pada responden yang memiliki jenjang pendidikan Diploma (D1/D2/D3) dengan nilai IPMas 0,69. Nilai IPMas pada dua jenjang pendidikan tersebut masuk pada kategori Baik (B) yaitu pada rentang nilai 0,63 – 0,81. Selain melihat dari nilai IPMas, juga terdapat 3 variabel pembentuk IPMas yaitu

gotong royong, toleransi, dan rasa aman yang disajikan dalam grafik diatas. Untuk variabel gotong royong nilai tertinggi yaitu pada responden yang memiliki jenjang pendidikan sarjana/ diploma 4 (S1/D4) dengan nilai gotong royong 0,71 dan termasuk pada kategori Baik (B), sementara nilai terendah diraih oleh responden dengan tingkat pendidikan diploma (D1/D2/D3) dengan nilai gotong royong 0,65, tetapi masih termasuk pada kategori Baik (B). Selanjutnya untuk variabel toleransi nilai tertinggi yaitu pada responden yang memiliki jenjang pendidikan sarjana/ diploma 4 (S1/D4) dengan nilai toleransi 0,80 dan termasuk pada kategori Baik (B), sedangkan nilai terendah yaitu pada responden yang memiliki jenjang pendidikan SLTA kebawah dengan nilai toleransi 0,77, tetapi masih termasuk pada kategori Baik (B). Dan untuk variabel rasa aman nilai tertinggi yaitu pada responden yang memiliki jenjang pendidikan sarjana/ diploma 4 (S1/D4) dengan nilai rasa aman 0,70 dan termasuk pada kategori Baik (B), sedangkan nilai terendah diraih oleh responden dengan tingkat pendidikan diploma (D1/D2/D3) dengan nilai rasa aman 0,65 dan tetapi masih termasuk pada kategori Baik (B).

Berikut merupakan grafik dan penjelasan mengenai nilai indikator pada tiap-tiap variabel tertinggi dan terendah berdasarkan jenjang pendidikan:

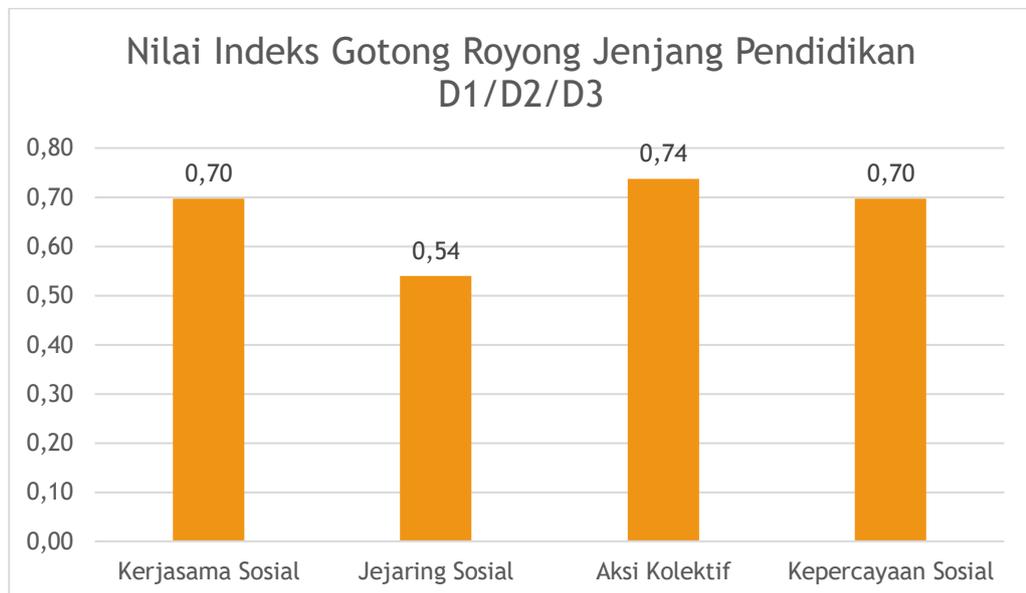


Gambar 4. 40 Nilai Indeks Gotong Royong Jenjang Pendidikan D4/S1

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan penjelasan sebelumnya terlihat bahwa nilai indeks gotong royong yang paling tinggi yaitu pada responden yang memiliki jenjang pendidikan sarjana/diploma 4 (S1/D4) sebesar 0,71. Dari keempat indikator dari variabel gotong royong, yang memperoleh nilai indeks tertinggi adalah indikator aksi kolektif dan kepercayaan sosial yaitu sebesar 0,76 yang kemudian diikuti oleh nilai indikator

kerjasama sosial yaitu sebesar 0,73 dan yang terakhir yaitu indikator jejaring sosial dengan nilai indeks terkecil yaitu sebesar 0,63. Capaian keseluruhan nilai indikator dari indeks gotong royong pada jenjang pendidikan Sarjana/Diploma 4 (S1/D4) tersebut termasuk pada kategori Baik (B) yaitu pada rentang nilai 0,63-0,81. Sementara itu, nilai indeks gotong royong berdasarkan jenjang pendidikan yang paling rendah diraih oleh tingkat pendidikan Diploma (D1/D2/D3) yaitu sebesar 0,65 dengan rincian nilai indikator sebagai berikut:

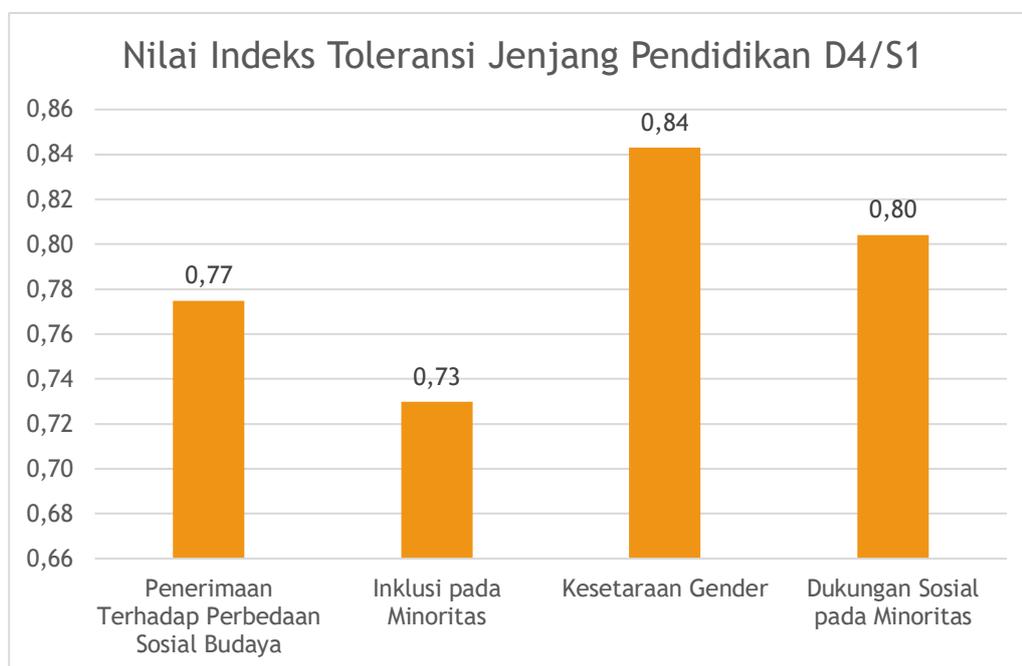


Gambar 4. 41 Nilai Indeks Gotong Royong Jenjang Pendidikan Diploma (D1/D2/D3)

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa dari keempat indikator pada variabel gotong royong yang memiliki nilai tertinggi adalah indikator aksi kolektif yaitu sebesar 0,74 kemudian diikuti oleh indikator kerjasama sosial dan kepercayaan sosial yaitu sebesar 0,70 dan yang terakhir indikator jejaring sosial dengan nilai terendah yaitu sebesar 0,54. Capaian nilai variabel dari indeks gotong royong pada jenjang pendidikan Diploma (D1/D2/D3) termasuk pada kategori Baik (B) kecuali 1 variabel yaitu Jejaring Sosial dengan nilai 0,54 yang masuk pada kategori Kurang Baik (C). Selanjutnya nilai indeks toleransi pada jenjang pendidikan, yang memperoleh nilai tertinggi yaitu pada

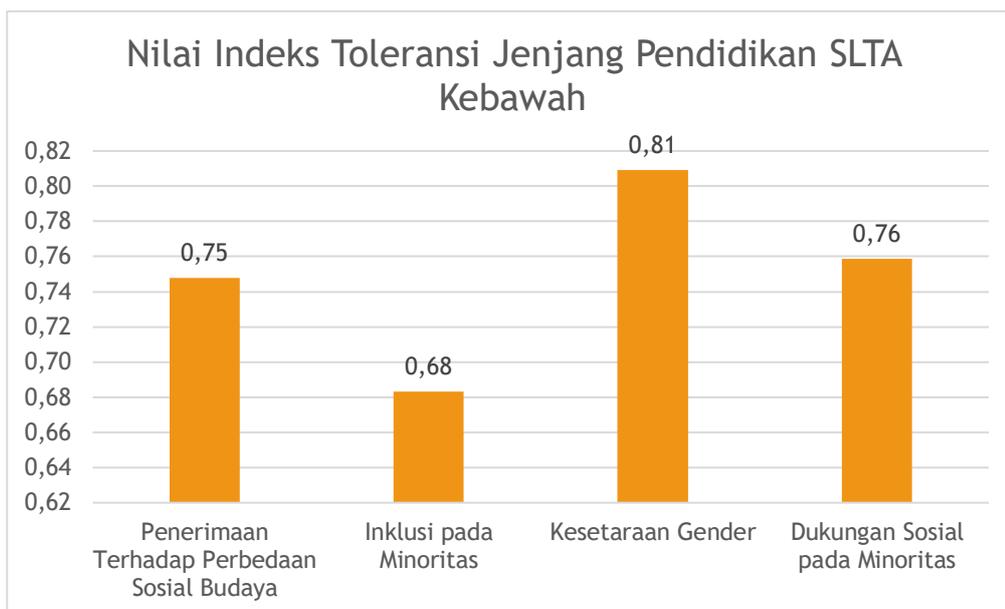
jenjang pendidikan D4/S1 dengan nilai 0,80, secara rinci datanya tersaji pada grafik berikut:



Gambar 4. 42 Nilai Indeks Toleransi Jenjang Pendidikan D4/S1

Sumber: Data primer diolah, 2019

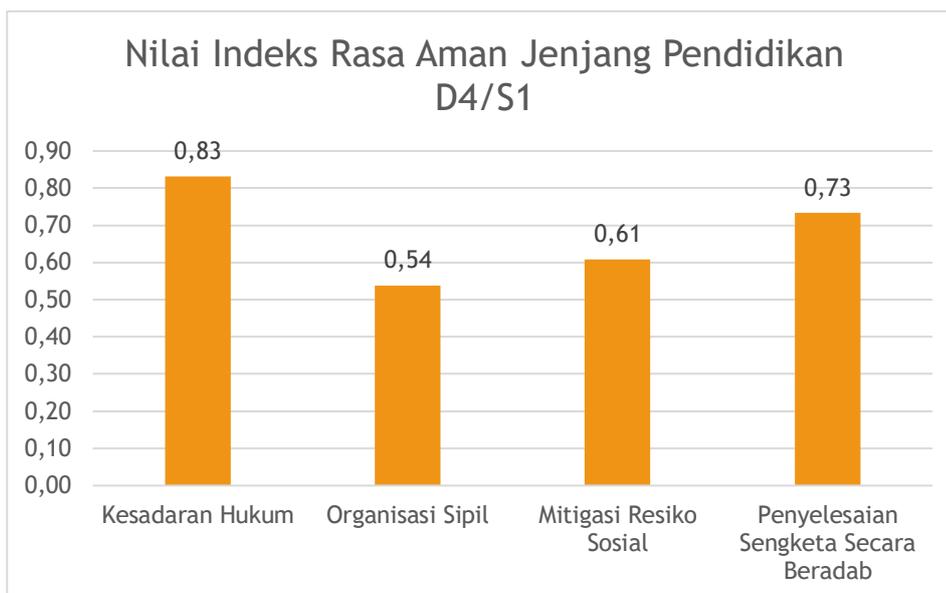
Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa indikator pada indeks toleransi di jenjang pendidikan D4/S1 yang memiliki nilai tertinggi adalah indikator kesetaraan gender yaitu sebesar 0,84 kemudian diikuti oleh indikator dukungan sosial pada minoritas yaitu sebesar 0,80 dan dilanjut oleh indikator penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya yaitu sebesar 0,77 serta terakhir yaitu indikator inklusi pada minoritas dengan nilai terendah yaitu sebesar 0,73. Dapat disimpulkan bahwa capaian keseluruhan nilai indikator dari indeks toleransi pada jenjang pendidikan D4/S1 termasuk pada kategori Baik (B). Sementara nilai terendah pada indeks toleransi berdasarkan jenjang pendidikan yaitu pada responden dengan jenjang pendidikan SLTA kebawah yaitu sebesar 0,77 yang secara rinci tersaji pada grafik berikut:



Gambar 4. 43 Nilai Indeks Toleransi Jenjang Pendidikan SLTA Kebawah

Sumber: Data primer diolah, 2019

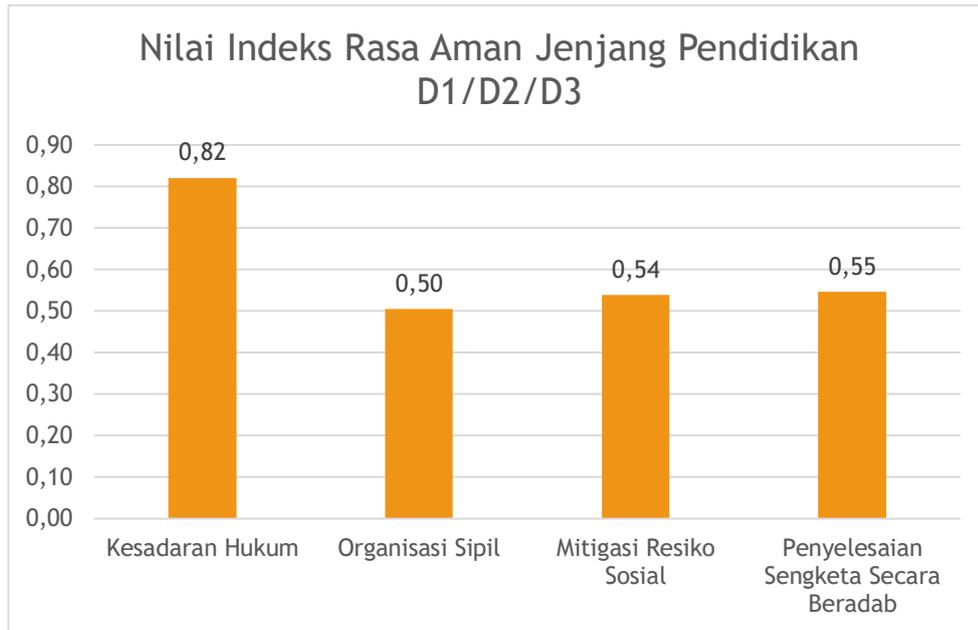
Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa indikator dari indeks toleransi pada jenjang pendidikan SLTA kebawah yang memiliki nilai tertinggi adalah indikator kesetaraan gender sebesar 0,81 dan disusul oleh indikator dukungan sosial pada minoritas sebesar 0,76 kemudian dilanjut oleh indikator penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya sebesar 0,75 serta yang terakhir adalah indikator inklusi pada minoritas dengan nilai terendah yaitu sebesar 0,68. Dapat disimpulkan bahwa capaian keseluruhan nilai indikator dari indeks toleransi pada jenjang pendidikan SLTA kebawah termasuk pada kategori Baik (B). Selanjutnya pada nilai indeks rasa aman berdasarkan jenjang pendidikan, yang memperoleh nilai tertinggi yaitu pada tingkat pendidikan D4/S1 yaitu sebesar 0,70 dan secara rinci datanya tersaji pada grafik berikut:



Gambar 4. 44 Nilai Indeks Rasa Aman Jenjang Pendidikan D4/S1

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa indikator dari indeks rasa aman pada jenjang pendidikan D4/S1 yang memiliki nilai tertinggi adalah indikator kesadaran hukum sebesar 0,83 kemudian dilanjut oleh indikator penyelesaian sengketa secara beradab sebesar 0,73 dan dilanjut oleh indikator mitigasi resiko sosial sebesar 0,61 serta yang terakhir indikator organisasi sipil sebesar 0,54. Capaian nilai 2 indikator dari indeks rasa aman pada jenjang pendidikan D4/S1 termasuk pada kategori Baik (B) yaitu indikator kesadaran hukum dan indikator penyelesaian sengketa secara beradab. Akan tetapi capaian nilai pada 2 indikator lainnya yaitu Organisasi Sipil dengan nilai 0,54 dan Mitigasi Resiko Sosial dengan nilai 0,61 termasuk pada kategori Kurang Baik (C). Sementara nilai terendah indeks rasa aman pada jenjang pendidikan diraih oleh tingkat D1/D2/D3 sebesar 0,65 yang secara rinci datanya terlihat pada grafik berikut:



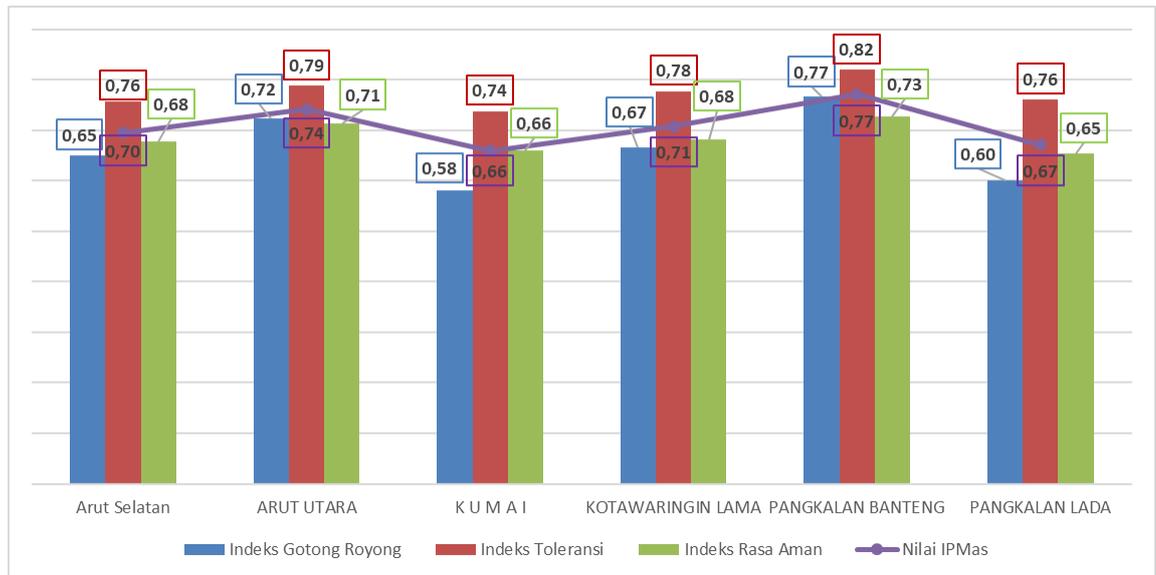
Gambar 4. 45 Nilai Indeks Rasa Aman Jenjang Pendidikan D1/D2/D3

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa indikator dari indeks rasa aman pada jenjang pendidikan D1/D2/D3 yang memiliki nilai tertinggi adalah indikator kesadaran hukum sebesar 0,82 kemudian dilanjut oleh indikator penyelesaian sengketa secara beradab sebesar 0,55 dan diikuti oleh indikator mitigasi resiko sosial sebesar 0,54 serta yang terakhir yaitu indikator organisasi sipil dengan nilai terendah sebesar 0,50. Capaian nilai variabel dari indikator rasa aman pada jenjang pendidikan D1/D2/D3 termasuk pada kategori Kurang Baik (C) kecuali 1 indikator yaitu Kesadaran Hukum dengan nilai 0,82 yang termasuk pada kategori Baik (B).

4.3.3. Analisis Data Indeks Pembangunan Masyarakat Berdasarkan Kecamatan

Berdasarkan hasil nilai Indeks Pembangunan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya adalah melihat nilai IPMAS berdasarkan kecamatan. Adapun hasil nilai IPMAS perkecamatan adalah sebagai berikut:

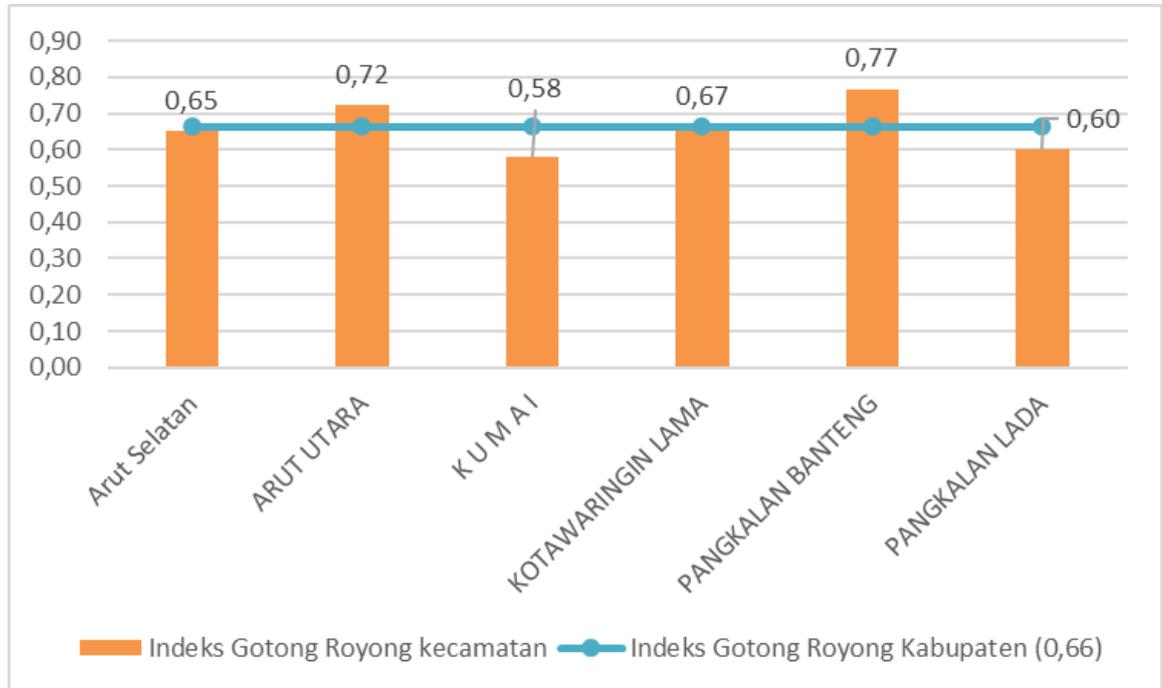


Gambar 4. 46. Nilai IPMas Setiap Kecamatan

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa nilai IPMas seluruh kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai nilai IPMas dengan kategori “Baik” (0,63-0,81). Adapun bila disandingkan dengan nilai IPMas Kabupaten, maka diketahui bahwa terdapat 2 kecamatan dibawah nilai IPMas Kabupaten yaitu kecamatan Kumai dan kecamatan Pangkalan Lada. Terdapat 1 kecamatan mempunyai nilai IPMas sama dengan nilai IPMas Kabupaten yaitu kecamatan Arut Selatan dan terdapat 3 kecamatan yang mempunyai nilai IPMas di atas nilai IPMas Kabupaten yaitu kecamatan Arut Utara, kecamatan Kotawaringin Lama, dan kecamatan Pangkalan Banteng. Adapun kecamatan dengan nilai IPMas tertinggi adalah kecamatan Pangkalan Banteng dengan masing-masing mempunyai nilai IPMas 0,77. Bila dilihat secara keseluruhan pada ketiga indeks pembentuk Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) diketahui bahwa terdapat 2 Indeks pembentuk IPMas yang mempunyai nilai terendah yaitu Indeks Gotong Royong dan Indeks Rasa Aman.

A. Indeks Gotong Royong

Nilai Indeks Gotong Royong setiap kecamatan di kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:



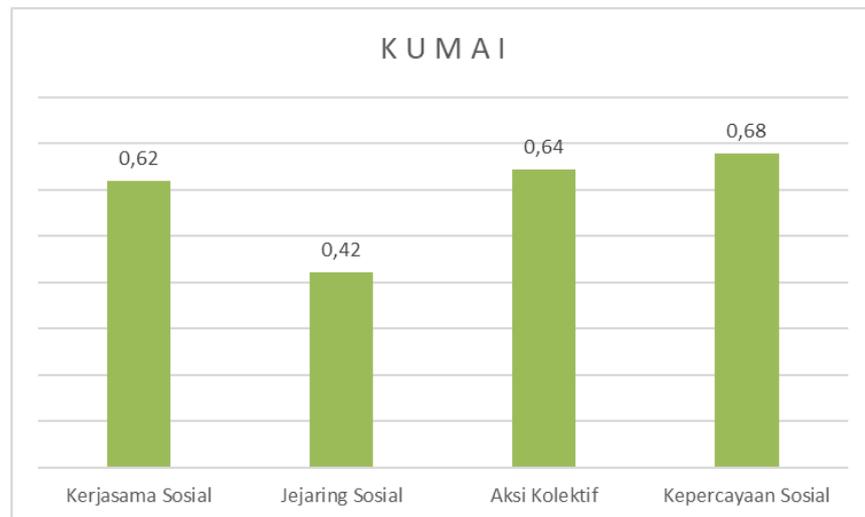
Gambar 4. 47. Indeks Gotong Royong Setiap Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019

Berdasarkan gambar di atas, nilai Indeks Gotong Royong setiap kecamatan diketahui bahwa terdapat 2 kecamatan yang mempunyai nilai Indeks Gotong Royong dengan kategori “**Kurang Baik**” (0,44 – 0,62) yaitu kecamatan Kumai dengan nilai 0,58 dan kecamatan Pangkalan Lada dengan nilai 0,60. Terdapat 4 kecamatan dengan kategori “**Baik**” (0,63–0,81) yaitu kecamatan Arut Selatan, kecamatan Arut Utara, kecamatan Kotawaringin Lama, dan kecamatan Pangkalan Banteng. Kecamatan dengan nilai Indeks Gotong Royong **tertinggi** adalah kecamatan Pangkalan Banteng dengan nilai Indeks Gotong Royong sebesar 0,77. Sedangkan kecamatan nilai Indeks Gotong Royong **terendah** adalah kecamatan Kumai dengan nilai Indeks Gotong Royong sebesar 0,58.

Adapun bila disandingkan dengan nilai Indeks Gotong Royong Kabupaten, maka diketahui bahwa terdapat 3 kecamatan yang mempunyai nilai Indeks Gotong Royong di bawah kabupaten yaitu kecamatan Arut Selatan, kecamatan Kumai, dan Kecamatan Pangkalan Lada. Selain itu, 3 kecamatan lainnya mempunyai nilai Indeks Gotong Royong di atas kabupaten yaitu kecamatan Arut Utara, kecamatan Kotawaringin Lama, dan kecamatan Pangkalan Banteng.

Pada kecamatan yang memiliki kategori “Kurang Baik” (0,44 – 0,62) terkait indeks gotong royong yaitu kecamatan Kumai dengan nilai 0,58 dan kecamatan Pangkalan Lada dengan nilai 0,60 maka selanjutnya kita analisa terkait indikator dari Indeks Gotong Royong Kecamatan tersebut guna mengetahui indikator mana yang mempunyai nilai terendah sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Gotong Royong kecamatan tersebut. Berikut nilai indikator Indeks Gotong Royong pada Kecamatan Kumai dan Kecamatan Pangkalan lada:

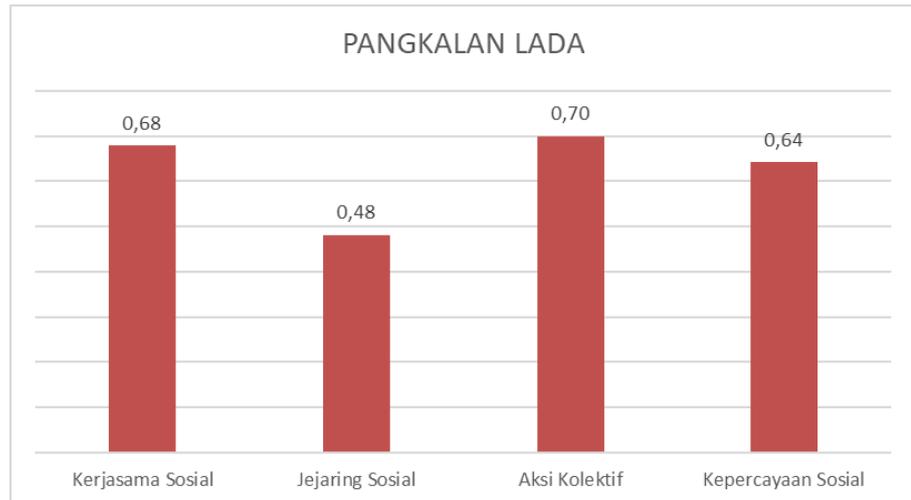
1. Pada Kecamatan Kumai adapun bila dilihat pada indikator yang mempengaruhi nilai Indeks Gotong Royong adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 48. Indikator Indeks Gotong Royong Kecamatan Kumai

Berdasarkan nilai dari indikator Indeks Gotong Royong pada Kecamatan Kumai diketahui bahwa dari empat indikator tersebut terdapat 2 indikator yang memiliki nilai **terendah** dan masuk dalam kategori “**Kurang Baik**” yaitu indikator Kerjasama Sosial dan indikator Jejaring Sosial. Sehingga dalam upaya peningkatan Indeks Gotong Royong di Kecamatan Kumai maka perlunya perbaikan pada segi Kerjasama Sosial dan Jejaring Sosial.

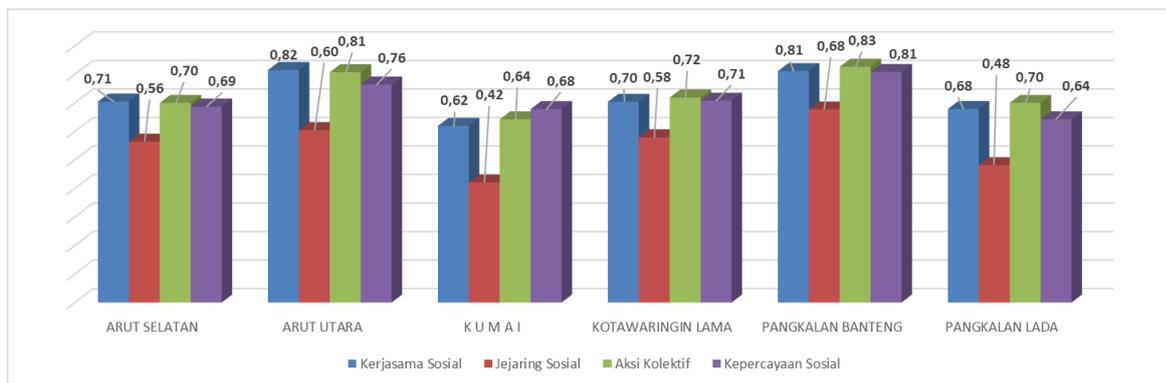
2. Pada Pangkalan Lada adapun bila dilihat pada indikator yang mempengaruhi nilai Indeks Gotong Royong adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 49. Indikator Indeks Gotong Royong Kecamatan Pangkalan Lada

Berdasarkan nilai dari indikator Indeks Gotong Royong pada Kecamatan Pangkalan Lada diketahui bahwa dari empat indikator tersebut terdapat 1 indikator yang memiliki nilai terendah dan masuk dalam kategori “Kurang Baik” yaitu indikator Jejaring Sosial. Sehingga dalam upaya peningkatan Indeks Gotong Royong di Kecamatan Pangkalan Lada maka perlunya perbaikan pada segi Kerjasama Sosial dan Jejaring Sosial.

Berdasarkan nilai Indikator Indeks Gotong Royong di dua kecamatan yang memiliki nilai Indeks Gotong Royong terendah diketahui bahwa indikator Indeks Gotong Royong yang memiliki nilai terendah adalah **Indikator Jejaring Sosial**. Selain itu, nilai Indikator Jejaring Sosial pada kedua kecamatan tersebut masuk dalam kategori “**Kurang Baik**” (0,44 - 0,62). Selanjutnya adalah mengetahui indikator pada Indeks Gotong Royong setiap kecamatan guna melihat indikator mana yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya hasil dari variabel Indeks Gotong Royong di kecamatan tersebut. Adapun nilai indikator Indeks Gotong Royong setiap kecamatan adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 50. Indikator Indeks Gotong Royong Setiap Kecamatan

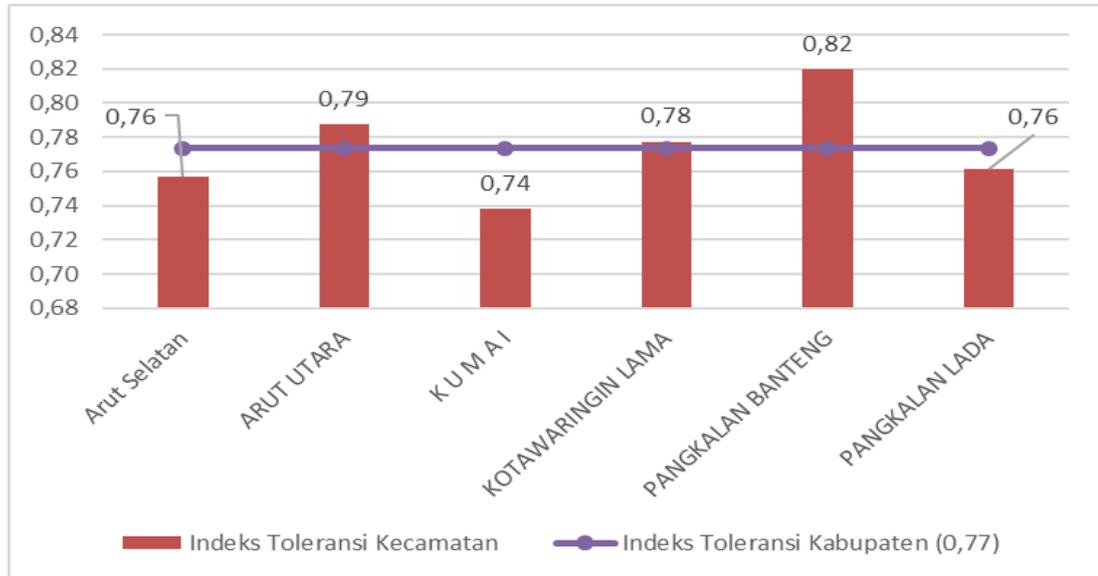
Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa Pada nilai Indikator Indeks Gotong Royong pada setiap kecamatan, terdapat beberapa indikator masuk dalam beberapa kategori adalah sebagai berikut:

- Kategori **“Tidak Baik” (0,25-0,43)** yaitu Indikator Jejaring Sosial pada Kecamatan Kumai (0,42).
- Kategori **“Kurang Baik” (0,44 - 0,62)** yaitu: Indikator Jejaring Sosial Pada Kecamatan Arut Selatan (0,56); Indikator Jejaring Sosial Pada Kecamatan Arut Utara (0,60); Indikator Kerjasama Sosial pada kecamatan Kumai (0,62); Indikator Jejaring Sosial pada Kecamatan Kotawaringin Lama (0,58); Indikator Jejaring Sosial pada Kecamatan Pangkalan Lada (0,48).
- Kategori **“Sangat Baik” (0,82-1)** yaitu Indikator kerjasama Sosial pada Kecamatan Arut Utara (0,82) dan Indikator Aksi Kolektif pada Kecamatan Pangkalan Banteng (0,83).
- Selebihnya adalah kategori **“Baik” (0,63-0,81)**

Dari seluruh indikator Indeks Gotong Royong tersebut, diketahui bahwa seluruh kecamatan mempunyai nilai indikator terendah yaitu pada **Indikator Jejaring Sosial**. Selain itu, 5 kecamatan pada Indikator Jejaring Sosial memiliki nilai yang masuk dalam kategori **“Kurang Baik” (0,44 - 0,62)** yaitu Kecamatan Arut Selatan (0,56); Kecamatan Arut Utara (0,60); Kecamatan Kumai (0,62); Kecamatan Kotawaringin Lama (0,58); dan Kecamatan Pangkalan Lada (0,48).

B. Indeks Toleransi

Nilai Indeks Toleransi setiap kecamatan di kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 51. Indeks Toleransi Setiap Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019

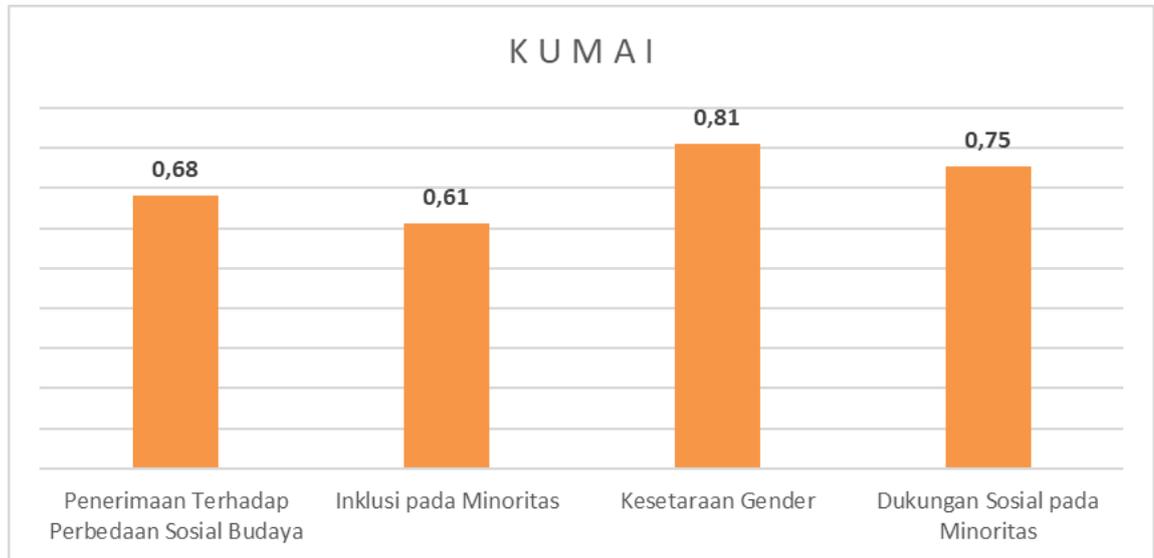
Berdasarkan gambar di atas, nilai Indeks Toleransi setiap kecamatan diketahui bahwa terdapat 1 kecamatan yang mempunyai nilai Indeks Toleransi dengan kategori “**Sangat Baik**” (0,82 – 1) yaitu kecamatan Pangkalan Banteng dengan nilai 0,82. Terdapat 5 kecamatan dengan kategori “**Baik**” (0,63-0,81) yaitu kecamatan Arut Selatan, kecamatan Arut Utara, kecamatan Kumai, kecamatan Kotawaringin Lama, dan kecamatan Pangkalan Lada. Kecamatan dengan nilai Indeks Toleransi **tertinggi** adalah kecamatan Pangkalan Banteng dengan nilai Indeks Toleransi sebesar 0,82. Sedangkan kecamatan nilai Indeks Toleransi **terendah** adalah kecamatan Kumai dengan nilai Indeks Toleransi sebesar 0,74.

Adapun bila disandingkan dengan nilai Indeks Toleransi Kabupaten, maka diketahui bahwa terdapat 3 kecamatan yang mempunyai nilai Indeks Toleransi di bawah kabupaten yaitu kecamatan Arut Selatan, kecamatan Kumai, dan Kecamatan Pangkalan Lada. Selain itu, 3 kecamatan lainnya mempunyai nilai Indeks Toleransi di atas kabupaten yaitu kecamatan Arut Utara, kecamatan Kotawaringin Lama, dan kecamatan Pangkalan Banteng.

Pada kecamatan yang memiliki nilai Indeks Toleransi Terendah adalah kecamatan Kumai dengan nilai 0,74 dimana sudah masuk dalam kategori “**Baik**” (0,63-0,81). Adapun guna meningkatkan nilai Indeks Toleransi pada kecamatan tersebut, maka

selanjutnya kita analisa terkait indikator dari Indeks Toleransi Kecamatan tersebut guna mengetahui indikator mana yang mempunyai nilai terendah sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Toleransi kecamatan tersebut. Berikut nilai indikator Indeks Toleransi pada Kecamatan Kumai:

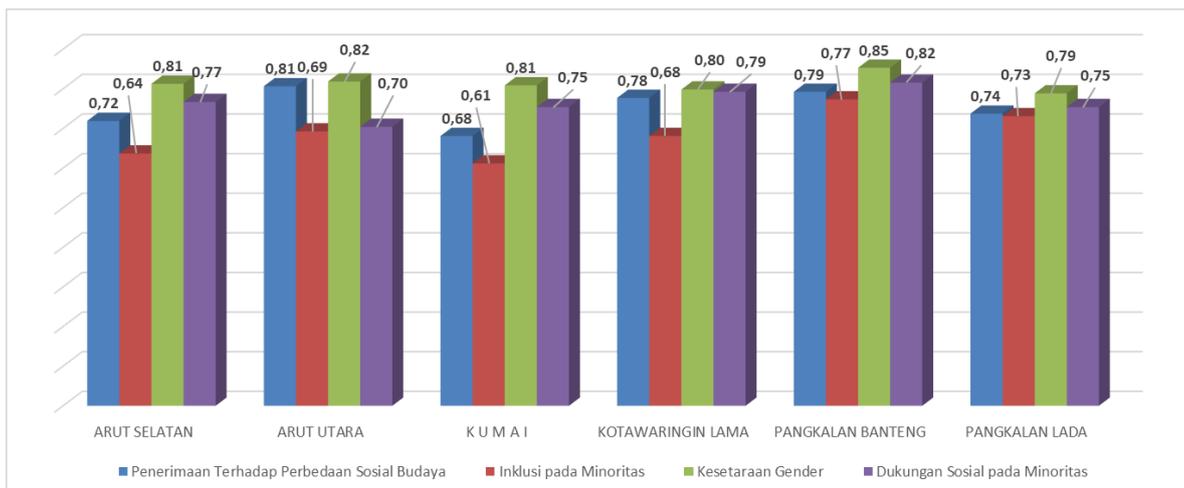
1. Pada Kecamatan Kumai adapun bila dilihat pada indikator yang mempengaruhi nilai Indeks Toleransi adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 52. Indikator Indeks Toleransi Kecamatan Kumai

Berdasarkan nilai dari indikator Indeks Toleransi pada Kecamatan Kumai diketahui bahwa dari empat indikator tersebut terdapat 1 indikator yang memiliki nilai terendah dan masuk dalam kategori “**Kurang Baik**” (0,44 - 0,62) yaitu Indikator Inklusi pada Minoritas. Sehingga dalam upaya peningkatan Indeks Toleransi di Kecamatan Kumai maka perlunya perbaikan pada segi pemberian ruang partisipasi masyarakat minoritas dalam kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan Kumai.

Selanjutnya adalah mengetahui indikator pada Indeks Toleransi setiap kecamatan guna melihat indikator mana yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya hasil dari variabel Indeks Toleransi di kecamatan tersebut. Adapun nilai indikator Indeks Toleransi setiap kecamatan adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 53. Indikator Indeks Toleransi Setiap Kecamatan

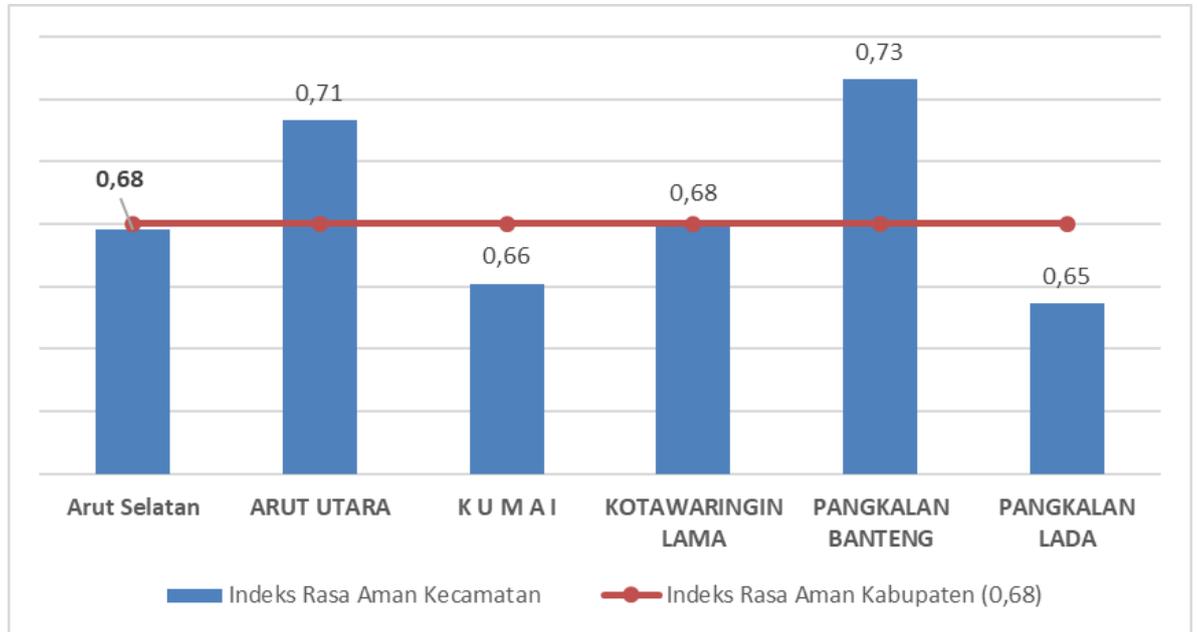
Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa Pada nilai Indikator Indeks Toleransi pada setiap kecamatan, terdapat beberapa indikator masuk dalam beberapa kategori adalah sebagai berikut:

- Kategori **“Kurang Baik” (0,44 - 0,62)** yaitu: Indikator Inklusi pada Minoritas pada kecamatan Kumai (0,61).
- Kategori **“Sangat Baik” (0,82-1)** yaitu Indikator Kesetaraan Gender (0,82) Pada Kecamatan Arut Utara, Indikator Kesetaraan Gender (0,85), & Indikator Dukungan Sosial Pada Minoritas (0,82) pada Kecamatan Pangkalan Banteng.
- Selebihnya adalah kategori **“Baik” (0,63-0,81)**.

Dari seluruh indikator Indeks Toleransi tersebut, diketahui bahwa seluruh kecamatan mempunyai nilai indikator terendah yaitu pada Indikator Inklusi pada Minoritas. Selain itu, terdapat 1 kecamatan pada Indikator Inklusi pada Minoritas memiliki nilai yang masuk dalam kategori **“Kurang Baik” (0,44 - 0,62)** yaitu Kecamatan Kumai (0,61).

C. Indeks Rasa Aman

Nilai Indeks Rasa Aman setiap kecamatan di kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 54. Indeks Rasa Aman Setiap Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019

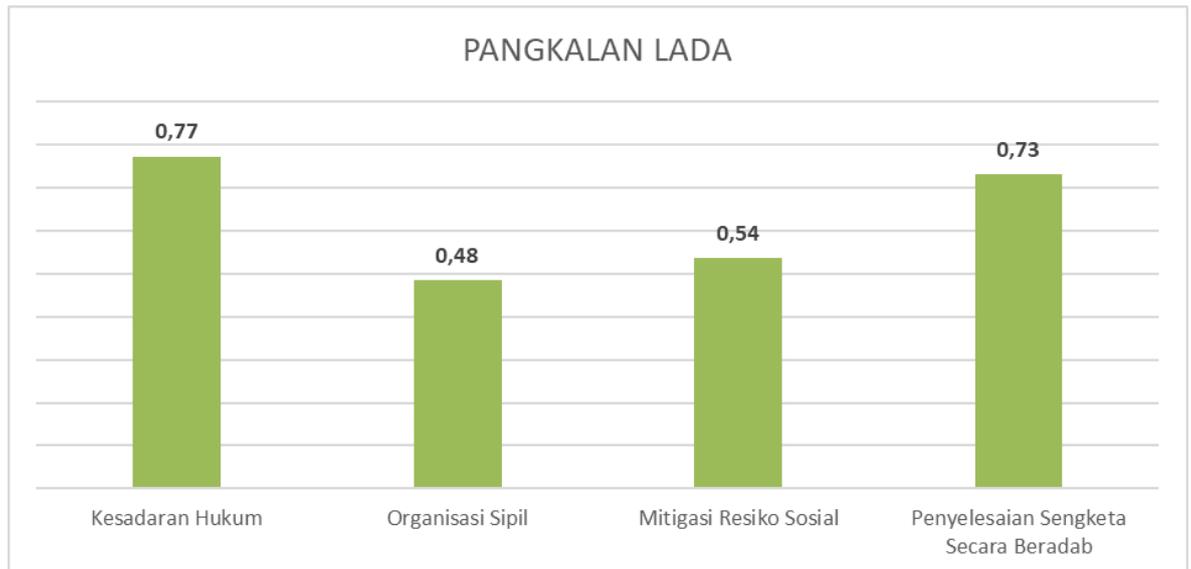
Berdasarkan gambar di atas, nilai Indeks Rasa Aman setiap kecamatan diketahui bahwa seluruh kecamatan yang mempunyai nilai Indeks Rasa Aman dengan kategori “Baik” (0,63-0,81). Kecamatan dengan nilai Indeks Rasa Aman tertinggi adalah kecamatan Pangkalan Banteng dengan nilai Indeks Rasa Aman sebesar 0,73. Sedangkan kecamatan nilai Indeks Rasa Aman terendah adalah kecamatan Kumai dengan nilai Indeks Rasa Aman sebesar 0,65.

Adapun bila disandingkan dengan nilai Indeks Rasa Aman Kabupaten, maka diketahui bahwa terdapat 2 kecamatan yang mempunyai nilai Indeks Rasa Aman di bawah kabupaten yaitu kecamatan Kumai dan Kecamatan Pangkalan Lada. Terdapat 2 kecamatan yang mempunyai nilai sama dengan kabupaten yaitu kecamatan Arut Selatan dan kecamatan Kotawaringin Lama. Selain itu, 2 kecamatan lainnya mempunyai nilai Indeks Rasa Aman di atas kabupaten yaitu kecamatan Arut Utara dan kecamatan Pangkalan Banteng.

Pada kecamatan yang memiliki nilai Indeks Rasa Aman Terendah adalah Kecamatan Pangkalan Lada dengan nilai 0,65 dan Kecamatan Kumai dengan nilai 0,66. Adapun nilai Indeks Rasa Aman dari kedua kecamatan tersebut sudah masuk dalam kategori “Baik” (0,63-0,81). Adapun guna meningkatkan nilai Indeks Rasa Aman pada

kecamatan tersebut, maka selanjutnya kita analisa terkait indikator dari Indeks Rasa Aman Kecamatan tersebut guna mengetahui indikator mana yang mempunyai nilai terendah sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Rasa Aman kecamatan tersebut. Berikut nilai indikator Rasa Aman pada Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Kumai:

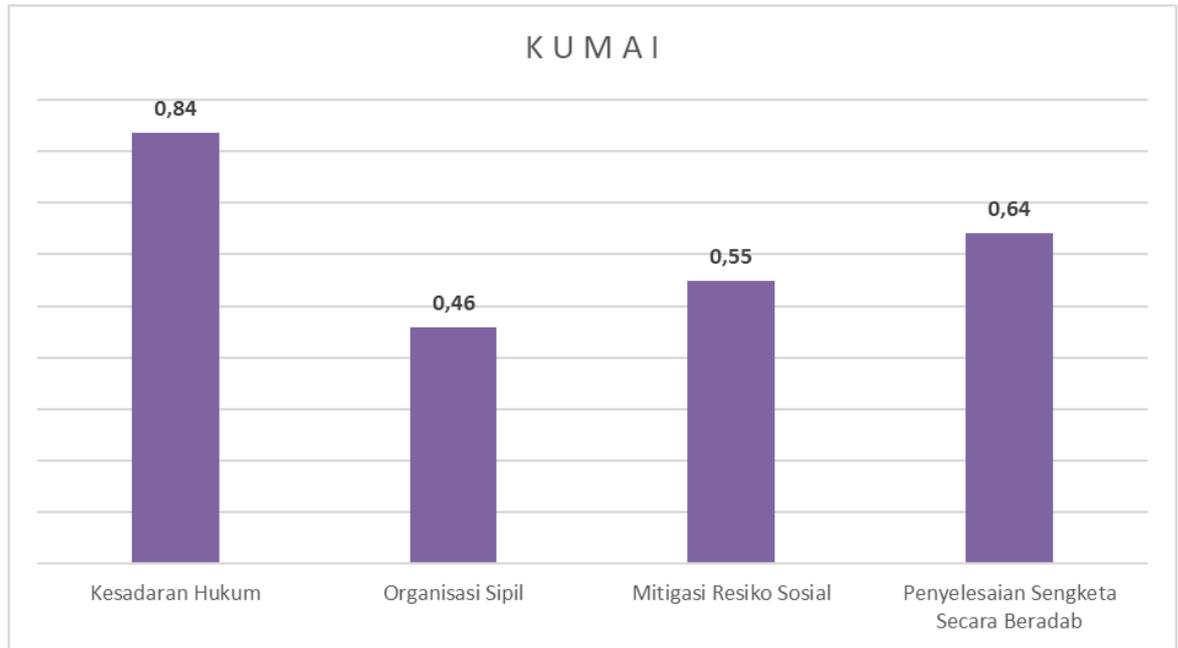
1. Pada Kecamatan Pangkal Lada adapun bila dilihat pada indikator yang mempengaruhi nilai Indeks Rasa Aman adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 55. Indikator Indeks Rasa Aman Kecamatan Pangkalan Lada

Berdasarkan nilai dari indikator Indeks Rasa Aman pada Kecamatan Pangkalan Lada diketahui bahwa dari empat indikator tersebut terdapat 2 indikator yang memiliki nilai terendah dan masuk dalam kategori **“Kurang Baik” (0,44 - 0,62)** yaitu Partisipasi Organisasi Sipil (0,48) dan Mitigasi Resiko Sosial (0,54). Sehingga dalam upaya peningkatan Indeks Rasa Aman di Kecamatan Pangkalan Lada maka perlunya perbaikan pada segi peningkatan partisipasi masyarakat dalam organisasi sipil seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa, maupun partai politik serta perlunya peningkatan kemampuan masyarakat dalam mitigasi bencana di Kecamatan Pangkalan Lada.

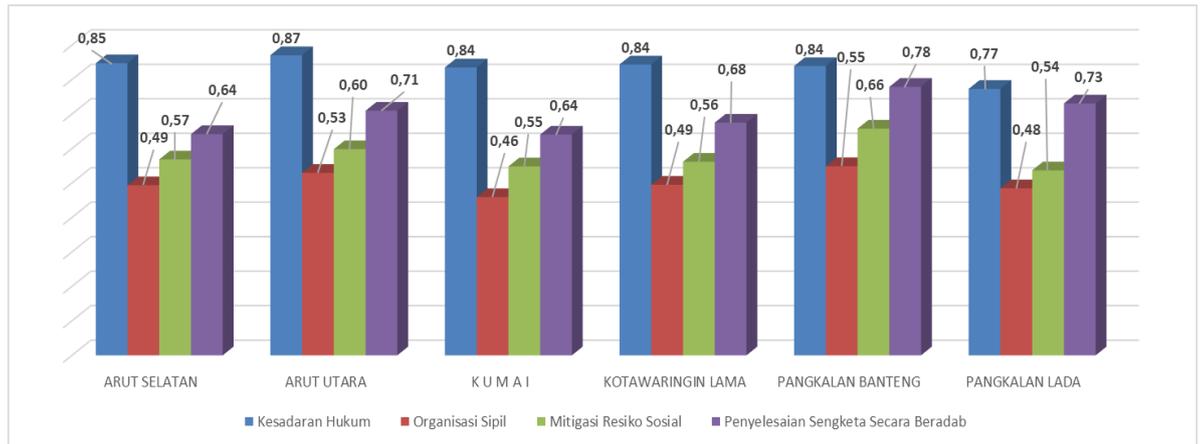
2. Pada Kecamatan Kumai adapun bila dilihat pada indikator yang mempengaruhi nilai Indeks Rasa Aman adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 56. Indikator Indeks Rasa Aman Kecamatan Kumai

Berdasarkan nilai dari indikator Indeks Rasa Aman pada Kecamatan Kumai diketahui bahwa dari empat indikator tersebut terdapat 2 indikator yang memiliki nilai terendah dan masuk dalam kategori **“Kurang Baik” (0,44 - 0,62)** yaitu Partisipasi Organisasi Sipil (0,46) dan Mitigasi Resiko Sosial (0,55). Sehingga dalam upaya peningkatan Indeks Rasa Aman di Kecamatan Kumai maka perlunya perbaikan pada segi peningkatan partisipasi masyarakat dalam organisasi sipil seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa, maupun partai politik serta perlunya peningkatan kemampuan masyarakat dalam mitigasi bencana di Kecamatan Kumai.

Selanjutnya adalah mengetahui indikator pada Indeks Rasa Aman setiap kecamatan guna melihat indikator mana yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya hasil dari variabel Indeks Rasa Aman di kecamatan tersebut. Adapun nilai indikator Indeks Rasa Aman setiap kecamatan adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 57. Indikator Indeks Rasa Aman Setiap Kecamatan

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa Pada nilai Indikator Indeks Toleransi pada setiap kecamatan, terdapat beberapa indikator masuk dalam beberapa kategori adalah sebagai berikut:

- Kategori **“Kurang Baik” (0,44 - 0,62)** yaitu: Indikator Organisasi Sipil (0,49) dan Indikator Mitigasi Resiko Sosial (0,57) pada Kecamatan Arut Selatan; Indikator Organisasi Sipil (0,53) dan Indikator Mitigasi Resiko Sosial (0,60) pada Kecamatan Arut Utara; Indikator Organisasi Sipil (0,46) dan Indikator Mitigasi Resiko Sosial (0,55) pada Kecamatan Kumai; Indikator Organisasi Sipil (0,49) dan Indikator Mitigasi Resiko Sosial (0,56) pada Kecamatan Kotawaringin Lama; Indikator Organisasi Sipil (0,55) pada Kecamatan Pangkalan Banteng; serta Indikator Organisasi Sipil (0,48) dan Indikator Mitigasi Resiko Sosial (0,54) pada Kecamatan Pangkalan Lada
- Kategori **“Sangat Baik” (0,82-1)** yaitu Indikator Kesadaran Hukum (0,85) pada Kecamatan Arut Selatan; Indikator Kesadaran Hukum (0,87) pada Kecamatan Arut Utara. Indikator Kesadaran Hukum (0,84) pada Kecamatan Kumai; Indikator Kesadaran Hukum (0,84) pada Kecamatan Kotawaringin Lama; dan Indikator Kesadaran Hukum (0,84) pada Kecamatan Pangkalan Banteng
- Selebihnya adalah kategori **“Baik” (0,63-0,81)**

Dari seluruh indikator Indeks Rasa Aman tersebut, diketahui bahwa seluruh kecamatan mempunyai nilai indikator terendah yaitu pada Indikator Organisasi Sipil dan Indikator Mitigasi Resiko Sosial. Selain itu, dari kedua indikator terendah tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa kecamatan yang memiliki nilai indikator dalam kategori **“Kurang Baik” (0,44 - 0,62)** antara lain:

1. Indikator Organisasi Sipil, pada indikator ini seluruh kecamatan masuk dalam kategori **“Kurang Baik” (0,44 - 0,62)** yaitu Kecamatan Arut Selatan (0,49), Kecamatan Arut Utara (0,53), Kecamatan Kumai (0,46), Kecamatan

Kotawaringin Lama (0,49), Kecamatan Pangkalan Banteng (0,55), dan Kecamatan Pangkalan Lada (0,48).

2. Indikator Mitigasi Resiko Sosial, pada indikator ini terdapat 5 kecamatan yang masuk dalam kategori **“Kurang Baik” (0,44 - 0,62)** yaitu Kecamatan Arut Selatan (0,57), Kecamatan Arut Utara (0,60), Kecamatan Kumai (0,55),

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB IV dapat di ambil kesimpulan atas hasil analisis nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) di kabupaten Kotawaringin Barat, adalah sebagai berikut:

1. Nilai **Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kabupaten Kotawaringin Barat** Tahun 2019 dengan nilai 0.70 dimana masuk dalam kategori **“Baik”**. Adapun dari nilai IPMas Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut diketahui bahwa nilai indeks terendah adalah pada Indeks Gotong Rorong yaitu sebesar 0,66 dan Indeks Rasa Aman yaitu sebesar 0,68 dimana keduanya masuk dalam kategori **“Baik”**. Pada kedua indeks IPMas tersebut, bila dianalisa terkait dengan indikator pembentuknya diketahui bahwa pada Indeks Gotong Rorong terdapat indikator terendah yaitu Indikator Jejaring Sosial (0,56) masuk dalam kategori **“Kurang Baik”** dan pada Indikator Indeks Rasa Aman diketahui indikator terendah adalah pada Indikator Organisasi Sipil (0,50) dan Indikator Mitigasi Resiko Sosial (0,58) dimana kedua indikator tersebut masuk dalam kategori **“Kurang Baik”**. Adapun Indeks Toleransi merupakan Indeks pembentuk IPMas dengan nilai tertinggi dengan nilai sebesar 0,77 dimana masuk dalam kategori **“Baik”**.
2. Pada analisis berdasarkan **Kelompok Usia** dapat diketahui bahwa nilai IPMas terendah adalah pada kelompok usia 20 tahun kebawah dengan nilai IPMas sebesar 0,66. Adapun pada kelompok usia 20 tahun kebawah diketahui bahwa nilai indeks terendah adalah Indeks Gotong Royong yaitu sebesar 0,58 sehingga masuk dalam kategori **“Kurang Baik”**. Adapun bila dianalisa indikator pembentuk Indeks Gotong Royong pada kelompok usia 20 tahun kebawah diketahui terdapat 3 indikator yang mempunyai nilai terendah yaitu Indikator Jejaring Sosial (0,43) dimana masuk dalam kategori **“Tidak Baik”**, Indikator Kerjasama Sosial (0,60) dimana masuk dalam kategori **“Kurang Baik”**, dan Indikator Aksi Kolektif (0,62) dimana masuk dalam kategori **“Kurang Baik”**. Pada analisis berdasarkan Kelompok Usia, Bila dilihat secara keseluruhan pada ketiga indeks pembentuk Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) diketahui bahwa terdapat 2 Indeks pembentuk IPMas yang mempunyai nilai terendah yaitu Indeks Gotong Royong dan Indeks Rasa Aman.. Berikut indikator terendah pada masing-masing Indeks tersebut:
 - Pada Indeks Gotong Royong, diketahui bahwa pada indikator pembentuk Indeks Gotong Royong di seluruh kelompok usia masyarakat mempunyai indikator terendah adalah Indikator Jejaring Sosial.

- Pada Indeks Rasa Aman, diketahui bahwa pada indikator pembentuk Indeks Rasa Aman di seluruh kelompok usia masyarakat mempunyai indikator terendah adalah Indikator Organisasi Sipil dan Indikator Mitigasi Resiko Sosial.
3. Pada analisis berdasarkan **Kelompok Pekerjaan/Profesi** dapat diketahui bahwa nilai IPMas terendah adalah pada profesi Pelajar/Mahasiswa dengan nilai IPMas sebesar 0,68, profesi Wiraswasta dengan nilai IPMas 0,68, dan profesi lain-lain (ibu rumah tangga, penjahit, penjaga toko, tidak bekerja, dll) dengan nilai IPMas sebesar 0,69. Pada nilai IPMas ketiga profesi tersebut masuk dalam kategori **“Baik”**. Adapun pada ketiga profesi dengan nilai IPMas terendah tersebut diketahui bahwa pada indeks pembentuk nilai IPMas, nilai indeks terendah adalah Indeks Gotong Royong yaitu pada Profesi Pelajar/Mahasiswa adalah sebesar 0,58 masuk dalam kategori **“Kurang Baik”**, Profesi Wiraswasta sebesar 0,64 masuk dalam kategori **“Baik”**, dan Profesi Lain-lain (ibu rumah tangga, penjahit, penjaga toko, tidak bekerja, dll) sebesar 0,64 masuk dalam kategori **“Baik”**. Adapun bila dianalisa indikator pembentuk Indeks Gotong Royong pada ketiga profesi tersebut diketahui bahwa indikator terendah adalah pada Indikator Jejaring Sosial dan Indikator Kerjasama Sosial. Pada analisis berdasarkan Kelompok Pekerjaan/Profesi, Bila dilihat secara keseluruhan pada ketiga indeks pembentuk Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) diketahui bahwa terdapat 2 Indeks pembentuk IPMas yang mempunyai nilai terendah yaitu Indeks Gotong Royong dan Indeks Rasa Aman. Berikut indikator terendah pada masing-masing Indeks tersebut:
- Pada Indeks Gotong Royong, diketahui bahwa pada indikator pembentuk Indeks Gotong Royong di seluruh kelompok profesi mempunyai indikator terendah adalah Indikator Jejaring Sosial.
 - Pada Indeks Rasa Aman, diketahui bahwa pada indikator pembentuk Indeks Rasa Aman di seluruh kelompok profesi mempunyai indikator terendah adalah Indikator Organisasi Sipil dan Indikator Mitigasi Resiko Sosial.
4. Pada analisis berdasarkan **Kelompok Pendidikan** dapat diketahui bahwa nilai IPMas terendah adalah pada kelompok jenjang pendidikan D1/D2/D3 dengan nilai IPMas sebesar 0,69 dan jenjang Pendidikan SLTA kebawah dengan nilai IPMas sebesar 0,70. Pada nilai IPMas kedua kelompok jenjang pendidikan tersebut masuk dalam kategori **“Baik”**. Adapun pada kedua kelompok jenjang pendidikan dengan nilai IPMas terendah tersebut diketahui bahwa pada indeks pembentuk nilai IPMas, nilai indeks terendah adalah Indeks Gotong Royong dan Indeks Rasa Aman. Pada kelompok jenjang Pendidikan D1/D2/D3 mempunyai nilai Indeks Gotong Royong sebesar 0,65 masuk dalam kategori **“Baik”** dan nilai Indeks Rasa Aman sebesar 0,65 masuk dalam kategori **“Baik”**. Sedangkan, pada kelompok jenjang Pendidikan SLTA kebawah

mempunyai nilai Indeks Gotong Royong sebesar 0,66 masuk dalam kategori **“Baik”**, dan nilai Indeks Rasa Aman sebesar 0,68 masuk dalam kategori **“Baik”**. Adapun bila dianalisa indikator pembentuk nilai Indeks Gotong Royong dan Indeks Rasa Aman pada kedua kelompok jenjang pendidikan dengan nilai IPMas terendah tersebut diketahui bahwa pada Indeks Gotong Royong mempunyai nilai indikator terendah adalah Indikator Kerjasama Sosial dan Pada Indeks Rasa Aman mempunyai indikator terendah adalah Indikator Organisasi Sipil dan Indikator Mitigasi Resiko Sosial. Pada analisis berdasarkan Kelompok Pendidikan, Bila dilihat secara keseluruhan pada ketiga indeks pembentuk Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) diketahui bahwa terdapat 2 Indeks pembentuk IPMas yang mempunyai nilai terendah yaitu Indeks Gotong Royong dan Indeks Rasa Aman. Berikut indikator terendah pada masing-masing Indeks tersebut:

- Pada Indeks Gotong Royong, diketahui bahwa pada indikator pembentuk Indeks Gotong Royong di seluruh kelompok jenjang pendidikan mempunyai indikator terendah adalah Indikator Jejaring Sosial.
 - Pada Indeks Rasa Aman, diketahui bahwa pada indikator pembentuk Indeks Rasa Aman di seluruh kelompok jenjang pendidikan mempunyai indikator terendah adalah Indikator Organisasi Sipil dan Indikator Mitigasi Resiko Sosial.
5. Pada analisis berdasarkan **kewilayahan** atau berdasarkan **kecamatan**, diketahui bahwa terdapat 2 kecamatan yang mempunyai nilai IPMas terendah dan dibawah nilai IPMas Kabupaten yaitu kecamatan Kumai dengan nilai IPMas sebesar 0,66 dan kecamatan Pangkalan Lada dengan nilai IPMas sebesar 0,67 dimana nilai IPMas kedua kecamatan tersebut masuk dalam kategori **“Baik”**. Adapun pada kedua kecamatan dengan nilai IPMas terendah tersebut diketahui bahwa pada indeks pembentuk nilai IPMas, nilai indeks terendah adalah Indeks Gotong Royong dan Indeks Rasa Aman. Pada Kecamatan Kumai mempunyai nilai Indeks Gotong Royong sebesar 0,58 masuk dalam kategori **“Kurang Baik”** dan nilai Indeks Rasa Aman sebesar 0,66 masuk dalam kategori **“Baik”**. Sedangkan, pada Kecamatan Pangkalan Lada mempunyai nilai Indeks Gotong Royong sebesar 0,60 masuk dalam kategori **“Kurang Baik”**, dan nilai Indeks Rasa Aman sebesar 0,65 masuk dalam kategori **“Baik”**. Adapun bila dianalisa indikator pembentuk dari Indeks Gotong Royong dan Indeks Rasa Aman pada kedua kecamatan yang memiliki nilai IPMas terendah tersebut adalah sebagai berikut:
- Kecamatan Kumai, pada Indeks Gotong Rorong mempunyai indikator terendah yaitu Indikator Jejaring Sosial (0,42) masuk dalam kategori **“Tidak Baik”** dan Indikator Kerjasama Sosial (0,62) masuk dalam kategori **“Kurang Baik”**. Sedangkan pada Indeks Rasa Aman mempunyai indikator terendah

yaitu Indikator Organisasi Sipil (0,48) masuk dalam kategori “**Kurang Baik**” dan Indikator Mitigasi Resiko Sosial (0,55) masuk dalam kategori “**Kurang Baik**”.

- Kecamatan Pangkalan Lada, pada Indeks Gotong Rorong mempunyai indikator terendah yaitu Indikator Jejaring Sosial (0,48) masuk dalam kategori “**Kurang Baik**”. Sedangkan pada Indeks Rasa Aman mempunyai indikator terendah yaitu Indikator Organisasi Sipil (0,48) masuk dalam kategori “**Kurang Baik**” dan Indikator Mitigasi Resiko Sosial (0,54) masuk dalam kategori “**Kurang Baik**”.

Pada analisis berdasarkan **kewilayahan** atau berdasarkan **kecamatan**, Bila dilihat secara keseluruhan pada ketiga indeks pembentuk Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) diketahui bahwa terdapat 2 Indeks pembentuk IPMas yang mempunyai nilai terendah yaitu Indeks Gotong Royong dan Indeks Rasa Aman. Berikut indikator terendah pada masing-masing Indeks tersebut:

- Pada Indeks Gotong Royong, diketahui bahwa pada indikator pembentuk Indeks Gotong Royong di seluruh kelompok jenjang pendidikan mempunyai indikator terendah adalah Indikator Jejaring Sosial.
- Pada Indeks Rasa Aman, diketahui bahwa pada indikator pembentuk Indeks Rasa Aman di seluruh kelompok jenjang pendidikan mempunyai indikator terendah adalah Indikator Organisasi Sipil dan Indikator Mitigasi Resiko Sosial.

5.2. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas maka adapun saran dalam penindak lanjutan atas kajian pengukuran nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Dalam peningkatan nilai IPMas di Kabupaten Kotawaringin Barat maka hal yang perlu diperhatikan adalah pada aspek sebagai berikut:
 - a) Aspek pada Indeks Gotong Royong adalah terkait dengan **Jejaring Sosial** dimana yang perlu ditingkatkan adalah keikutsertaan masyarakat dalam menjadi anggota kelompok/ organisasi (yang mempunyai kepengurusan) di lingkungan sekitar tempat tinggal seperti arisan, karang taruna, PKK, dll; Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan bersama di lingkungan sekitar tempat tinggal untuk kepentingan warga seperti kerja bakti, siskamling, dan lainnya; keikutsertaan dalam pertemuan warga (rapat) di lingkungan sekitar tempat tinggal seperti rapat RT, rapat RW, Musrenbang Desa/Kelurahan, Rapat Desa, dlll;

dan keaktifan masyarakat dalam memberikan pendapat/saran dalam pertemuan warga (rapat) di lingkungan sekitar.

- b) Aspek pada Indeks Rasa Aman adalah terkait dengan dengan **Organisasi Sipil dan Mitigasi Resiko Sosial**. Adapun terkait dengan Organisasi Sipil yang perlu ditingkatkan adalah Keikutsertaan masyarakat dalam LSM Pemberdayaan Masyarakat seperti: Posyandu, kelompok tani, dll; Partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota Organisasi Massa yang mempunyai AD/ART seperti HIPMI, PBNU, Muslimat, Aisyiyah, Walhi, Pemuda Pancasila, dll; dan keikutsertaan masyarakat dalam menjadi anggota Partai Politik peserta Pemilu seperti: PKB, PAN, Demokrat, PDI, dsb. Sedangkan terkait dengan Mitigasi Resiko Sosial, hal yang menjadi prioritas upaya peningkatan IPMas adalah terkait dengan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap adanya tanda-tanda atau peringatan untuk mengatasi kejadian darurat bencana alam di lingkungan tempat tinggal (seperti area tempat kumpul, petunjuk jalur evakuasi, sirine pertanda bencana tsunami), dan peningkatan pelaksanaan pelatihan/simulasi kepada masyarakat tentang penyelamatan bencana alam.
2. Adapun dari beberapa aspek yang menjadi prioritas perbaikan dalam rangka peningkatan IPMas Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya adalah agar lebih efektif dan efisien dalam upaya peningkatan nilai IPMas maka sasaran wilayah yang perlu diperhatikan adalah pada dua kecamatan yang mempunyai nilai IPMas terendah adalah **Kecamatan Kumai** dan **Kecamatan Pangkalan Lada**. Dari kedua kecamatan tersebut selanjutnya pada sasaran masyarakat di kecamatan tersebut yang menjadi prioritas upaya peningkatan nilai IPMas adalah dilihat pada 3 profil masyarakat yaitu berdasarkan usia, Tingkat Pendidikan, dan Pekerjaan. Berikut 3 profil masyarakat yang menjadi prioritas utama dalam peningkatan nilai IPMas di kedua kecamatan tersebut antara lain:
 - a) Sasaran masyarakat berdasarkan **Usia**, adalah pada **Masyarakat Usia 20 tahun kebawah**.
 - b) Sasaran masyarakat berdasarkan **Tingkat Pendidikan**, adalah pada **Masyarakat dengan Tingkat Pendidikan SLTA Kebawah** dan **Masyarakat dengan Tingkat Pendidikan D1/D2/D3**.
 - c) Sasaran masyarakat berdasarkan **Pekerjaan**, adalah pada Masyarakat yang **Berprofesi Pelajar/Mahasiswa**, masyarakat yang **Berprofesi Wiraswasta**, dan masyarakat yang **Berprofesi Profesi Lain-lain (ibu rumah tangga, penjahit, penjaga toko, tidak bekerja, rohaniawan, supir, ketua adat, Dll)**.

3. Dalam upaya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) di Kabupaten Kotawaringin Barat pada beberapa aspek di atas dan berdasarkan sasaran yang menjadi prioritas perbaikan maka perlunya kerjasama dengan Instansi atau Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait serta dengan Lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada. Berikut adalah beberapa Instansi atau Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dapat dijadikan mitra berdasarkan aspek yang menjadi prioritas perbaikan, sasaran kewilayahan maupun sasaran profil masyarakat:

a) Pemerintah Kecamatan

Sebagai instansi kewilayahan dalam mengkoordinasikan dengan desa-desa maupun kelurahan-kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas). Selain itu juga peningkatan peran serta masyarakat dalam musyawarah pembangunan maupun pembinaan Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan.

b) Pemerintah Desa/Kelurahan

Pemerintah desa/kelurahan berperan dalam penguatan masyarakat dalam partisipasi dalam rapat atau musyawarah yang diadakan oleh desa/kelurahan di balai desa maupun di tingkat RT dan RW. Desa/kelurahan berperan dalam penggalakan keikutsertaan masyarakat dalam kerja bakti dilingkungan sekitar, penggalakan partisipasi masyarakat dalam organisasi maupun kelompok masyarakat di desa. Desa/kelurahan berperan dalam hubungan kemasyarakatan, penciptaan kemandirian desa/kelurahan melalui partisipasi masyarakat dan penciptaan keguyuban di masyarakat. Desa/kelurahan juga berperan dalam mengkoordinir maupun pelaksana pelaksanaan sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat desa terkait upaya peningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) serta Desa/Kelurahan berperan dalam pemberdayaan Organisasi/Lembaga/Perkumpulan masyarakat yang ada di desa tersebut.

c) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa – Pendamping Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui pendamping desa yang sudah ada di desa berperan dalam penggalakan upaya-upaya partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan desa/kelurahan, keikutsertaan dalam acara-acara di desa, ikut serta dalam keanggotaan lembaga pemberdayaan masyarakat, keikutsertaan dalam perkumpulan/organisasi masyarakat maupun organisasi politik. Serta

pengadaan pelaksanaan sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat desa terkait upaya peningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) serta Desa/Kelurahan berperan dalam pememberdayaan Organisasi/Lembaga/Perkumpulan masyarakat yang ada di desa tersebut.

d) Setda Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Kemasyarakatan

Berperan dalam ikut serta peningkatan stabilitas keamanan masyarakat, peningkatan toleransi dan kerukunan antar masyarakat, peningkatan acara-acara kemasyarakatan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan maupun kerukunan antar masyarakat.

e) Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD)

Berperan dalam peningkatan Pembinaan dan Pelatihan kepada masyarakat terkait pengetahuan terhadap adanya tanda-tanda atau peringatan untuk mengatasi kejadian darurat bencana alam di lingkungan tempat tinggal (seperti area tempat kumpul, petunjuk jalur evakuasi, sirine pertanda bencana tsunami), pengetahuan penanggulangan pasca bencana, dan upaya pencegahan terjadinya bencana. Selain itu, BPBD berperan dalam pembentukan kader-kader tangguh bencana di setiap desa/kelurahan sebagai upaya peningkatan mitigasi bencana.

f) Lembaga Pendidikan (Dinas Pendidikan/Sekolah/Pondok Pesantren/Madarasah)

Berperan dalam pemberian sosialisasi maupun pembinaan kepada siswa-siswa sekolah/ pondok pesantren terkait dengan partisipasi siswa dalam acara maupun kerja bakti desa, keikutsertaan dalam organisasi kepemudaan maupun olahraga, dan peatihan/pembinaan mitigasi bencana.

g) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sektoral yang memiliki kader-kader penggerak di masyarakat

Berperan dalam penggalakkan partisipasi masyarakat dalam ikut serta sebagai kader pemberdayaan masyarakat seperti kader posyandu, kader penanggulangan penyakit masyarakat, kader Pendidikan usia dini, kader kantribnas, dll.

h) Organisasi Massa/Partai Politik

Berperan dalam penggalakkan masyarakat dalam keikutsertaan dalam anggota organisasi massa ataupun Partai politik tersebut. Pemberian Pendidikan politik kepada masyarakat, pembinaan terkait

kemasyarakatan maupun penciptaan stabilitas keamanan lingkungan, gotong royong, dan toleransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro University
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset
- Supriady, Deddy dan Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: SUN
- Abu Huraerah. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Frank G. Goble. 1987. *Mazhab ketiga: Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. Yogyakarta: Kanisius
- Johannes Muller. 2006. *Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Dalam Negeri. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*.
- Achmad, Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang legisprudence*, Kencana, 2009, hal 510
- Casram. 2016. *Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural*. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, 2 (Juli 2016): 187-198.
- Sri Wahyuni. 2014. *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Memanfaatkan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pt. Perkebunan Nusantara V Di Kelurahan Sei Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau. [Online] Diakses melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/4183/3/BAB%20II.pdf> pada [18 November 2018].
- Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulkarnain, Hasibuan. 2013. *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*. *Jurnal Justitia, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol 1, No 01 (2013)

LAMPIRAN I (KUESIONER)

 <p style="font-size: small;">Laboratorium Kebijakan Publik & Perencanaan Pembangunan</p>	<p>SURVEI</p> <p>INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT</p>	<p>No. Kuesioner</p> <p>□□-□□□-□</p>
---	--	--------------------------------------

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden :	2. Jenis Kelamin : L / P
3. Alamat :	4. Pekerjaan :
	5. No. HP Responden :
Pertanyaan bagian A nomor 6, isikan dengan memberi tanda (x) pada salah satu jawaban yang dipilih.	
<p>6. Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan :</p> <p> <input type="checkbox"/> 1. SLTA kebawah <input type="checkbox"/> 2. D1/D2/D3 <input type="checkbox"/> 3. D4/S1 <input type="checkbox"/> 4. S2/S3 </p>	
<p>7. Usia Responden</p> <p> <input type="checkbox"/> ≤20th <input type="checkbox"/> 21th - 30th <input type="checkbox"/> 31th - 40th <input type="checkbox"/> 41th - 50th <input type="checkbox"/> 51th - 60th </p>	

Berikan tanda √ pada pilihan jawaban berikut					
Gotong Royong					
Indikator	Pertanyaan/ Pernyataan	1	2	3	4
Kerjasama Sosial	Seberapa sering anda mengikuti kegiatan bersama untuk membantu warga yang sedang mengalami musibah (seperti kematian, sakit, dll) di lingkungan sekitar tempat tinggal anda dalam setahun terakhir?	Tidak Pernah	Jarang	Sering	Selalu
	Seberapa sering anda hadir/ berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (seperti: olahraga, kesenian, arisan, pengajian) di lingkungan sekitar tempat tinggal?	Tidak Pernah	Jarang	Sering	Selalu
Jejaring Sosial	Apakah anda menjadi anggota kelompok/ organisasi (yang mempunyai kepengurusan) di lingkungan sekitar tempat tinggal? (Contoh: arisan, karang taruna, PKK).	Tidak	1 Organis asi	2 Organis asi	> 2 Organis asi
	Seberapa sering anda mengikuti kegiatan bersama untuk kepentingan warga (seperti kerja bakti, siskamling, dll) di lingkungan sekitar tempat tinggal anda dalam setahun terakhir?	Tidak Pernah	Jarang	Sering	Sangat Sering/ Selalu
	Apakah dalam setahun terakhir anda pernah mengikuti pertemuan warga (rapat) di lingkungan sekitar tempat tinggal anda?	Tidak Pernah	Jarang	Sering	Selalu

	Apakah anda ikut memberikan pendapat/ saran dalam pertemuan warga (rapat) di lingkungan sekitar tempat tinggal?	Tidak Pernah	Jarang	Sering	Selalu
Aksi Kolektif	Seberapa sering anda hadir/ berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan (seperti: pengajian/ perayaan keagamaan) di lingkungan sekitar tempat tinggal selama setahun terakhir?	Tidak Pernah	Jarang	Sering	Sangat Sering/ Selalu
Kepercayaan Sosial	Apakah anda mempercayai tetangga anda untuk ditipti/ menitipkan rumah ketika semua anggota keluarga anda bepergian/ menginap ditempat lain?	Tidak Percaya	Kurang Percaya	Percaya	Sangat Percaya
	Seberapa percaya anda menitipkan anak (usia 1-12 tahun) pada tetangga jika tidak satupun ART dewasa ada di rumah?	Tidak Percaya	Kurang Percaya	Percaya	Sangat Percaya
	Secara umum, apakah anda percaya bahwa tokoh masyarakat (seperti: ustad, kamituwo, ketua adat, dll) di lingkungan sekitar tempat tinggal anda dapat berperan dalam membantu mengatasi masalah warga (seperti: perselisihan, pertengkaran, dll) ?	Tidak Percaya	Kurang Percaya	Percaya	Sangat Percaya
	Secara umum, apakah anda percaya bahwa tokoh agama di lingkungan sekitar tempat tinggal anda dapat berperan sebagai panutan/ penuntun moral masyarakat disekitarnya?	Tidak Percaya	Kurang Percaya	Percaya	Sangat Percaya
	Secara umum, apakah anda percaya bahwa perangkat desa/ kelurahan telah menjalankan tugasnya dengan baik?	Tidak Percaya	Kurang Percaya	Percaya	Sangat Percaya
Toleransi					
Indikator	Pertanyaan/ Pernyataan	1	2	3	4
Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial Budaya	Apakah anda setuju jika di lingkungan sekitar tempat tinggal anda terdapat sekelompok orang beragama lain yang melakukan kegiatan (seperti: upacara keagamaan)?	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
	Apakah anda setuju jika di lingkungan sekitar tempat tinggal anda terdapat tempat ibadah agama lain atau akan dibangun tempat ibadah agama lain?	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
	Apakah anda setuju jika di lingkungan sekitar tempat tinggal anda terdapat sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan (seperti: upacara adat, dll)?	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Inklusi terhadap Minoritas	Apakah anda setuju jika lingkungan sekitar anda dipimpin oleh orang dari suku lain?	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Kesetaraan Gender	Perempuan di lingkungan sekitar saya sudah mendapatkan hak yang sama dalam mengakses pendidikan (sebagai contoh yaitu: perempuan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju

	diperbolehkan untuk menempuh pendidikan formal sampai tingkat SMA/ perguruan tinggi)				
	Perempuan di lingkungan sekitar saya sudah mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan (sebagai contoh yaitu: Perempuan memiliki kesempatan bekerja diseluruh bidang)	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
	Pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terhadap kesehatan reproduksi sudah baik (sebagai contoh yaitu tersedianya fasilitas puskesmas, rumah sakit, untuk persalinan)	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
	Saya mendukung keterwakilan perempuan pada jabatan publik (Legislatif, yudikatif, eksekutif) sebagai contoh yaitu mendukung keterwakilan perempuan pada pencalonan sebagai kepala desa, walikota, anggota DPRD dsb.	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Dukungan Sosial kepada Minoritas	Golongan suku/agama lain di lingkungan sekitar saya sudah mendapatkan akses fasilitas umum dengan mudah (contoh: mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dll)	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Rasa Aman					
Indikator	Pertanyaan/ Pernyataan	1	2	3	4
Kesadaran Hukum	Apakah anda percaya bahwa polisi di lingkungan sekitar anda dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat?	Tidak Percaya	Kurang Percaya	Percaya	Sangat Percaya
	Apakah anda percaya bahwa lembaga peradilan dapat berlaku adil dalam menyelesaikan kasus di lingkungan masyarakat sekitar (seperti: kasus pencurian, penculikan, pembunuhan dll) ?	Tidak Percaya	Kurang Percaya	Percaya	Sangat Percaya
	Apakah semua anggota keluarga anda yang sudah memiliki KTP menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif (seperti: pemilihan DPR, DPRD, DPD)?	Tidak ada	Hanya saya	Sebagian anggota keluarga	Semua anggota keluarga
	Apakah semua anggota keluarga anda yang sudah memiliki KTP menggunakan hak pilih dalam Pilpres?	Tidak ada	Hanya saya	Sebagian anggota keluarga	Semua anggota keluarga
	Apakah semua anggota keluarga anda yang sudah memiliki KTP menggunakan hak pilih dalam Pilkada terakhir di provinsi dan kabupaten ini (seperti: pemilihan walikota, bupati, gubernur)?	Tidak ada	Hanya saya	Sebagian anggota keluarga	Semua anggota keluarga
Organisasi Sipil	Saya setuju dengan adanya LSM Pemberdayaan Masyarakat (seperti: Posyandu, kelompok tani , dll)	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju

Data Tim Lapangan :

<p>Nama Enumerator :</p> <p>Tanggal Wawancara :</p> <p>Catatan :</p>	<p>QC :</p> <p>Nama :</p> <p>Catatan :</p>	<p>Nama :</p> <p>Entri :</p>
	<p>Tanda tangan responden :</p>	

LAMPIRAN II (HASIL DATA ANALISIS)

Indeks Pembangunan Masyarakat

NO	KECAMATAN	Indeks Gotong Royong	Indeks Toleransi	Indeks Rasa Aman	Nilai IPMas
1	Arut Selatan	0,65	0,76	0,68	0,70
2	ARUT UTARA	0,72	0,79	0,71	0,74
3	K U M A I	0,58	0,74	0,66	0,66
4	KOTAWARINGIN LAMA	0,67	0,78	0,68	0,71
5	PANGKALAN BANTENG	0,77	0,82	0,73	0,77
6	PANGKALAN LADA	0,60	0,76	0,65	0,67

Indikator Indeks Gotong Royong Setiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	Kerjasama Sosial	Jejaring Sosial	Aksi Kolektif	Kepercayaan Sosial
1	ARUT SELATAN	0,71	0,56	0,70	0,69
2	ARUT UTARA	0,82	0,60	0,81	0,76
3	K U M A I	0,62	0,42	0,64	0,68
4	KOTAWARINGIN LAMA	0,70	0,58	0,72	0,71
5	PANGKALAN BANTENG	0,81	0,68	0,83	0,81
6	PANGKALAN LADA	0,68	0,48	0,70	0,64

Indikator Indeks Toleransi

NO	KECAMATAN	Penerimaan Terhadap Perbedaan Sosial Budaya	Inklusi pada Minoritas	Kesetaraan Gender	Dukungan Sosial pada Minoritas
1	ARUT SELATAN	0,72	0,64	0,81	0,77
2	ARUT UTARA	0,81	0,69	0,82	0,70
3	K U M A I	0,68	0,61	0,81	0,75
4	KOTAWARINGIN LAMA	0,78	0,68	0,80	0,79
5	PANGKALAN BANTENG	0,79	0,77	0,85	0,82
6	PANGKALAN LADA	0,74	0,73	0,79	0,75

Indikator Indeks Rasa Aman

NO	KECAMATAN	Kesadaran Hukum	Organisasi Sipil	Mitigasi Resiko Sosial	Penyelesaian Sengketa Secara Beradab
1	ARUT SELATAN	0,85	0,49	0,57	0,64
2	ARUT UTARA	0,87	0,53	0,60	0,71
3	K U M A I	0,84	0,46	0,55	0,64
4	KOTAWARINGIN LAMA	0,84	0,49	0,56	0,68
5	PANGKALAN BANTENG	0,84	0,55	0,66	0,78
6	PANGKALAN LADA	0,77	0,48	0,54	0,73

Nilai IPMAS, Indeks Gotong Royong, Indeks Toleransi, Indeks Rasa AMan Setiap Desa Sampel

KECAMATAN	DESA SAMPEL	Indeks Gotong Royong Desa Sampel	Indeks Toleransi Desa Sampel	Indeks Rasa Aman Desa Sampel	IPMas Desa Sampel
ARUT SELATAN	Kelurahan Baru	0,65	0,77	0,69	0,71
	Desa Pasir Panjang	0,63	0,78	0,66	0,69
	Kelurahan Mendawai	0,76	0,78	0,71	0,75
	Desa Natai Raya	0,52	0,73	0,65	0,63
	Desa Kumpai Batu Atas	0,69	0,72	0,68	0,69
ARUT UTARA	Kelurahan Pangkut	0,58	0,82	0,67	0,69
	Desa Nanga Mua	0,68	0,80	0,75	0,74
	Desa Sukarami	0,80	0,74	0,73	0,76
	Desa Gandis	0,73	0,77	0,67	0,72
	Desa Gandis	0,82	0,80	0,75	0,79
KUMAI	Kelurahan Kumai Hilir	0,52	0,73	0,63	0,63
	Desa Bumi Harjo	0,60	0,74	0,68	0,67
	Desa Kubu	0,66	0,72	0,69	0,69
	Kelurahan Kumai Hulu	0,59	0,74	0,67	0,66
	Kelurahan Candi	0,53	0,77	0,64	0,65
KOTAWARINGIN LAMA	Kelurahan Kotawaringin Hilir	0,64	0,80	0,67	0,71
	Kelurahan Kotawaringin Hulu	0,60	0,74	0,65	0,66
	Desa Riam Durian	0,72	0,80	0,70	0,74
	Desa Tempayung	0,75	0,82	0,71	0,76
	Desa Babual Baboti	0,62	0,73	0,67	0,68

KECAMATAN	DESA SAMPEL	Indeks Gotong Royong Desa Sampel	Indeks Toleransi Desa Sampel	Indeks Rasa Aman Desa Sampel	IPMas Desa Sampel
PANGKALAN BANTENG	Desa Karang Mulya	0,84	0,87	0,81	0,84
	Desa Amin Jaya	0,87	0,87	0,79	0,84
	Desa Simpang Berambai	0,71	0,78	0,70	0,73
	Desa Pangkalan Banteng	0,66	0,80	0,69	0,72
	Desa Kebun Agung	0,75	0,77	0,65	0,72
PANGKALAN LADA	Desa Pandu Sanjaya	0,62	0,74	0,66	0,67
	Desa Pangkalan Tiga	0,64	0,78	0,67	0,70
	Desa Lada Madala Jaya	0,57	0,79	0,67	0,68
	Desa Sumber Agung	0,59	0,76	0,67	0,68
	Desa Purbasari	0,57	0,73	0,61	0,64